DERADIKALISASI DI PERGURUAN TINGGI

Drs. Khairul Saleh, M.Ag. & Muhammad Arbain, M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS

SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR – INDONESIA

https://www.uinsi.ac.id

DERADIKALISASI DI PERGURUAN TINGGI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

DERADIKALISASI DI PERGURUAN TINGGI

Drs. Khairul Saleh, M.Ag. & Muhammad Arbain, M.Pd.

DERADIKALISASI DI PERGURUAN TINGGI

Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pendidikan Islam

Drs. Khairul Saleh, M.Ag.
Muhammad Arbain, M.Pd.

Editor: Zakiyah Ulfah
Proofreader: Eista Swaesti
Desain Cover: Yudan
Layout: Zuhdi Ali

Penerbit:
AR-RUZZ MEDIA
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta, 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com
ISBN: 978-602-313-488-5
Cetakan I, 2019

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id
Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
Saleh, Khairul dan Muhammad Arbain
Deradikalisasi di Perguruan Tinggi/Khairul Saleh dan Muhammad Arbain- Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2019
128 halaman, 16 cm × 25 cm
ISBN: 978-602-313-488-5
1. Pendidikan
I. Judul II. Khairul Saleh dan Muhammad Arbain

PRAKATA PENULIS

Penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam Semoga tetap diberikan kepada nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menghadirkan buku ini di hadapan para pembaca. Selama proses penelitian dan penulisan, penulis telah berusaha memaksimalkan segenap perhatian konsentrasi dan segenap kemampuan intelektual yang dimiliki untuk dapat menghadirkan sebuah kajian mendalam tentang manajemen strategik dalam menangkal radikalisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam di Kalimantan Timur dan Utara, yang dalam buku ini diberi judul: "Deradikalisasi di Perguruan Tinggi".

Penulisan buku ini dilatarbelakangi dan dimotivasi oleh maraknya radikalisme di Indonesia yang telah banyak meresahkan masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk turut serta mencari solusi dalam penanganannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perguruan Tinggi Islam yang ada di Kalimantan Timur dan Utara rawan terpapar radikalisme atas nama agama (Islam) yang kini begitu mengkhawatirkan dan butuh strategi yang tepat dalam mengatasinya. Gerakan radikalisme Islam seperti Haraki Tarbawi, Tahriri, dan Salafi kini tidak hanya menyemaikan ideologinya melalui lembaga dakwah kampus, gerakan pembebasan mahasiswa, dan *khilafah Islamiyah* dalam

bentuk kajian-kajian keislaman di masjid-masjid kampus atau kelas-kelas baik berbentuk *halaqah, daurah, usrah*, dan *mabit*, tetapi gerakan organisasi Islam radikal yang merupakan afiliasi organisasi ekstrem dari Timur Tengah ini sudah bertransformasi dalam kajian dakwahnya melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, whatsaap, dan youtube.

Berpijak dari pemikiran di atas, maka tulisan ini bermaksud menggali dan menemukan konsep manajemen strategik yang tepat dalam menangkal radikalisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam di Kalimantan Timur dan Utara.

Untuk itu buku ini membicarakan; pertama tentang gambaran umum radikalisme di Indonesia yang akhir-akhir ini mulai marak dibicarakan masyarakat Indonesia dan bahkan dunia; kedua manajemen strategik dan deradikalisasi yang didalamnya memuat tentang menelisik akar radikalisme Islam di Indonesia, media sosial dan reduksi pembelajaran keagamaan, tantangan deradikalisasi pendidikan Islam dan manajemen strategik deradikalisasi berbasis pendidikan Islam; ketiga potret deradikalisasi di PTKI Provinsi Kalimantan Timur dan Utara dan keempat tentang langkah-langkah strategis deradikalisasi.

Meski demikian dengan kesadaran mendalam penulis yakin bahwa penulisan ini jauh dari kondisi sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu penulis menerima saran konstruktif dari banyak pihak demi perbaikan di masa mendatang selanjutnya penulis harus mengakui bahwa selesainya penulisan karya ini tak lepas dari sentuhan-sentuhan kreatif dan konstruktif berupa ide pemikiran informasi dan bantuan banyak pihak yang secara sukarela membantu penulis selama melakukan penelitian untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Akhirnya semoga buku *"Deradikalisasi di Perguruan Tinggi"* ini dapat memberikan banyak manfaat dan warna baru kepada pihak mana saja yang ber kesempatan membacanya serta menelaahnya. Sekali lagi, saran-saran konstruktif senantiasa penulis harapkan dari banyak pihak demi perbaikan penulisan buku ini.

Samarinda, 15 November 2019
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS 5
DAFTAR ISI 7

BAB I

PENDAHULUAN 9

A. Gambaran Umum Radikalisme di Indonesia 9
B. Telaah Pustaka 14
C. Kerangka Teoritik 14
D. Metodologi Penelitian 21

BAB II

MANAJEMEN STRATEGIK DAN RADIKALISME 24

A. Manajemen Strategik 24
B. Menelisik Akar Radikalisme Islam Di Indonesia 28
C. Media Sosial Dan Reduksi Pembelajaran Keagamaan 38
D. Tantangan Deradikalisasi Pendidikan Islam 44
E. Manajemen Strategik Deradikalisasi Berbasis Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural 49

BAB III
POTRET DERADIKALISASI DI PTKI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 55
B. Manajemen Strategik dalam Menangkal Radikalisme di PTKI 73

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIK DERADIKALISASI 105

A. Kurikulum Berwawasan Keislaman Inklusif-Multikultural 108
B. Pendidik Yang Berparadigma Inklusif-Multikultural 111
C. Evaluasi Strategi Deradikalisasi Pendidikan Islam 114

BAB V
PENUTUP 118

DAFTAR KEPUSTAKAAN 120
TENTANG PENULIS 127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Radikalisme di Indonesia

Sejarah kekerasan dapat dikatakan sudah seusia dengan peradaban umat manusia. Berbagai bentuk derivasi kekerasan yang paling banyak menimbulkan malapetaka di dunia ini adalah ditengarai oleh perbedaan ideologi dan teologi yang kemudian dibalut dengan nuansa politik atas nama agama oleh kelompok tertentu. Eskalasi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, ditengarai oleh maraknya doktrinasi agama yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis politis kepada seseorang atau kelompok orang (yang telah teradikalisasi pemikirannya) yang kemudian menimbulkan salah kaprah (*mis-interpretation*) dalam memahami makna yang terkandung dalam nash-nash agama terutama tentang konsep jihad dalam Alquran yang hanya dipahami secara tekstual (baca: kaku) tanpa memandangnya secara kontekstual (dinamis-moderat) melalui pemikiran dan pengkajian mendalam. Kesalahfahaman memaknai nash-nash agama ini hampir ada di setiap agama tak terkecuali agama Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang menyukai berbagai bentuk kekerasan, melainkan agama hadir sebagai *hudan linnas* dan penyemai kedamaian (*rahmatan lil 'alamin*). Namun, realitanya, terutama di Indonesia, doktrinasi agama oleh kelompok ekstrimis politis ini telah tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Betapa tidak, dalam kurun waktu tidak lebih dari satu dekade pasca tumbangnya rezim Orde Baru, aksi radikalisme dan terorisme kini semakin menghujani tanah air. Aksi

radikalisme dan terorisme dengan pengeboman banyak terjadi, sebut saja bom Bali I, bom Bali II, bom Kedutaan Besar Australia, bom Hotel JW Marriot, bom Hotel Ritz Carlton, "bom buku" yang ditujukan ke sejumlah tokoh, "bom Jum'at" di masjid Mapolres Cirebon, dan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepuh (GBIS) Kepunton Solo.[1]

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *The Wahid Institute* pada tahun 2010, menunjukkan dengan jelas bahwa semakin meningkatnya grafik kekerasan yang mengatasnamakan agama, perbedaan keyakinan, dan intoleransi. *The Wahid Institute* mencatat, selama tahun 2010 terdapat 63 kasus, dengan rata-rata terjadi 5 kasus perbulan, dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari (12 kasus), Agustus (8 kasus), dan September (7 kasus). Korban dari berbagai kekerasan, karena perbedaan agama, keyakinan dan intoleransi ini berjumlah 153 korban, baik individu atau kelompok.[2]

Tentunya berbagai aksi kekerasan yang sering digencarkan oleh kelompok radikalis-teroris ini tidak lepas dari campur tangan jaringan terorisme transnasional. Dunia internasional dibuat "merinding" dengan aksi-aksi teror dan ekstrem yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok (Islam) garis keras, utamanya *Islamic State of Iraq and Syiria* atau yang dikenal dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS),[3] di samping kelompok Boko Haram, Taliban, dan lain-lain. Hampir tiap saat kelompok tersebut, dapat dikatakan, senantiasa mencari momentum untuk mengintimidasi atau pun meneror basis-basis wilayah yang menjadi sasaran targetnya.

Hal lain yang cukup menghawatirkan adalah aksi-aksi mereka yang semakin canggih karena berbasis teknologi informasi, dengan metode yang terus diperbaharui (*up date*), termasuk juga bervariasinya ragam aksi mereka yang kian rumit untuk terdeteksi.[4] Serangan teror seorang diri (*lonewolf*) dengan menggunakan kendaraan oleh teroris yang terjadi di Inggris dengan menyeruduk sekumpulan orang yang tengah berjalan di pinggir jembatan Westminster, London, bahkan dilanjutkan dengan aksi menikam seorang polisi dekat Parlemen Inggris pada Rabu (22 Maret 2017), atau yang paling mutakhir,

1 Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam", Conference Procedings *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012, hlm. 225.

2 Imam Machali, Peace Education dan Deradikalisasi Agama, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Juni 2013, hlm. 42.

3 Terkait dengan geneologi NIIS, baca Masdar Hilmy, "Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia", dalam Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2

4 "Penguatan Indonesia-Prancis", Kompas, 31 Maret 2017, hlm. 6.

ledakan yang menghantam stasiun kereta bawah tanah di kota St Petersburg, Rusia, Senin (3 April 2017), sehingga menewaskan puluhan orang serta melukai sebagian besar yang lain, adalah potret betapa tidak mudahnya "membaca" rencana aksi-aksi teroris itu. Berbagai aksi terorisme dan ekstrimisme global tersebut, secara tidak langsung telah menumbuhsuburkan spirit *xenophobia* yang serta anti Islam (islamphobia) dan anti migran,[5] sebagaimana yang terlihat sekarang di negara-negara Eropa lainnya. Tak mengherankan, apabila kemudian pemimpin Barat, khususnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, betul-betul memenuhi janjinya setelah terpilih sebagai pemimpin di negeri Paman Sam itu, untuk menolak para pendatang atau imigran Muslim dari beberapa negara Islam, yang menurutnya akan berpotensi menyulut aksi terorisme di AS. Tak pelak, kebijakan kontroversial Trump mendapat kecaman yang luas baik dari warga AS sendiri maupun negara-negara lain.

Sementara itu, di tanah air sendiri, pada tahun 2016 lalu tercatat banyak peristiwa aksi teror. Pada tanggal 14 Januari 2016, dimulai dengan aksi teror di dekat pusat perbelanjaan Sarinah (bom Sarinah) di Jalan Thamrin Jakarta yang menewaskan tujuh orang (empat diantaranya pelaku aksi teror). Kemudian pada tanggal 13 November 2016, terjadi pelemparan bom Molotov oleh eks napi terorisme, Juhanda, di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda. Empat orang menjadi korban dalam peristiwa ini, mirisnya kesemuanya adalah anak-anak, satu diantaranya berumur 2,5 tahun mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia.

Tidak hanya itu, baru-baru ini kembali terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja di Surabaya. Pelaku bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga pada tanggal 13 Mei 2018 lalu secara bersamaan. Mirisnya, aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh suami istri dan keempat orang anaknya yang masih kecil. Tidak jauh berselang dari kejadian itu, esok harinya kembali lagi terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang Mako Polrestabes Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018 yang menimbulkan empat orang personil kepolisian yang bertugas meninggal dunia. Hal ini sangat memilukan dan memprihatinkan, karena pelaku bom bunuh diri ini juga satu keluarga dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak dan istrinya.

Jika melihat berbagai peristiwa terorisme tersebut, kemunculan terorisme dan kelompok garis keras tidak akan pernah habis, seakan-akan terus mencuat ke permukaan dan nampaknya menemukan ruang, terutama pascareformasi. Dalam catatan Azra, euphoria demokrasi, pemberlakuan kebebasan pers,

5 "Penguatan Indonesia-Prancis", Kompas, 31 Maret 2017, hlm. 6.

pembebasan tahanan politik, dan pencabutan Undang-Undang Anti-Subversi oleh Presiden BJ. Habibi kala itu, semakin memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok Islam (politik) radikal dalam mengekspresikan wacana berikut gerakan ekstrem dan radikal yang kemudian memungkinkan mereka untuk bebas "beraktivitas" di ruang-ruang publik.[6]

Serangkaian aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda, menyimpang, atau karena stigmasi minoritas, seolah menjadi pemandangan yang lazim terjadi.[7] Masyarakat pun nampaknya kian bersikap permisif terhadap aksi-aksi intoleran yang mudah dijumpai tiap saat.[8] Bahkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi,[9] aksi *bullying* individu maupun kelompok lain tersebut baik karena perbedaan keyakinan, afiliasi politik,[10] serta pilihan interaksi sosial-budaya, kian sangat keras sekaligus memprihatinkan, karena diikuti dengan penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*) dan ujaran kebencian, melalui status postingan di media sosial berupa ucapan, tulisan, upload gambar (meme), serta tampilan video berkonten fitnah dan pencemaran nama baik, yang intinya sebatas untuk "menyerang" pihak lain yang dipersepsikan berbeda itu.

Maraknya berbagai aksi radikalisme dan terorisme atas nama agama, khususnya di Indonesia, baik dengan format lama maupun gaya baru (*new style*), sesungguhnya secara tak langsung mencerminkan praktik (pembelajaran) pendidikan Islam yang selama ini dilaksanakan, dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pembelajaran pendidikan Islam cenderung membentuk karakter keberagamaan yang semakin bercorak ekslusivistik dari pada inklusivistik, sehingga doktrin bahwa agamanya saja yang paling benar (*truth clime*) dan mempunyai hak hidup,[11] sementara agama yang lain salah, tersesat, dan terancam hak hidupnya baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan Islam dapat dijadikan wahana untuk

6 Azyumardi Azra, "Revisitasi Islam Politik dan Islam Kuntural di Indonesia" dalam *Indo-Islamica*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 235.

7 Andik Wahyun Muqoyyidin, "Signifikansi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural dalam Mengakomodir Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi III, 2013, hlm. 52.

8 Andik Wahyun Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif", dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, hlm. 319.

9 Muhammad Wildan, "Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia" dalam *Jurnal Ma'arif*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 195.

10 Ian Wilson, "Teman dijadikan Musuh" dalam Dede Mulanto dan Coen Husain Pontoh (Ed), Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia, (Jatinagor: Pustaka IndoPROGRESS & Islam Bergerak, 2017), hlm. 41.

11 Nur Hidayat Wakhid Udin, "Truth Clime dan Implikasinya dalam Peniptaan Kohesi Damai Antar Umat Beragama" dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No. 2, Maret 2016, hlm. 377.

mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif-pluralis.[12]

Seluruh kejadian di atas menjadi pertanda bahwa ancaman radikalisme dan terorisme kian menghawatirkan. Sehingga diperlukan manajemen strategi yang tepat dengan mengembalikan fungsi dan peran pendidikan Islam sebagai bentuk deradikalisasi dalam mengatasi berbagai aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia terutama di Kalimantan Timur dan Utara yang sudah masuk kawasan zona merah (*red zone*) versi BNPT. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menjadi lokasi dalam penelitian ini termasuk kawasan yang rawan disusupi oleh ajaran-ajaran kelompok radikalis dan teroris, apalagi penduduk yang berdomisili di Kalimantan Timur dan Utara bersifat plural dan multikultur. Jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan daerah Kalimantan Timur dan Utara dengan mudah dipengaruhi dan diprovokasi oleh kelompok-kelompok militan dengan memanfaatkan keterbatasan SDM khususnya di bidang keagamaan.[13]

Oleh karena itu, jika melihat berbagai kasus radikalisme dan terorisme yang dominan bersumbu atas nama agama di atas, maka muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana fungsi dan peran pendidikan Islam dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia? Dan apakah pendidikan Islam hingga saat ini belum berhasil membina karakter anak bangsa untuk dapat menjadi rahmat bagi sekalian alam (termasuk manusia) dalam menyemai kedamaian, toleransi antar sesama, serta menghargai perbedaan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu adanya upaya mengembalikan fungsi dan peran pendidikan Islam terutama dalam menangkal berbagai bentuk radikalisme dan terorisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam khususnya di Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalisir radikalisme Islam, sehingga perlu pengkajian mendalam bagi para ahli dan praktisi pendidikan Islam untuk dapat melakukan sebuah ikhtiar dalam menemukan format baru dalam menangkal radikalisme dan terorisme melalui penerapan konsep manajemen strategik dengan cara merumuskan strategi yang tepat yang akan digunakan dalam menangkal radikalisme dan terorisme, melaksanakan strategi itu dengan baik, benar, dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang matang, efektif, dan efesien, serta melakukan evaluasi strategi sebagai barometer keberhasilan program deradikalisasi melalui pendidikan Islam.

12 Nursisto, *Membumikan Pembelajaran Agama Islam*, (Yogyakarta: Adicita, 200), hlm. 138.

13 Saipul Hamdi, et.al, The Recovery of an Non-Violent Identity for an Islamist Pesantren in an Age of Teror, *Australian Journal of International Affair*, Published Online, 19 Agustus 2015.

B. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Deradikalisasi di Indonesia yang penulis temukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andik Wahyun Moqoyyidin (2013) dengan judul Deradikalisasi Pendidikan Islam dan Tantangannya di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah melakukan format deradikalisasi berbasis pendidikan Islam inklusif-multikultural dengan mengeksplor: materi Alquran, materi fiqih, materi akhlak, dan materi SKI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akh. Bukhari (2018) dengan judul Manajemen Strategik dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme Berbasis *Civil Community and Cyber Community* di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini adalah menemukan formula pencegahan radikalisme dan terorisme yang meliputi; sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat, pendidikan anti radikalisme dan terorisme, deradikalisasi paham keagamaan Islam berbasis *civil society and cyber community*, penanaman dan penguatan cinta tanah air, jadiah duta damai sosial media.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andik Wahyun Muqoyyidin (2017) dengan judul Membumikan Deradikalisasi Pendidikan Islam Sebagai Respons Antisipatif Radikalisme di Era Global. Hasil penelitian ini adalah: perumusan kurikulum pendidikan Islam bermuatan nilai-nilai toleransi, hadirnya sosok pendidik yang berparadigma inklusif-multikultural dalam proses pembelajaran agama di sekolah, kreativitas pendidik untuk mendesain serta menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kerangka Teoritik

Manjemen strategik pada mulanya digunakan oleh perusahaan bisnis dan industri dalam menjalankan program organisasinya dengan tujuan untuk dapat memenangkan persaingan dan meraih keuntungan yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu dan derasnya arus perkembangan globalisasi dewasa ini, manajemen strategik kini sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga atau organisasi baik yang bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan sosio-agama. Hubungan sosial dan agama merupakan suatu hal yang tak terpisahkan. Bahkan banyak kajian sosial memiliki keterkaitan erat dengan kajian agama sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat sosial di era milineals. Terlebih, permasalahan sosial dewasa ini

semakin memprihatinkan, pasalnya banyak masyarakat yang terperdaya oleh propaganda dan doktrinasi radikal bernuansa agama yang cenderung mengarah pada aksi terorisme yang kini semakin meresahkan masyarakat di seluruh belahan nusantara maupun dunia.

Kesenjangan sosial yang diciptakan oleh kelompok teroris ini jika tidak dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat maka akan berdampak pada semakin besarnya propaganda radikalisme dan terorisme di Indonesia pada umumnya dan Kalimanntan Timur khususnya. Untuk itu, konsep manajemen strategik dalam menangani permasalahan sosial masyarakat terutama mengenai berbagai bentuk aksi radikalisme dan terorisme baik melalui dunia nyata maupun dunia maya harus segera dirumuskan sebagai sebuah ikhtiar dalam menemukan strategi yang tepat sehingga gerakan radikalisme dan terorisme dapat diberantas hingga tuntas. Sebelum dijelaskan tentang konsep manajemen strategik, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan rangkaian perkataan yang terdiri dua pengertian yang berbeda yaitu manajemen dan strategik, yang ketika dipadukan akan menghasilkan terminologi baru. Manajemen secara etimologis berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola.[14] Sedangkan menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* bahwa kata manajemen secara etimologis juga berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata kerja (*verb*) *to manage* yang identik dengan kata *to control* dan *to handle*.[15] Untuk itu, dari asal kata ini manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian suatu objek tertentu.[16]

Sedangkan pengertian strategik berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal.[17] Kata strategik sering digunakan dalam istilah militer, bagaimana seorang jenderal (pemimpin perang) mampu merumuskan dan menjalankan suatu strategi, taktik, atau kiat untuk dapat menghancurkan musuh dan meraih kemenangan. Kata strategi juga berasal dari bahasa Latin yaitu *strategos* yang berarti pemimpin militer. Kata *strategos* ini merujuk pada kegiatan seorang jenderal militer yang mengkombinasikan *stratos* (militer) dengan *ago* (pemimpin). Strategi di sini berarti sebagai kegiatan memimpin militer dalam melaksanakan tugas-tugasnya.[18] Adapun strategik menurut Hornby yaitu *"The art of planning operation in war, skill in managing*

14 Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 14.

15 Hornby, *Oxford Advance Leaner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1987), hlm. 517.

16 Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 16.

17 Rabin et.al, *Handbook of Strategic Management*, (New York: Marcell Dekker, 2000), hlm. 57.

18 Nana Sudjana, *Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Nusantara Press, 2004), hlm. 93.

any affair tactic".[19] Menurut Hart sebagaimana yang dikutip Nikols, *"Strategy is the art of the employment of battles as a mean to gain the object of war"*.[20] Strategi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah keterampilan atau taktik dalam mengelola kegiatan. Mulyasana mengungkapkan bahwa manajemen strategik bertujuan untuk mempertahankan sekaligus memenangkan persaingan.[21] Jika dikontekskan dalam hal perang melawan radikalisme dan terorisme, memenangkan persaingan dalam melawan virus radikalisme dan terorisme merupakan suatu keharusan, pasalnya radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama (*common enemy*), kejahatan kemanusiaan (*against humanity*), dan kejahatan lintas negara (*borderless*) yang harus segera diberantas hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan terminologi di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa manajemen strategik merupakan integrasi ilmu dan seni dalam mengelola dan mengatur berbagai bentuk kegiatan baik yang tampak (*tangible*) seperti manusia, mesin, dan bangunan, maupun tidak tampak (*intangible*) seperti hati, gagasan, ide, dan pemikiran dengan melakukan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dalam merespon berbagai tuntutan dan perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Definisi ini kemudian menjadi dasar dari pengertian konsep manajemen strategi yang diadaptasi dalam tulisan ini. Pemakaian konsep manajemen strategi pada akhirnya berkembang, tidak hanya digunakan dalam dunia militer dalam melakukan operasi perang, tetapi konsep manajemen strategik juga digunakan oleh organisasi profit maupun non profit seperti perusahaan bisnis dan lembaga atau organisasi pemerintahan seperti lembaga pendidikan, ekonomi, politik, budaya, bahkan juga digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat sosial keagamaan yang rentan terhadap terjadinya pertikaian dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dewasa ini sering dibalut dengan nuansa keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, sehingga Islam menjadi agama tertuduh yang telah menelurkan kelompok radikalisme dan terorisme yang setiap detik menetas untuk melakukan teror di atas bumi ini.

Oleh karena itu, untuk menghapuskan citra buruk yang telah disemaikan oleh para kelompok teroris ini, maka konsep manajemen strategik dalam menagkal radikalisme dan terorisme berbasis pendidikan Islam merupakan

19 A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: O.U.P, 1993), hlm.854.

20 F. Nikols, *Communities of Practice: A Start Up Kit*, (The Distance Consulting Company, 2000), hlm.40.

21 Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 153.

solusi dan strategi jitu dalam memutuskan mata rantai radikalisme dan terorisme di muka bumi ini. Semakin pesat perkembangan zaman serta semakin canggih revolusi teknologi dewasa ini, propaganda yang diluncurkan oleh kelompok teroris ini juga semakin bervariasi, tidak hanya melalui dunia nyata tetapi sudah bertransformasi melalui dunia maya yang jangkauannya semakin luas dan dapat menggoyahkan kestabilan dan keamanan negara bahkan dunia. Untuk itu, pelibatan semua pihak dari berbagai elemen sangat dibutuhkan baik dari pemerintah, tokoh agama, budaya, pemuda, BNPT, FKPT, TNI/Polri, ormas, maupun masyarakat. Namun, yang menjadi poin penting dalam menangkal lahirnya radikalisme dan terorisme yang paling tepat dan efektif adalah melalui pendidikan Islam, karena mayoritas masyarakat terdoktrin oleh radikalisme dan terorisme disebabkan oleh nuansa agama, maka solusi tepat untuk menangkal radikalisme dan terorisme adalah dengan merumuskan kurikulum anti radikalisme dan terorisme yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam, memberikan pemahaman yang bermuatan wawasan keagamaan dan kebangsaan, serta membumikan Islam rahmatan lil 'alamin di lembaga pendidikan Islam.

Istilah radikalisme berdasarkan KBBI adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau sikap ekstrim.[22] Sedangkan Menurut Hornby dalam *Oxford Advance Leaner's Dictionary of Current English* radikalisme bila dilihat dari sudut pandang kata bendanya adalah seseorang yang berpikiran radaikal baik pada konsep politik dan agama.[23] Karl Popper menyatakan bahwa radikalisme adalah suatu upaya penolakan kepada kemapanan karena dianggap sebagai penyebab kesengsaraan rakyat.[24] Sementara dalam Kamus Politik, definisi radikalisme adalah pemikiran politik yang berdasarkan doktrin untuk menentang status *quo*.[25]

Radikalisme pada ranah politik dapat berupa suatu cara inkonsistusional dan memobilisasi massa yang dapat menyebabkan konflik sosial, sedangkan pada ranah agama tampak pada berupa tindakan anarkis oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama atau pemahaman tertentu, dimana kelompok ini mengganggap sesat agama atau pemahaman yang berlainan dengan mereka.[26] Adapun tindakan yang termasuk dalam radikalisme agama

22 Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 561.

23 AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Walton: Oxford University Press, 1989), hlm. 1032.

24 Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.204.

25 Roger Scruton, *Kamus Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 791.

26 Efraim Inbar dan Bruce Maddy-Weitzman, *Religious Radicalism in the Greater Middle East*, (Oxon:

adalah pemaksaan hekendak atau pendapat, keinginan dan cita-cita keagamaan dengan cara kekerasan kepada keoompok atau individu lain.

Horace M. Callen dalam Bahtiar mengemukakan tiga ciri khas radikalisme. *Pertama,* radikalisme dalam bentuk penolakan maupun perlawanan terhadap suatu keadaan yang sedang berlangsung. merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. *Kedua*, radikalisme yang bukan hanya upaya penolakan atau perlawanan namun juga berusaha menggnati tatatan nilai yang sudah ada. *Ketiga*, keyakinan kuat kaum radikal terhadapa ideology mereka.[27]

Menurt Ahmad Syafii munif (2012), indikator identitas radikalisme, yaitu: (1) menganggap pemerintah Indonesia sebagai *thogut*; (2) menolak lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera merah putih; (3) memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat dari pada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan; (4) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; (5) membayar tebusan dosa; (6) berpakaian khas seperti bercelana cingkarang dan berjenggot bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan; (7) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka berhijrah; (8) enggan mendengar ceramah orang yang di luar kelompoknya.[28]

Pada dasarnya perlu diketahui bahwa alur paham radikalisme tidak serta merta diperoleh oleh sesorang melainkan melalui proses pengenalan, lalu penanaman nilai secara mendalam yang diikuti dengan penghayatan, dan penguatan nilai. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi.[29]

Radikalisme atas nama agama dapat berupa sikap intoleransi sehingga sudah untuk mendengar dan menghargai pendapat orang lain dan cenderung untuk mencapai tujuan menggunakan cara-cara kekerasan.[30]

Umumnya, radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang tertutup (baca: fanatik) dan tekstual (baca: kaku) hingga merasa hanya kelompoknya yang paling benar. Sedangkan pemahaman kelompok lain dianggap sudah kafir dan berhak diperangi dengan kekerasan. Padahal agama manapun di dunia ini tidak menganjurkan kekerasan, termasuk agama Islam yang merupakan agama pedamaian (*peace religion*)—sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi sekalian alam semesta) yang mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati, harmoni dan menghormati harta orang lain (nyawa

Routledge, 2013), hlm. 78.

27 Horace M. Kallen, *Radicalisme*. Lihat Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 1998).

28 Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama), *Prosiding Seminar Nasional*, Palu, Mei 2012, hlm. 3.

29 Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *At-Tahrir*: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2014.

30 Obsatar Sinaga dan Prayitno Ramelan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia…*,hlm. 8.

manusia). Islam tidak membenarkan praktek penggunaan kekerasan atas nama agama, bahkan dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri.

Untuk memutuskan mata rantai radikalisme yang kini telah semakin berbahaya peredarannya di Indonesia, terutama radikalisme dan terorisme yang bernuansa agama akibat salah kaprah dalam memahami nash-nash Alquran khususnya mengenai konteks jihad. Maka alternatif solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan deradikalisasi berbasis pendidikan Islam. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang deradikalisasi berbasis pendidikan Islam, maka alangkah lebih baiknya dijelaskan lebih dulu pengertian deradikalisasi. Daeradikalisasi merupakan formula terbaru untuk mengatasi berbagai ancaman terorisme, dimana deradikalisasi adalaha upaya-upaya yang dilakukan untuk melepaskan ideologi-ideologi atau pemahaman-pemahama dari dalam diri pelaku kekerasan, atau menghentikan proses penyebaran ideology secara lebih luas, upaya ini disebut dengan deideologisasi.[31]

Deradikalisasi menurut AS. Hikam, memiliki dua makna yaitu; pemutusan (*disengangement*) dan deideologisasi (*deideoligization*).[32] Disengagement diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya.[33] Sedangkan deideologisasi diarahkan untuk menghapus pemahaman ideologis atas doktrin politik Islam dan menjadikan Islam sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian.[34]

Deideologi memiliki dampak yang berbeda dengan *disengagement*. *Disengagement* hanya memutuskan aspek sosiologis individu dengan jejaring kelompok lamanya. Sedangkan deideologisasi merupakan usaha untuk mereduksi, merevisi, atau mengganti ideologi seseorang atas keyakinannya. Maka dapat dikatakan bahwa deideologi berbeda dengan *disengagement*, deideologi merupakan usaha untuk mengubah spektrum politik seseorang.

Berbicara soal spektrum politik tentu tidak jauh dari berbagai kepentingan seseorang atau kelompok orang, dalam hal ini yaitu kelompok Islam garis keras yang menginginkan berdirinya negara agama *(Islamic state*). Memang banyak sumbu yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang menjadi radikalis atau teroris, tapi penyebab terbesar orang terjerumus oleh radikalisme dan

31 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 217.

32 Muhammad, AS. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT. Kompas, Media Nusantara, 2016), hlm. viii.

33 Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme,* (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 162.

34 Muhammad, AS. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*…, hlm.5.

terorisme dikarenakan faktor ideologi politik agama. Adapun pendidikan Islam sebagai basis deradikalisasi dalam penelitian ini yaitu dengan merevitalisasi peran dan fungsi pendidikan Islam sebagai daya tangkal dalam meredam berbagai bentuk radikalisme dan terorisme di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan tempat yang tidak hanya terjadinya pewarisan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga menjadi wahana pewarisan nilai (*transfer of value*), dan pewarisan budaya (*transfer of culture*). *Pertama*, pewarisan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendidikan Islam sebagai *transfer of knowledge* memiliki peran penting dalam memberikan bekal pemahaman kepada peserta didik untuk dapat menjadi manusia yang memanusiakan manusia, mengetahui mana yang benar mana yang tidak benar, serta mengajarkan kepada mereka tentang akhlak kepada Tuhan (Allah SWT), akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Jika berbicara akhlak tentunya merupakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dan menolak segala bentuk kejahatan, salah satunya kejahatan yang mengatasnamakan agama (*jihad fi sabilillah*) seperti yang digadang-gadangkan oleh para radikalis teroris dengan cara melakukan teror bom bunuh diri. Dengan adanya pewarisan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengetahuan berwawasan keislaman dan kebangsaan di sekolah secara komprehensif setidaknya bisa memberikan pemahaman yang luas kepada peserta didik, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu para kelompok radikalis teroris.

Kedua, pewarisan nilai (*transfer of value*). Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi ada penanaman nilai-nilai atau karakter didalamnya. Berbicara mengenai karakter, merupakan komponen terpenting dewasa ini, pasalnya maraknya radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh orang yang pernah mengenyam pendidikan baik di sekolah umum maupun sekolah Islam seperti madrasah dan pesantren justru lebih banyak menjadi pelaku teror (terdoktrinasi). Hal ini menjadi perhatian bersama khususnya para guru agama, apakah penanaman akhlak sudah maksimal diajarkan di sekolah? Untuk itu, mengembalikan fungsi dan peran pendidikan Islam dalam menciptakan karakter anak bangsa merupakan sebuah keharusan yang harus terus ditanamkan baik melalui pengajaran maupun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penanaman nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama, menghormati dan menghargai, toleransi, peka terhadap penderitaan orang lain, saling tolong-menolong, tenggang rasa, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Ketiga, pewarisan budaya (*transfer of culture*). Ketika pendidikan Islam sudah melakukan penanaman pengetahuan dan penanaman nilai dalam kehidupan, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya. Pendidikan Islam sebagai pewarisan budaya (*transfer of culture*) juga memiliki peran strategis dalam menangkal berbagai bentuk radikalisme dan terorisme. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya, suku dan agama, namun dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Indonesia dengan ideologi Pancasila mampu merangkul seluruh elemen masyarakat yang plural dan multikultural. Meskipun dalam satu dasawarsa terakhir, radikalisme dan terorisme atas nama agama terus menghujani bumi nusantara ini, bangsa ini masih terlindungi oleh pilar-pilar yang kokoh (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati). Ketiga peran dan fungsi pendidikan Islam ini jika dimaksimalkan dengan baik maka radikalisme dan terorisme dapat dicegah sejak dini melalui penguatan pendidikan Islam di sekolah.

D. Metodologi Penelitian

Mengingat buku ini adalah hasil penelitian maka tentu perlu dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Hal yang perlu dikemukanan; menurut klasifikasi bidangnya, jenis penelitian ini disebut penelitian pendidikan yang bersifat *the development of Islamic educational thought*. Artinya, sebuah penelitian yang banyak mengkaji dan menelaah tentang perkembangan wacana pemikiran tentang persoalan-persoalan pendidikan. Namun, karena fokus kajiannya lembaga pendidikan Islam (sekolah atau universitas) yang bisa ditelusuri di tingkat lapangan, maka jenis penelitian ini adalah *field research.*[35] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat diskriptif kualitatif.

Selain pendekatan di atas, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lain yakni phenomenology dan logika reflektif. *Pertama,* pendekatan *phenomenologi,* yaitu pendekatan yang mengemukakan bahwa objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (*sensual*), melainkan mencakup fenomena lain baik persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang suatu yang transenden, disamping yang *aposteoritik.*[36]

Kedua, Pendekatan *logika reflektif,* yaitu cara berpikir melalui proses mondar-mandir secara cepat antara induksi dan deduksi. Logika induksi umumnya memerlukan penyajian data empirik yang cukup untuk membuat

35 Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995, Cet. II. hlm.3

36 Noeng Muhadjir,*Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 17

abstraksi, sedangkan logika deduktif memerlukan penjabaran sistematik spesifik yang luas dan menyeluruh.[37] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pola penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia umumnya dan Kalimantan Timur dan Utara khususnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: primer dan sekunder. Dari keduanya masing-masing terdiri dari dua jenis yaitu lapangan dan tertulis. Adapun data primer adalah data utama yang diperoleh dan berasal dan terkait langsung dengan pembahasan Manajemen Strategik dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme Melalui Deradikalisasi Berbasis Pendidikan Islam di Kalimantan Timur dan Utara. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk keperluan penelitian ini.

Sumber data primer lapangan meliputi; para aktor sekolah seperti, kepala sekolah/pimpinan lembaga, komite, guru/dosen, tenaga kependidikan, dan siswa/mahasiswa. Kemudian data lapangan lainnya seperti kantor, tempat-tempat pelaksanaan program dan lain sebagainya. Untuk jenis data ini, maka metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, *focus group discussion* dan dokumentasi.

Sedangkan data-data primer tertulis bersumber dari karya-karya langsung dalam bentuk tulisan seperti pedoman sekolah atau universitas, laporan, buku, artikel, buletin, laporan program, rekaman proses dan sebagainya yang berkaitan dengan manajemen strategik dalam menangkal radikalisme dan terorisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam.

Demikian halnya dengan sumber data lapangan sekunder yang antara lain meliputi: pendapat para narasumber, para pakar, dan sebagainya. Maka teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan forum dialog atau diskusi. Adapun sumber data tertulis sekunder seperti, buku, majalah, bulletin, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan survei literatur atau telaah pustaka.

Untuk keperluan analisis, penelitian ini menggunakan dua metode analisis. *Pertama*, metode analitis kritis, analitis kritis yaitu metode yang mendeskripsikan, membahas, dan mengkritisi gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya studi perbandingan, hubungan, dan pengembangan model.[38]

37 Noeng Muhadjir,*Metodologi Penelitian Kualitatif..*,hlm.6

38 S. Jujun Suriasumantri,*Tradisi Baru Penelitian Agama Islam,* t.pt: Pusjarlit dengan penerbit Nuansa, t.th, hlm.45

Kedua, analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk uraian yang objektif, sistematis dan kuantitatif dari pengejawantahan isi. Sesuai langkah-langkah metode ini, maka langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut : 1) memilih sampel atau keseluruhan pola penyebaran radikalisme dan terorisme; 2) menetapkan kerangka kategori eksternal yang relevan dengan tujuan pengkajian, yakni kategorisasi-kategorisasi meliputi model pendidikan Islam, metodologi pendidikan Islam, dan operasionalisasi pendidikan Islam meliputi kurikulum (materi, metode dan evaluasi) dan relasi antar pelaku pendidikan dan sebagainya; 3) memilih satuan analisis isi di atas; 4) menyesuaikan isi dengan kerangka kategori. Dalam hal ini, kerangka pendidikan religus humanis dengan kategori-kategori pembahasan yang ada; dan 5) mengungkapkan hasil sebagai distribusi menyeluruh dari semua kategorisasi yang menjadi acuan.

BAB II

MANAJEMEN STRATEGIK DAN RADIKALISME

A. Manajemen Strategik

Berbagai fenomena agama khususnya Islam di mata dunia kini menjadi perbincangan yang tiada habisnya. Islam di *judge* sebagai agama yang menyukai jalur kekerasan untuk mencapai misi sucinya. Hal ini tidak jarang menimbulkan Islamopobia di negara barat. Bahkan masyarakat Muslim dicekal (*blacklist*) untuk masuk ke negara Barat dikarenakan Islam merupakan agama yang banyak melahirkan para radikalis-teroris di dunia. Tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan barat ini tentu tidak berdasar, karena jika Islam disebarkan dengan menggunakan jalur kekerasan tentunya Islam tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini.

Memang tidak bisa dipungkiri, eskalasi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme kian marak terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu dekade pasca tumbangnya rezim Orde Baru, bom silih berganti mengguncang republik pluralis ini, seperti bom Bali I, bom Bali II, bom Kedutaan Besar Australia, bom Hotel JW Mariot I, bom Hotel JW Mariot II, bom Hotel Ritz Carlton, "bom buku" yang ditujukan ke sejumlah tokoh, "bom jumat" di masjid Mapolres Cirebon, dan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo.[39]

39 Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam", Conference Proccedings Annual

Tidak hanya itu, perkembangan gerakan Islam yang terjadi di Timur Tengah sering kali memberikan pengaruh yang kuat bagi gerakan Islam di Tanah Air. Timur Tengah yang dipersepsikan sebagai pusat Islam selalu menjadi rujukan bagi gerakan Islam Indonesia. Maka gagasan, pemikiran, dan gerakan yang berkembang di Timur Tengah memiliki daya tarik yang kuat, sehingga mudah dianut, disosialisasikan dan dipraktikkan di Indonesia. Demikian juga dengan gerakan revivalisme Islam kontemporer di Timur Tengah. Gerakan ini telah ditransmisikan ke Indonesia dan saat ini tengah tumbuh dengan subur di negeri berpenduduk muslim terbesar ini.

Gerakan revivalisme Islam di Indonesia terjadi pada awal abad ke-21, sesungguhnya telah tumbuh sejak awal 1980-an. Ekspresi revivalisme ini berbentuk meningkatnya gairah kesantrian di tengah masyarakat. Terdapat peningkatan perhatian terhadap ajaran-ajaran agama seperti perintah meramaikan masjid dengan berbagai pengajian dan pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan. Hal ini juga diikuti oleh meningkatnya praktik nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemakaian busana muslim dan revivalisasi sufisme. Arus Islamisasi ini juga merambah di kalangan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, bisnis, dan dunia pendidikan.

Sebagai sebuah gerakan, munculnya revivalisme Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya dan berkembangnya gerakan dakwah kampus pada awal 1980-an. Gerakan dakwah yang dimotori kalangan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi umum dengan metode "*usroh*" ini merupakan cikal bakal lahirnya gerakan Islam baru (*new Islamic movement*) yang menonjol, yakni Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Dakwah Salafi.[40] Untuk itu, perlu adanya upaya manajemen strategik dalam menangkal berbagai bentuk radikalisasi atas nama agama yang kini marak di dunia pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Manjemen strategik pada mulanya digunakan oleh perusahaan bisnis dan industri dalam menjalankan program organisasinya dengan tujuan untuk dapat memenangkan persaingan dan meraih keuntungan yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu dan derasnya arus perkembangan globalisasi dewasa ini, manajemen strategik kini sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga atau

International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012: 225.

40 M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme IslamTimur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 75.

organisasi baik yang bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan sosio-agama. Hubungan sosial dan agama merupakan suatu hal yang tak terpisahkan. Bahkan banyak kajian sosial memiliki keterkaitan erat dengan kajian agama sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat sosial di era milenials. Terlebih, permasalahan sosial dewasa ini semakin memprihatinkan, pasalnya banyak masyarakat yang terperdaya oleh propaganda dan doktrinasi radikal bernuansa agama yang cenderung mengarah pada aksi terorisme yang kini semakin meresahkan masyarakat di seluruh belahan nusantara maupun dunia.

Kesenjangan sosial yang diciptakan oleh kelompok teroris ini jika tidak dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat maka akan berdampak pada semakin besarnya propaganda radikalisme dan terorisme di Indonesia pada umumnya dan Kalimanntan Timur khususnya. Untuk itu, konsep manajemen strategik dalam menangani permasalahan sosial masyarakat terutama mengenai berbagai bentuk aksi radikalisme dan terorisme baik melalui dunia nyata maupun dunia maya harus segera dirumuskan sebagai sebuah ikhtiar dalam menemukan strategi yang tepat sehingga gerakan radikalisme dan terorisme dapat diberantas hingga tuntas. Sebelum dijelaskan tentang konsep manajemen strategik, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan rangkaian perkataan yang terdiri dua pengertian yang berbeda yaitu manajemen dan strategik, yang ketika dipadukan akan menghasilkan terminologi baru. Manajemen secara etimologis berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola.[41] Sedangkan menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* bahwa kata manajemen secara etimologis juga berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata kerja (*verb*) *to manage* yang identik dengan kata *to control* dan *to handle*.[42] Untuk itu, dari asal kata ini manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.[43]

Sedangkan pengertian strategik berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal.[44] Kata strategik sering digunakan dalam istilah militer, bagaimana seorang jenderal (pemimpin perang) mampu merumuskan dan menjalankan suatu strategi, taktik, atau kiat untuk dapat menghancurkan musuh dan meraih kemenangan. Kata

41 Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 14.

42 Hornby, *Oxford Advance Leaner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1987), hlm. 517.

43 Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 16.

44 Rabin et.al, *Handbook of Strategic Management*, (New York: Marcell Dekker, 2000), hlm. 57.

strategi juga berasal dari bahasa Latin yaitu *strategos* yang berarti pemimpin militer. Kata *strategos* ini merujuk pada kegiatan seorang jenderal militer yang mengkombinasikan *stratos* (militer) dengan *ago* (pemimpin). Strategi di sini berarti sebagai kegiatan memimpin militer dalam melaksanakan tugas-tugasnya.[45] Adapun strategik menurut Hornby yaitu *"The art of planning operation in war, skill in managing any affair tactic"*.[46] Menurut Hart sebagaimana yang dikutip Nikols, *"Strategy is the art of the employment of battles as a mean to gain the object of war"*.[47] Strategi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah keterampilan atau taktik dalam mengelola kegiatan. Mulyasana mengungkapkan bahwa manajemen strategik adalah seperangkat keputusan manajerial dan tindakan strategis yang berorientasi pada tuntutan perubahan dan tantangan masa depan yang dirumuskan dalam formulasi, implementasi, dan sistem evaluasi strategi dengan memperhatikan perkembangan lingkungan intern dan ekstern, serta bertujuan untuk mempertahankan sekaligus memenangkan persaingan.[48] Jika dikontekskan dalam hal perang melawan radikalisme dan terorisme, memenangkan persaingan dalam melawan virus radikalisme dan terorisme merupakan suatu keharusan, pasalnya radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama (*common enemy*), kejahatan kemanusiaan (*against humanity*), dan kejahatan lintas negara (*borderless*) yang harus segera diberantas hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan terminologi di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa manajemen strategik merupakan integrasi ilmu dan seni dalam mengelola dan mengatur berbagai bentuk kegiatan baik yang tampak (*tangible*) seperti manusia, mesin, dan bangunan, maupun tidak tampak (*intangible*) seperti hati, gagasan, ide, dan pemikiran dengan melakukan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dalam merespon berbagai tuntutan dan perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Definisi ini kemudian menjadi dasar dari pengertian konsep manajemen strategi yang diadaptasi dalam tulisan ini. Pemakaian konsep manajemen strategi pada akhirnya berkembang, tidak hanya digunakan dalam dunia militer dalam melakukan operasi perang, tetapi konsep manajemen strategik juga digunakan oleh organisasi profit maupun non profit seperti perusahaan bisnis dan lembaga atau organisasi pemerintahan seperti lembaga pendidikan,

45 Nana Sudjana, *Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Nusantara Press, 2004), hlm. 93.

46 A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: O.U.P, 1993), hlm.854.

47 F. Nikols, *Communities of Practice: A Start Up Kit*, (The Distance Consulting Company, 2000), hlm.40.

48 Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 153.

ekonomi, politik, budaya, bahkan juga digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat sosial keagamaan yang rentan terhadap terjadinya pertikaian dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dewasa ini sering dibalut dengan nuansa keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, sehingga Islam menjadi agama tertuduh yang telah menelurkan kelompok radikalisme dan terorisme yang setiap detik menetas untuk melakukan teror di atas bumi ini.

Oleh karena itu, untuk menghapuskan citra buruk yang telah disemaikan oleh para kelompok teroris dan gerakan romantisme Islamis, maka konsep manajemen strategik dalam menagkal radikalisme berbasis pendidikan Islam merupakan solusi dan strategi jitu dalam memutuskan mata rantai radikalisme dan terorisme di muka bumi ini. Semakin pesat perkembangan zaman serta semakin canggih revolusi teknologi dewasa ini, propaganda yang diluncurkan oleh kelompok teroris ini juga semakin bervariasi, tidak hanya melalui dunia nyata tetapi sudah bertransformasi melalui dunia maya yang jangkauannya semakin luas dan dapat menggoyahkan kestabilan dan keamanan negara bahkan dunia. Untuk itu, pelibatan semua pihak dari berbagai elemen sangat dibutuhkan baik dari pemerintah, tokoh agama, budaya, pemuda, BNPT, FKPT, TNI/Polri, ormas, maupun masyarakat. Namun, yang menjadi poin penting dalam menangkal lahirnya radikalisme dan terorisme yang paling tepat dan efektif adalah melalui pendidikan Islam, karena mayoritas masyarakat terdoktrin oleh radikalisme dan terorisme disebabkan oleh nuansa agama, maka solusi tepat untuk menangkal radikalisme dan terorisme adalah dengan merumuskan kurikulum anti radikalisme dan terorisme yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam, memberikan pemahaman yang bermuatan wawasan keagamaan dan kebangsaan, serta membumikan Islam *rahmatan lil 'alamin* di lembaga pendidikan Islam.

B. Menelisik Akar Radikalisme Islam Di Indonesia

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu "*radix*" yang memiliki arti akar, pangkal, bagian bawah, menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrim dalam aliran politik.[49] Menurut Hornby dalam *Oxford Advance Leaner's Dictionary of Current English* mengatakan, istilah radikalisme berasal dari kata radical yang

49 Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 561.

berarti akar atau dasar. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme berarti *belief in radical ideas and principles.*[50] Karl Popper mendefinisikan radikalisme sebagai manifestasi atas penolakan terhadap proses modernisasi. Polanya mengarah pada upaya penggulingan atau paling tidak menentang kemapanan kekuasaan yang dianggap sebagai penyebab penderitaan rakyat.[51] Sementara dalam Kamus Politik, definisi radikalisme adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam menantang status *quo*.[52]

Pada ranah politik, fenomena radikalisme tercermin dalam aksi memaksakan pendapat dengan cara-cara inkonsistusional dan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu yang pada akhirnya melahirkan konflik sosial. Sedangkan pada ranah agama, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif yang anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok internal agama sendiri maupun eksternal pemeluk agama lain yang berbeda penafsiran dan pemahamannya.[53] Karena merasa kelompoknya yang paling benar dan berupaya memaksakan pendapat mereka kepada kelompok lain yang dianggap "sesat", maka konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari. Yang termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan dan cita-cita keagamaan kepada orang atau kelompok lain dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama baik Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan Islam.

Horace M. Callen dalam Bahtiar mengemukakan tiga ciri khas radikalisme. *Pertama,* radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas situasi dan kondisi yang terjadi. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan bentuk tatanan nilai lain. Kelompok radikalis berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini yang dipersiapkan untuk menggantikan

50 AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Walton: Oxford University Press, 1989), hlm. 1032.

51 Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.204.

52 Roger Scruton, *Kamus Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 791.

53 Efraim Inbar dan Bruce Maddy-Weitzman, *Religious Radicalism in the Greater Middle East*, (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 78.

tatanan sebelumnya. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal atau kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.[54]

Jika dilihat dari segi identitas, radikalisme memiliki beberapa indikator, yaitu: (1) menganggap pemerintah Indonesia sebagai *thogut*; (2) menolak lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera merah putih; (3) memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat dari pada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan; (4) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; (5) membayar tebusan dosa; (6) berpakaian khas seperti bercelana cingkarang dan berjenggot bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan; (7) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka berhijrah; (8) enggan mendengar ceramah orang yang di luar kelompoknya.[55] Radikalisme sebagai aliran atau paham, muncul melalui proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik maka radikal menjadi paham atau *isme* sehingga menjadi radikalisme.[56]

Rubaidi mengemukakan terdapat lima ciri gerakan radikalisme Islam. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ke tata negaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya—di Timur Tengah—secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur'an dan hadis hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terpokus pada teks Al-Qur'an dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. *Keempat*, menolak ideologi non Timur Tengah termasuk ideologi Barat. *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang sering terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.[57]

Sebetulnya ada beberapa cara pandang sebagai alat untuk melacak akar radikalisme Islam di Indonesia. Cara pandang paling khas ditunjukkan oleh Samuel Huntington dengan Tesis *Clas of Civilization* yang melihat terorisme

54 Horace M. Kallen, *Radicalisme*. Lihat Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 1998).

55 Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama), *Prosiding Seminar Nasional*, Palu, Mei 2012, hlm. 3.

56 Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *At-Tahrir*: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2014.

57 A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63.

sebagai implikasi dari benturan dua peradaban utama di dunia Islam *vis-à-vis* Barat. Logika Huntington bertitik tolak dari gaya pandang realisme yang memandang politik dunia sebagai *struggle for power*—perebutan kekuasaan. Bedanya dari pemikiran realis klasik seperti Morghentau yang menempatkan negara dalam posisi sentral, atau Waltz yang lebih menempatkan kekuasaan (*power*) dalam perspektif yang material. Huntington berangkat dari pengembangan dunia atas apa yang ia sebut sebagai "peradaban".[58]

Huntington menganggap dunia sebagai sebuah perpaduan antar peradaban yang bersifat multipolar, oleh karena itu, membagi dunia menjadi delapan peradaban besar. Prinsip realisme yang memosisikan interest dalam konteks power memberikan basis logika kedua: persaingan antar peradaban menghasilkan konflik dan pertentangan. Jika logika tersebut digunakan sebagai pisau untuk menafsirkan radikalisme di Indonesia., kita akan sampai pada sebuah titik kesimpulan, terorisme adalah ekses dari tidak kompatibelnya peradaban Islam dan Barat. Hal ini dipertegas oleh atribut yang dikenakan oleh pelaku teror, dengan memberi warna Islam sebagai argumen.[59]

Beberapa penulis yang dianggap "moderat" seperti Murjani dan Van Bruinessen, mencoba melacak akar geneologi dari Islam radikal dalam berbagai sudut pandang yang linear dengan teori Huntington di atas. Murjani yang menganalisis keterkaitan Islam dan demokrasi di Indonesia menilai, keberadaan Islam radikal bukan fenomena yang genuine lahir di Indonesia. Mereka kental dengan pengaruh-pengaruh eksternal dari Timur Tengah. Keberadaan gagasan "Islamisme" yang mereka bawa pun tidak sepenuhnya mencerminkan ke-Indonesia-an.[60]

Berdasarkan pendapat ahli di atas, ada dua hal yang bisa kita baca sebagai penyebab radikalisme. *Pertama*, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmen sejarah, khususnya Orde Baru. Kelompok yang termarjinalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non-negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marjinalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme

58 Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2) November 2010, hl. 170-172.

59 Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme di Indonesia…,hlm. 172.

60 Saiful Murjani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia, 2007). Lihat juga Van Bruinessen, "Geneologies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia", *Southeast Area Research*, 10 (2), 2002, hlm. 117-154.

membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.

Kedua, fenomena ekonomi-politik. Selain adanya penindasan politik, argumen kedua adalah adanya penindasan ekonomi-politik. Dengan argumen ini, radikalisme muncul karena ekses kapitalisme yang menciptakan mereka tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Dalam bahasa ekonomi-politik, pendekatan ini dikenal dengan "pendekatan kelas". Artinya, respon radikalisme pada dasarnya adalah respon kelas untuk melawan hegemoni kapital dan oligarkis dengan negara. Dengan demikian, radikalisme dibaca sebagai potret kesadaran sejarah yang berpadu dengan kesadaran kelas.[61]

Perspektif berbeda dikemukakan oleh Safril Mubah dalam risetnya tentang terorisme dan globalisasi pada Cakra Studi Global Strategis (CSGS) Surabaya, ditemukan bahwa Indonesia akar aksi teror sering kali diarahkan pada radikalisme agama. Publik seolah menutup mata bahwa radikalisme itu juga disebabkan oleh proses globalisasi yang dialami pelaku teror. Hampir semua kajian di Indonesia mengaitkan terorisme dengan radikalisme. Sangat jarang ditemukan kajian yang menghubungkan terorisme dengan globalisasi.[62]

Berawal dari rentetan peledakan bom sepanjang 2002-2009, Safril menemukan bukti bahwa target serangan-serangan terorisme itu merupakan kepetingan strategis Amerika yang dipandang sebagai ikon globalisasi. Artinya, apabila terorisme dan globalisasi disintesiskan, maka muncul sebuah relasi simbiotik di antara dua konsep besar itu. Di satu sisi globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas terorisme. Di sisi lain, terorisme memanfaatkan instrumen globalisasi seperti internet untuk menyebarkan ancaman ketakutan secara meluas.[63]Jaringan kelompok radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Asharot Tauhid (JAT), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada tahun 2014 lalu, sebuah video diunggah di Youtube berdurasi 12.30 menit, yang isinya bai'at kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kepada Daulah Islam atau Khilafah Islamiyah atau ISIS.

Selain jaringan kelompok teroris yang bercokol di Indonesia pasca reformasi 1998, beberapa kelompok keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai organisasi radikalisme Islam, yaitu: *Pertama*, *Harakah Tarbiyah*. "Tarbiyah" memiliki arti pendidikan secara etimologis, namun pada konteks fenomena

61 Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme di Indonesia…,hlm. 172.

62 A. Safril Mubah, *Teroris Versus Globalisasi : Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah Terhadap Hegemoni Amerika*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012), hlm. viii.

63 A. Safril Mubah, *Teroris Versus Globalisasi…*,hlm.4.

gerakan keagamaan di Indonesia istilah ini ditujukan untuk menyebut gerakan Islam yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir.[64]IM memiliki dua ideologi terkenal yaitu Hasan al-Banna dan Sayid Qutb. Meski organisasi keislaman ini sudah berdiri sejak 1927, tetapi doktrin gerakannya tetap membumi hingga hari ini. Ekspansi gerakannya menyebar hingga ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

Model pembinaan di kalangan aktivis Harakah Tarbiyah dapat dikatakan sangat ketat. Gerakannya dibangun dengan rapi dan sistematis mulai pra sekolah hingga masuk perguruan tinggi. Pola pembinaannya dilakukan dengan cara asistensi. Program asistensi bertujuan "merevolusi" pemahaman keagamaan umat Islam. Karena itu, mereka yang mengikuti program asistensi agama Islam berarti menjadi aktivis Tarbiyah.

Meski secara ideologi Harakah Tarbiyah menolak berbagai pemikiran dan produk yang bersumber dari Barat, namun mereka sangat sadar bahwa untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia, juga beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya, perlu berlindung di bawah demokrasi dan mendirikan partai politik yang diakui pemerintah setempat. Pasca tumbangnya Orde Baru, hal ini dibuktikan para aktivis Tarbiyah dengan membentuk Partai Keadilan, yang saat ini telah berganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[65] Selain anti demokrasi, Harakah Tarbiyah juga juga melawan pokok-pokok pikiran modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme.

Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam buku yang bertajuk Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia disebutkan, HTI merupakan sebuah partai politik yang berideologikan Islam. Organisasi ini berdiri dengan tujuan ingin membebaskan umat manusia dari dominasi, paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syari'ah Islam secara kaffah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.[66] Dengan harapan besar itu, HTI merupakan gerakan politik yang menginginkan supaya Islam menjadi sistem pemerintahan global. Sementara Indonesia, disuarakan untuk menjadi titik awal tegaknya cita-cita *Khilafah Islamiyah*.[67]

64 Oliver Roy, *The Failur of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co, Ltd, 1994), hlm. 75-89.

65 Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 25.

66 Lihat *Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Tanpa Penulis, HTI, 2009),hlm. 67.

67 Wawancara Aktivis HTI Universitas Indonesia, Arman Suya Hadi, pada 25 Maret 2013.

Bagi HTI, kepentingan Indonesia menjadi nukleus bagi bangkitnya kekuatan Islam dunia memiliki alasan yang rasional. Secara organisatoris, saat ini HTI telah memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dimulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sejak pasca Kongres Internasional pertama Hizbut Tahrir Indonesia di Glora Bung Karano pada tahun 2000, HTI telah berekspansi ke 31 Provinsi dan mempunyai lebih dari 200 distrik di tanah air. Terlebih lagi kepengurusan didalamnya meliputi departemen politik, ekonomi, dan kemahasiswaan. Di lingkungan mahasiswa HTI menjelma menjadi gerakan ekstra kampus yaitu Gerakan Pembebasan Mahasiswa (GEMA).

Sistem kepengurusan HTI yang begitu komprehensif tidak dijumpai di negara-negara lain. Apalagi di sejumlah negara Timur Tengah seperti Mesir, Syiria, Tunisia, Libya, dan Lebanon sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan titik awal tegaknya Khilafah Islamiyah. Sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam tersebut tengah mengalami krisis perang saudara yang belum bisa dipastikan kapan akan selesai. Sementara di Indonesia, eksistensi HTI diuntungkan dengan keterbukaan sistem demokrasi yang mengakomodasi semua organisasi. Sehingga gerakan HTI pun tumbuh dan berkembang secara cepat.

Upaya radikal HTI yang ingin mendirikan daulah Islamiyah dipandang sebagian besar umat Islam sebagai cita-cita yang ilutif.[68] Bahkan langkah Hizbut Tahrir/HTI sebagai partai politik juga dinilai sebagai sikap yang "munafik", karena tidak mampu memainkan fungsi-fungsi kepartaian sebagaimana yang dipraktikkan partai-partai politik modern saat ini. Haedar Nashir melakukan kritik tegas kepada HTI dengan mengatakan bahwa gerakan ini bukan merupakan partai politik Islam, melainkan sekedar organisasi kemasyarakatan biasa yang bergerak di bidang pendidikan agama dan sosial. Jika mereka benar partai politik mestinya masuk dalam sistem demokrasi di Indonesia. namun, sepertinya HTI memiliki pengertian sendiri tentang partai politik dan demokrasi.[69]

Strategi perjuangan Islam HTI sebagai partai politik dengan pengertiannya sendiri dikategorikan Kasinyo Harto dengan sebutan fundamentalisme Islam radikal.[70] Pasalnya di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia

68 Abdurrahman Wahid (Ed*), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: LibForAll Foundation, 2009), hlm. 39.

69 Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 403-404.

70 Kasinyo Harto, *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama

(NKRI), HTI menantang demokrasi dan melawan pokok-pokok pikiran negara modern seperti nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Kasinyo menjelaskan keinginan mereka untuk mendirikan negara Islam terlampau kuat. Mereka dapat melakukan apa saja hingga titik darah penghabisan pun akan dilakukan demi merebut cita-cita yang diimpikan.

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik Islam didasarkan pada perintah Allah Swt.[71] Organisasi keagamaan transnasional tersebut mempercayai bahwa kelahiran Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dan satu-satunya jalan untuk mengatur segala aspek kehidupan itu adalah dengan berdirinya sebuah *Daulah Islam*. Umat Islam di seluruh dunia harus bersatu dan berlindung dalam satu pemerintahan *Khilafah*. Dengan begitu kehidupan yang sesuai dengan norma-norma keislaman akan terwujud.

Ketiga, Jamaah Salafi. Kelompok ini memimpikan kehidupan masyarakat Islam sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabat (*shalaf al-shaleh*). Sejatinya, kehadiran Jamaah Salafi di Indonesia telah ada sejak sekitar 1980-an. Sayangnya, ekspansi gerakannya tidak terlalu mencolok, ditambah jumlah kadernya tidak pernah mengalami peningkatan secara signifikan. Fokus perhatian gerakan ini lebih menempatkan diri sebagai kelompok belajar Islam daripada menyuarakan politik Islam.

Mereka sedikitpun tidak ingin terlibat dalam percaturan politik atau menyoal persoalan kebangsaan. Mereka hanya menginginkan kelompok belajar agar umat Islam memahami dengan betul doktrin-doktrin keislaman sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya.

Dalam berbagai kajiannya, Jamaah Salafi menggunakan sejumlah kitab Islam klasik seperti buku karangan Muhammad bin Abdul Wahab diantaranya *Usuulu al-Thalathah, Sharah Kitab al-Tauhid,* dan *Kashfu al-Subhat*, buku karya Ibnu Taimiyah *al-Aqidah al-Washitiyah*, serta buku karya Abdul Halim Uwais *Mushkilaatul al-Shabaab fii Dlau'il Islaam.* Berbagai kitab tersebut mengajarkan tentang Tauhid, Aqidah, dan perilaku kesalihan. Buku *Usuulu al-Thalaathah* misalnya, tulisan Abdul Wahab pendiri gerakan Wahabi di Arab Saudi ini tidak lain adalah mengajarkan tentang ilmu Tauhid yang sumbernya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Penyebutan Usuulu al-Thalaathah sendiri didasarkan pada

RI, 2008), hlm. 167.

71 Didasarkan pada Al-Qur'an QS. Al-Imran (3): 104, yang berbunyi: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."*

pertanyaan-petanyaan siapa Tuhanmu (*man rabbuka*), siapa Nabimu (*man nabiyyuka*) dan apa agamamu (*maa diinuka*).

Secara eksplisit, kemunculan mereka ingin menampilkan varian gerakan Islam yang kaku (*rigid*) dibanding kelompok Muslim lainnya di Indonesia. Performa fisik yang berbeda itu menempatkan Jamaah Salafi sebagai gerakan yang suka menyendiri (*alienation*). Tidak salah jika Noorhaidi Hasan menyebut mereka sebagai gerakan Islam yang bercorak "kesunyian apolitis".[72] Pasalnya selain mereka memperkenalkan model keislaman yang kaku, Jamaah Salafi juga menghindari permasalahan-permasalahan politik praktis. Seperti diketahui, selama ini kelompok Salafi lebih dikenal sebagai gerakan yang hanya fokus memberikan pemahaman keagamaan baik di lingkungan masyarakat secara umum, maupun di lingkup mahasiswa. Mereka beralasan karena perbuatan ini sesuai dengan yang diteladankan para *salafus al-shalih*.

Sementara Kasinyo Harto menyebut kelompok Jamaah Salafi sebagai gerakan Islam fundamentalis-literalis. Pendapat ini kiranya tidak berlebihan karena didasarkan pada corak pemikiran, model pembelajaran, dan cara pandang mereka yang menginginkan kembalinya kehidupan umat Islam seperti pada masa *salafus shalih*. Dalam perspektif aktivis salafi, meski masyarakat kini dihadapkan pada era kontemporer yang sarat dengan kemajuan teknologi dan liberalisasi pemikiran, namun hal itu dapat dibawa kembali pada masa *salafus al-shalih*.[73] Karena itu, diperlukan pemurnian (purifikasi) pemikiran Islam, sebab umat Islam kini semakin menyimpang dari sumber agama yang otentik yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis.

Perspektif keagamaan yang mengarusutamakan pandangan Jamaah Salafi kepada *salafus al-shalih* merupakan "pemaksaan" total. Para aktivisnya menghayalkan sebuah kehidupan yang didominasi dengan terma Islam ala salafus al-shalih, di mana generasi terbaik umat ada seperti para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Gerakan romantisme Islam diwujudkan dengan membuat kelompok-kelompok kecil diskusi di masjid. Mereka menilai bahwa tradisi yang bersemi pada zaman *salafus al-shalih* semuanya dipukul rata sebagai "yang terbaik dan yang paling benar", sementara tradisi yang baru muncul belakangan (zaman modern) dianggap keburukan. Akibatnya, pemahaman para aktivis Salafi cenderung monolitik dalam melihat permasalahan. Mereka menilai

72 Noorhaidi Hasan, "Ideologi, Identitas, dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mengatasi Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia", *Prisma*, Vol. 29, 2010, hlm. 7-8.

73 Nafi' Muthohirin, "Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial"…,hlm. 248.

setiap problem harus dikembalikan pada tata aturan yang diteladankan umat salaf, tidak terkecuali problem yang muncul di era kontemporer sekalipun.

Ketiga organisasi keagamaan ini merupakan organisasi keislaman transnasional yang kini banyak bercokol dan berafiliasi di Indonesia dan telah merubah pandangan umat Islam terutama masyarakat awam. Bahkan arus yang mereka bawa bukan menjadikan Islam agama yang rahmat tetapi laknat yang banyak melahirkan militansi Islam ekstremis dan tekstualis yang sering melakukan pergerakan radikalis bahkan teroris.

Menelisik akar penyebab radikalisme dengan faktor di luar agama sebagai pemicunya sebagaimana diuraikan memang sangat mungkin, tapi berusaha mengelak untuk tidak mengaitkan radikalisme dengan agama—sebagaimana dipahami pemeluknya—bukan hal yang mudah, karena dalam hal realitas fenomena tersebut mudah dijumpai. Yang jelas, radikalisme agama tidak pernah terjadi di ruang hampa atau dalam situasi vakum, selalu ada sebab dan sasaran.[74]

Radikalisme atas nama agama dapat diartikan sebagai pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai oleh beberapa hal yaitu sikap tidak toleran (intoleransi), tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, serta sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.[75] Umumnya, radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang tertutup (baca: fanatik) dan tekstual (baca: kaku) hingga merasa hanya kelompoknya yang paling benar. Sedangkan pemahaman kelompok lain dianggap sudah kafir dan berhak diperangi dengan kekerasan. Padahal agama manapun di dunia ini tidak menganjurkan kekerasan, termasuk agama Islam yang merupakan agama pedamaian (*peace religion*)—sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi sekalian alam semesta) yang mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati, harmoni dan menghormati harta orang lain (nyawa manusia). Islam tidak membenarkan praktek penggunaan kekerasan atas nama agama, bahkan dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, radikalisme atas nama agama kini sudah masuk dan merasuk ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sudah merambah pada kalangan mahasiswa dan mahasiswi di dunia kampus. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran media sosial dan juga ketidakpuasaan mereka terhadap pembelajaran keagamaan yang diajarkan para dosen agamanya sehingga mereka cenderung mencari tahu pembelajaran agama secara instan dari berbagai media sosial dan pusat kajian-kajian keislaman yang mereka tidak

74 Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 30.

75 Obsatar Sinaga dan Prayitno Ramelan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia…*,hlm. 8.

mengetahui sejarah organisasi atau komunitas Islam itu sendiri. Sehingga, dewasa ini jumlah masa mereka semakin banyak mewarnai dunia kampus di Indonesia baik kampus umum maupun Islam.

C. Media Sosial Dan Reduksi Pembelajaran Keagamaan

Media sosial atau sosial media berasal dari bahasa Inggris "*social media*" yang menurut tata bahasa terdiri dari dua unsur kata yaitu "*social*" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi masyarakat. Sedangkan "*media*" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri—dalam artian wadah di mana kalangan milenial melakukan berbagai aktivitas di dunia maya (internet) melalui berbagai bentuk *smart phone* atau android dengan menggunakan berbagai vitur aplikasinya seperti website, facebook, youtube, whatsApp, instagram, dan berbagai aplikasi online lainnya.[76]

Sosial media adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi melalui facebook, twitter, youtube, dan lainnya yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, mendefiniskan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran "*user-generated content*". Media sosial merupakan situs di mana setiap orang dapat membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial terbesar dan banyak digunakan yaitu facebook, twitter, youtube, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet.[77]

Berdasarkan survei tentang Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 143,26 juta (54,68%) dari 262 juta orang Indonesia adalah pengguna internet. Kemudian ada 87,13% pengguna internet mengakses media sosial sebagai tujuan utama menggunakan internet.[78] Dari data ini dapat disimpulkan bahwa informasi yang disebarluaskan

76 Leysa Khadza Fi, *Cara Mudah Mengenal dan Membaca Karakter dan Kepribadian Orang Lewat Internet,* (Yogyakarta: Mantra Book, 2013), hlm. 24.

77 Rahmad, *Meraih Berkah dan Pahala Melalui Internet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 37.

78 Achmad Sulfikar, "Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia", *Jurnalisa* Vol.4, No. 1, Mei 2018, hlm. 78.

oleh siapapun telah menembus ruang-ruang pribadi jutaan orang di Indonesia. Berdasarkan survei ini pula, dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi kelompok radikal yang menggunakan media sosial sebagai sarana propaganda dan penyebaran pesan yang mengandung kekerasan.

Gerakan radikalisme Islam yang menyeruak di jejaring virtual facebook, youtube, twitter, tumbler, dan whatsAap terlah menjadi ruang bagi cara baru untuk melakukan propaganda, perekrutan, pelatihan, perencanaan, ajakan pendirian Khilafah Islam. Strategi kekinian yang terus dipraktikkan 'para pembela Islam" tersebut mempengaruhi cara berfikir masyarakat Muslim. Mereka secara aktif menggunakan media sosial dengan menargetkan anak-anak muda sebagai mayoritas warga di jejaring sosial (netizen).[79]

Adanya media sosial semakin mengintensifkan sekaligus memperluas pengaruh ajaran gerakan radikalisme di kalangan masyarakat. Dunia maya (media sosial) telah menjadi bagian penting dalam membentuk pemikiran, perilaku, perbuatan sekaligus kebutuhan dasar (gaya) hidup manusia masa kini.[80] Ibarat mendapatkan asupan "oksigen" dan "aliran darah" kelompok radikalis-teroris ini terus menggunakan internet atau media sosial untuk kepentingan mereka agar terus berkembang.

Betapa tidak, hasil penelitian Gabriel Weimann menunjukkan bahwa jaringan kelompok radikalis-teroris mempengaruhi perhatian lebih pada pengguna media maya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah dan ragam situs yang dikelola oleh kelompok jihadis yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jika pada 1998 hanya ada 12 situs, pada 2003 website kelompok radikalis-teroris ini sudah mencapai angka 2.650, pada tahun 2014 menunjukkan lebih 9.800 situs yang dikelola kelompok jihadis ini.[81]

Weimann menegaskan bahwa dunia maya memang menawarkan banyak kelebihan yang membuat kelompok radikalis-teroris begitu serius dalam mengelolanya. Di antara kelebihannya yaitu akses yang mudah, tidak adanya kontrol dan regulasi yang mengikat, audiensi yang luas, anonim, kecepatan arus informasi, dapat digunakan sebagai media interaksi, sangat murah untuk membuat dan memeliharanya, bersifat multimedia (cetak, suara, foto dan

79 Nafi' Muthohirin, Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial, *Jurnal Afkaruna*, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 240-259.

80 Leonard Chrysostomos Epafras, Religious e-Xpression among the Youths in the Indonesian Cyberspace, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 1-18.

81 Imam Fauzi Ghifari, Radikalisme di Internet, *Jurnal Religious*, Vol. 1, No. 2, Maret 2017, hlm. 131.

video) dan yang tetap menjadi tujuan utamanya itu, internet telah menjadi sumber *mainstream*.

Selain persoalan kuantitas situs radikal yang terus bertambah, tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah perkembangan yang signifikan atas bentuk dan pola terorisme itu sendiri. Paling tidak ada tiga tahapan perkembangan bentuk dan pola penyebaran paham radikalisme-terorisme di dunia maya (media sosial) yaitu: *Pertama*, tahap awal hanya berupa penyebaran ideologi melalui fasilitas website. *Kedua*, pemanfaatan fitur media interaksi seperti pembuatan *forums* dan *chatroom*. *Ketiga*, penggunaan media sosial seperti facebook, youtube, twitter dan instagram yang semakin populer.

Pergeseran kelompok radikalis-teroris melakukan penyebaran radikalisme melalui media sosial ini memiliki tujuan untuk membangun interaksi, tampil lebih trendi dan populer, lebih menyentuh pada sasaran, dan secara demografis penghuni lingkungan media sosial itu generasi muda.[82] Menyikapi kuatnya pengaruh internet, media sosial yang dijadikan sebagai media belajar sikap intoleransi, radikalisme, aksi bom bunuh diri, seperti hasil studi yang dilakukan bersama Brooking Institution dan Google Web, yang dipublikasikan di New York Times, ada 46 ribu akun twitter untuk propaganda ISIS, maka pihak twitter memblokir 125.000 akun berbau ISIS pada akhir 2014. Akun-akun ISIS tersebar rata-rata memiliki followers lebih dari 1.000.[83]

Pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok radikal Islam untuk menyebarkan benih-benih ekstremis melalui facebook, youtube, blog, twitter, instagram, hingga aplikasi layanan pesan gratis seperti WhatsApp sekarang merupakan alat yang ampuh bagi kelompok radikalis-teroris dan Islam transnasional untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh, dan menjaring keanggotaan warga di jejaring sosial. Pola perubahan strategi gerakan yang lebih canggih ini bukan hanya dilakukan oleh kelompok teroris, seperti ISIS, JI, dan JAT, melainkan juga berbagai organisasi Islam transnasional seperti HTI, Jamaah Salafi (Wahabi), dan Harakah Tarbiyah.[84] Ada banyak akun di jejaring media sosial yang dikelola HTI, Salafi dan Tarbiyah yang konten isinya mengajak mendirikan Khilafah Islamiyah, menerapkan politik Islam, mengesahkan perda syariah, menyingkirkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan nasional, serta menolak produk, ide, dan pemikiran yang bersumber dari Barat seperti HAM, kesetaraan gender, pluralisme, sekulerisme,

82 Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 46-47.

83 Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media…*,hlm.131-132.

84 Khamani Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 18.

dan liberalisme. Jalan propagandanya dilakukan dalam bentuk pembuatan video kegiatan, kicauan belaka, dan pokok-pokok keputusan internal organisasi. Akun-akun tersebut berjalan secara sistematis dan disebarkan dengan sangat luas, hingga ke lingkungan perguruan tinggi.[85]

Terdapat banyak laman dan portal online serta akun media sosial yang diindikasi memuat konten-konten berpaham pemikiran radikal. Laman yang memiliki kecenderungan dikelola dan dimiliki para aktivis *Harakah Tarbiyah* yaitu www.pkspiyungan.org. Mulai awal Januari 2016, portal tersebut berganti domain menjadi www.portalpiyungan.com. Laman ini berdiri pertama kali pada tahun 2008. Mulanya, portal ini hanya berbentuk blog dengan alamat urlpkspiyungan.blogspot.com dan menjadi media komunikasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS di kecematan Piyungan Yogyakarta.

Gaya pemberitaan yang provokatif dan propagandis membuat situs online ini menjadi rujukan para anggota PKS. Bahkan, dikatakan bahwa kepopulerannya mengalahkan situs resmi PKS pusat www.pks.or.id pada waktu itu.[86] Portal piyungan.com memosisikan diri sebagai representasi dari media yang memperjuangkan umat Islam. Tema dan fokus pemberitaannya diamati hampir semuanya dengan perspektif keagamaan. Akan tetapi, pilihan judul dan *angle* penulisan diambil dengan pilihan negasi bernada propaganda. Dalam menyoroti majunya Basuki Tjahaja Utama (alias Ahok), misalnya, laman ini berada di posisi melawan dengan membenturkan Ahok dengan umat Islam. Artikel dan foto pemberitaan tentang Ahok dapat dapat dipastikan bernada memojokkan dan terkesan anti Islam. Hal ini karena Ahok bukanlah dari kalangan Islam, bahkan ia disebut sebagai pemimpin kafir dan lalim. Terlebih, sejumlah kebijakannya dianggap memprioritaskan kepentingan pemodal (bukan Muslim) yang merugikan umat Islam.[87]

Tidak cukup dengan portal online, sebagaimana yang dipraktikkan media-media *mainstream* di Indonesia, portalpiyungan.com memposting dan membagikan berita-beritanya melalui media sosial. Akun facebook resmi yang dimilikinya bernama "portal piyungan", dengan 77.864 pengunjung yang menyukai akun tersebut sejak dibuat awal tahun 2016.[88]Setiap satu artikel bernada provokasi yang diunggah ke facebook dibagikan dan disebarkan ke media sosial lain seperti WhatsApp atau BBM, kisarannya ada yang mencapai di

85 Nafi' Muthohirin, *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*, (Jakarta: IndoStrategi, 2014), hlm. 40.

86 Lihat http://islamedia.id/situs-pkspiyungan-org-ganti-domain/. Dikutip pada Minggu 23 Juni 2019, pukul 08.30.

87 Lihat dalam http:///www.portalpiyungan.com. Dikutip pada Sabtu 22 Juni 2019, pada pukul 08.00.

88 Nafi' Muthohirin, *Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial*…,hlm. 252.

atas 50 kali shares, di atas 100 shares, bahkan lebih dari 1000 shares. Hebatnya lagi, setiap artikel yang diunggah hampir selalu mendapatkan komentar dari pengunjungnya dalam jumlah yang besar dan bernada membela. Sementara akun twitternya dengan nama @portalpiyungan memiliki sebanyak 1.706 pengikut dengan 1.675 kicauan sejak dibuat awal tahun 2016.[89]

Sedangkan yang terjadi pada HTI, dalam menyuarakan aspirasinya, gerakan ini melakukan berbagai cara seperti demonstrasi, mengadakan seminar keislaman, serta aksi publikasi. Untuk strategi publikasi, HTI menerbitkan buku,[90] majalah Al-Wa'ie, bulletin Al-Islam, dan Tabloid Media Umat. Materi-materi rubrikasi berisi cemoohan terhadao demokrasi, NKRI, dan Pancasila. Sementara konsep *Khilafah Islamiyah* ditampilkan sebagai solusi setiap permasalahan.

Selain menggunakan strategi publikasi lewat penerbitan buku, tabloid, majalah, dan bulletin, HTI juga gencar mendakwahkan perjuangannya melalui media sosial. Akun facebook DPP HTI, misalnya dengan alamat "Hizbut Tahrir Indonesia", fanspage ini telah mendapatkan tanda like dari 58.267 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah mayoritas penduduk umat Islam di Indonesia, angka relatif kecil mengingat akun ini sudah dibuat sejak 2010. Sementara akun twitternya, @HizbuttahrirID diikuti oleh 37,2 ribu (37.2 K) pengikut dan telah melakukan 26,5 ribu (26.5 K) kicauan. Selain aktif bersuara di facebook dan twitter, HTI juga bergerak di instagram, google +, dan blog laman resmi HTI yaitu hizbut-tahrir.or.id. [91]

Aktivitas HTI melalui media sosial ini sangat terorganisir dengan baik. Terbukti, akun facebook DPP HTI tersebut membagi postingan-postingan berita, keputusan organisasi, agenda kegiatan, serta pemikirannya setiap hari, baik berbentuk artikel berita, foto-foto, meme-meme bergambar, maupun video pendek. Strategi ini juga diikuti oleh puluhan akun facebook dan twitter dan sayap organisasinya (Muslimah HTI dan Gema Pembebasan) di tingkat daerah dan provinsi. Akun-akun ini juga aktif menanggapi berbagai persoalan kebangsaan, khususnya moral anggota legislatif, mengecam kebobrokan pemerintah, dan memberikan solusi setiap permasalahan dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Kedua akun media sosial HTI tersebut dikendalikan secara berkelanjutan oleh bidang Infokom DPP HTI.

89 Nafi' Muthohirin, *Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial*…,hlm. 253.

90 Sebagian besar buku HTI diterbitkan oleh penerbit HTI sendiri, Pustaka Thariqul Izzah, di Bogor. Lihat Burhanuddin Muhtadi, "The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia", *The Asian Journal of Social Science*, (NUS & Brill) 37 (2009), hlm. 628.

91 Nafi' Muthohirin, *Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial*…,hlm. 253.

HTI juga memanfaatkan fungsi Youtube. Kelompok ini senantiasa menggugah rekaman video berbagai kegiatan penting melalui jejaring media sosial. Acara Muktamar Khilafah atau Kongres Internasional HTI, misalnya, rekaman video keduanya mudah ditemukan di Youtube. Selain itu, pada tahun 2017, sebuah video pendek yang diunggah di Youtube juga menjadi bukti eksistensi HTI dengan tampilan adegan ratusan mahasiswa mengangkat bai'at, janji setia menegakkan khilafah dan menerapkan syariat Islam di Indonesia, memicu perbincangan hangat di media sosial, yang aksi tersebut digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), salah satu kampus terkemuka di Indonesia.[92]Bahkan, di antara beberapa unggahan itu dikunjungi oleh ribuan orang. Berbagai rekaman yang mereka unggah juga diikuti oleh komentar/tanggapan, pujian dan dukungan dari banyak aktivisnya di berbagai negara. Sementara sekali waktu, video itu terkadang juga mendapat kritik yang mempertanyakan eksistensi HTI sebagai partai politik yang mengatasnamakan Islam. Meski begitu dukungan terhadap organisasi bentukan Syaikh Taqyuddin An-Nabhani ini tetap kuat.

Dakwah HTI melalui pemanfaatan media sosial dapat dipandang sebagai satu dari sekian strategi modern yang mereka miliki. Seperti LSM atau ormas Islam pada umumnya, HTI di era pasca Orde Baru telah mampu menciptakan opini publik dan berhasil memobilisasi aktivisnya dalam jumlah yang besar. Mereka dimobilisasi untuk melakukan aksi demonstrasi atau sekedar bersuara di media sosial. Cepatnya pemikiran dan gagasan HTI yang diadopsi para aktivisnya tidak lain dikarenakan militansi dan loyalitas mereka yang terbilang solid. Bahkan, jika ada yang tidak setuju (terutama orang di luar HTI) terhadap ide yang didakwahkan, maka secara cepat mereka akan dibilang kafir atau kata-kata kasar lainnya.

Sementara itu, meski Salafi dan kelompok Islam fundamentalis lainnya, mengklaim anti modernitas dan produk-produk Barat, namun jamaah ini tidak tertinggal dalam pemanfaatan media sosial sebagai tempat dakwah mereka di dunia maya. Terdapat beberapa akun Facebook dan Twitter yang terindikasi berpaham Salafi. Namun akun-akun tersebut dikelola secara individu dan tidak sistematis. Sebagai contoh adalah akun Facebook "Dakwah Salafiyah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah" yang dikelolah oleh seorang aktivis Salafi bernama Damar Yustian. Menurut Damar, dikutip dari salah satu postingannya, akun ini berdiri sejak 31 Juli 2015 untuk menggantikan grup akun ("Tegar di Atas Sunnah")

92 Noorhaidi Hasan, *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 1.

yang sebelumnya diretas oleh pihak tidak bertanggungjawab.[93] Diamati dari konten dan konsistensi pemberitaannya, grup ini tidak dikelola secara baik. Hal ini mengesankan bahwa memang Salafi bukanlah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan seperti halnya HTI atau Tarbiyah di kampus- kampus atau partai politik.

D. Tantangan Deradikalisasi Pendidikan Islam

Menanggulangi radikalisme dan terorisme Islam bukanlah perkara yang mudah. Sebab, radikalisme dan terorisme Islam bukan semata-mata gerakan sosial belaka, namun juga merupakan ideologi. Ideologi tidak mungkin dapat dibasmi hanya dengan pendekatan militer/keamanan saja. Masih banyaknya aksi terorisme di bumi Indonesia merupakan bukti konkrit betapa penggunaan pendekatan militer/keamanan saja tidak cukup efektif untuk membasmi terorisme dan radikalisme Islam hingga akar-akarnya.[94]

Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme Islam lainnya harus pula senantiasa diupayakan. Salah satunyaadalah dengan program deradikalisasi melalui pendidikan Islam bernuansa inklusif-multikultural. Deradikalisasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme.[95] Deradikalisasi dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi faham radikal.[96]

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Daeradikalisasi menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Deradikalisasi berupaya melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri pelaku kekerasan, atau menghentikan proses penyebaran ideologi, upaya ini disebut dengan deideologisasi. Sedangkan deideologisasi berhentinya proses pendalaman (penyebaran) ideologi.[97]

93 Nafi' Muthohirin, *Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial*…,hlm. 254.

94 Indryani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam," Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012: 225-236

95 Nasir Abbas, "Berdayakan Potensi Masyarakat dalam Pemberantasan Terorisme", *Komunika*, 12 (VII) Juli 2011: 5 25

96 Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel", Yudisial, III (2) Agustus 2010: 110

97 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,

Deradikalisasi menurut AS. Hikam, memiliki dua makna; pemutusan (*disengangement*) dan deideologisasi (*deideoligization*).[98] Disengagement diarahkan pada perubahan perilaku sepertikeluarnya seseorang dari kelompoknya atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya.[99]Sedangkan deideologisasi diarahkan untuk menghapus pemahaman ideologis atas doktrin politik Islam dan menjadikan Islam sebagai nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian.[100]

Deideologi memiliki dampak yang berbeda dengan *disengagement*. *Disengagement* hanya memutuskan aspek sosiologis individu dengan jejaring kelompok lamanya. Sedangkan deideologisasi merupakan usaha untuk mereduksi, merevisi, atau mengganti ideologi seseorang atas keyakinannya. Maka dapat dikatakan bahwa deideologi berbeda dengan *disengagement*, deideologi merupakan usaha untuk mengubah spektrum politik seseorang.

Berbicara soal spektrum politik tentu tidak jauh dari berbagai kepentingan seseorang atau kelompok orang, dalam hal ini yaitu kelompok Islam garis keras yang menginginkan berdirinya negara agama *(Islamic state*). Memang banyak sumbu yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang menjadi radikalis atau teroris, tapi penyebab terbesar orang terjerumus oleh radikalisme dan terorisme dikarenakan faktor ideologi politik agama.

Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme (para terpidana tindak pidana terorisme).[101]

Azra mengatakan bahwa anak-anak sekolah menjadi target khusus rekrutmen kelompok teroris dan radikalis. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini mengemukakan bahwa beberapa penelitian membuktikan adanya upaya rekrutmen ke sekolah-sekolah, dengan melakukan "cuci otak" terhadap pelajar, yang selanjutnya diisi dengan ideologi radikal tertentu.[102]Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta

---

1995), hlm. 217.

98 Muhammad, AS. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT. Kompas, Media Nusantara, 2016), hlm. viii.

99 Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme,* (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 162.

100 Muhammad, AS. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*…, hlm. 5.

101 Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 63.

102 Azyumardi Azra, "Rekrutmen Anak Sekolah" UIN Jakarta, Kamis, 28 April 2011, http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak- sekolah.html [14 September 2013].

sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.[103]Di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam penelitian tentang Islam Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan amar makruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung sweeping, dan sisanya, 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung sweeping beralasan bahwa kegiatan sweeping tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung sweeping karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%).[104]

Meskipun faktor kemunculan terorisme dan juga radikalisme Islam sangatlah kompleks, namun merebaknya fenomena tersebut dapat menjadi cermin PAI di negeri ini. Harus diakui bahwa praktik pendidikan agama (Islam) selama ini lebih bercorak eksklusivistik ketimbang inklusivistik. Artinya, pengajaran pendidikan agama (Islam) lebih menonjolkan pada klaim kebenaran agama sendiri dan menganggap agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan (*salvation and truth claim*) serta menganggap agama orang lain keliru dan menganggapnya tidak akan selamat.[105]

Filosofi pendidikan agama yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain, perlu dikritisi untuk selanjutnya dibenahi dan dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim non-muslim, dan *truth claim* yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat pada agama lain, semestinya "dibongkar" agar umat tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan bukan jalan memperoleh keselamatan. Jika ini yang terjadi, tanpa ragu lagi dan pasti akan merusak harmonisasi agama

103 Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo*, 20 (1) Mei 2012: 81.

104 Abdullah Fadjar dkk.,*Laporan Penelitian Islam Kampus* (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007), hlm.35

105 Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.31

dan menghilangkan sikap saling menghargai, sehingga pada gilirannya sangat rentan konflik.[106]

Sejalan dengan tanggungjawab tersebut, Abdullah menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman agama, yaitu (1) mengenalkan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai hubungan antar manusia, (3) mengkontekstualisasikan Islam, (4) mengkritisi penekanan pendidikan agama hanya pada domain kognitif, dan (5) mendedikasikan Islam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas individu, melainkan juga moralitas publik.[107]

Salah satu sasaran tujuan dari tugas utama tersebut adalah pendidikan agama bisa membekali peserta didik kecakapan hidup (*life skill*) berupa kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapidalam sepanjang kehidupannya di tengah realitas masyarakat yang plural. Konsekuensinya, pendidikan agama perlu menekankan pada bagaimana mengajarkan tentang agama (*teaching about religion*) yang melibatkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan perbandingan.Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai aspek universal dan partikular ajaran agamanya. Disamping itu, pendekatan tersebut bermanfaat juga untuk mengatasi kurangnya perhatian selama ini terhadap upaya mempelajari agama-agama lain dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar umat beragama lantaran sikap *overprotective* sehingga kecurigaan tetap mewarnai cara pandang antar penganut agama.[108]

Dengan perspektif ini, maka kini kita mesti melakukan pembebasan terhadap pendidikan agama yang selama ini dilakukan, dengan memberi warna yang lebih menekankan dimensi inklusivitas. Dalam kondisi demikian, yang perlu dilakukan adalah melakukan reorientasi visi pendidikan agama (Islam) yang berbasis eksklusif-monolitis ke arah penguatan visi inklusif-multikulturalis. Hal ini dilakukan karena telah terjadi kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan pluralitas dalam pendidikan agama, yang pada gilirannya telah menumbuhsuburkan gerakan radikalisme agama.

106 Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme", *KARSA*, IX (1) April 2006: 786.

107 M. Amin Abdullah, *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 139-140.

108 Mahmud Arif, "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 12.

Hal inilah yang mesti kita renungkan bersama agar pendidikan agama kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama.[109]

Untuk memutuskan mata rantai radikalisme dan terorisme yang kini telah semakin berbahaya peredarannya di Indonesia, terutama radikalisme dan terorisme yang bernuansa agama akibat salah kaprah dalam memahami nash-nash Alquran khususnya mengenai konteks jihad dan romantisme revivalisme Islam. Maka alternatif solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan deradikalisasi berbasis pendidikan Islam.

Pendidikan Islam sebagai basis deradikalisasi yaitu dengan merevitalisasi peran dan fungsi pendidikan Islam sebagai daya tangkal dalam meredam berbagai bentuk radikalisme dan terorisme di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan tempat yang tidak hanya terjadinya pewarisan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga menjadi wahana pewarisan nilai (*transfer of value*), dan pewarisan budaya (*transfer of culture*). *Pertama*, pewarisan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendidikan Islam sebagai *transfer of knowledge* memiliki peran penting dalam memberikan bekal pemahaman kepada peserta didik untuk dapat menjadi manusia yang memanusiakan manusia, mengetahui mana yang benar mana yang tidak benar, serta mengajarkan kepada mereka tentang akhlak kepada Tuhan (Allah SWT), akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Jika berbicara akhlak tentunya merupakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dan menolak segala bentuk kejahatan, salah satunya kejahatan yang mengatasnamakan agama (*jihad fi sabilillah*) seperti yang digadang-gadangkan oleh para radikalis teroris dengan cara melakukan teror bom bunuh diri. Dengan adanya pewarisan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengetahuan berwawasan keislaman dan kebangsaan di sekolah secara komprehensif setidaknya bisa memberikan pemahaman yang luas kepada peserta didik, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu para kelompok radikalis teroris.

Kedua, pewarisan nilai (*transfer of value*). Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi ada penanaman nilai-nilai atau karakter didalamnya. Berbicara mengenai karakter, merupakan komponen terpenting dewasa ini, pasalnya maraknya radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh orang yang pernah mengenyam pendidikan baik di sekolah umum maupun sekolah Islam seperti madrasah dan pesantren justru lebih banyak menjadi pelaku teror (terdoktrinasi). Hal ini menjadi perhatian bersama

109 Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)", *KARSA*, IX (1) April 2006, hlm. 787

khususnya para guru agama, apakah penanaman akhlak sudah maksimal diajarkan di sekolah? Untuk itu, mengembalikan fungsi dan peran pendidikan Islam dalam menciptakan karakter anak bangsa merupakan sebuah keharusan yang harus terus ditanamkan baik melalui pengajaran maupun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penanaman nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama, menghormati dan menghargai, toleransi, peka terhadap penderitaan orang lain, saling tolong-menolong, tenggang rasa, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Ketiga, pewarisan budaya (*transfer of culture*). Ketika pendidikan Islam sudah melakukan penanaman pengetahuan dan penanaman nilai dalam kehidupan, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya. Pendidikan Islam sebagai pewarisan budaya (*transfer of culture*) juga memiliki peran strategis dalam menangkal berbagai bentuk radikalisme dan terorisme. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya, suku dan agama, namun dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Indonesia dengan ideologi Pancasila mampu merangkul seluruh elemen masyarakat yang plural dan multikultural. Meskipun dalam satu dasawarsa terakhir, radikalisme dan terorisme atas nama agama terus menghujani bumi nusantara ini, bangsa ini masih terlindungi oleh pilar-pilar yang kokoh (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI). Ketiga peran dan fungsi pendidikan Islam ini jika dimaksimalkan dengan baik maka radikalisme dan terorisme dapat dicegah sejak dini melalui penguatan pendidikan Islam di sekolah hingga ke perguruan tinggi.

E. Manajemen Strategik Deradikalisasi Berbasis Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia sekaligus negara yang multi agama—meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas dan dapat dianggap sebagai pusat penduduk Muslim terbesar di dunia, walau pun secara geografis terletak sangat jauh dari pusat dunia Islam. Akan tetapi Indonesia bukanlah negara Islam, namun nilai-nilai Islam terkristal dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Faktanya dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.[110] Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, sekitar 11 ribu pulau dihuni oleh penduduk dengan 359 suku dan 726 bahasa, serta beragam agama sebagaimana mengacu

110 M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 4.

pada PNPS nomor 1 tahun 1969—yang baru saja dipertahankan Mahkamah Konstitusi—Indonesia memiliki lima agama. Di Indonesia, terdapat sekitar 350 kelompok etnis dengan budaya, agama, aliran keyakinan, dan bahasa masing-masing yang mendiami kepulauan ini dengan komposisi utamanya, yaitu Jawa (41,71%), Sunda (15,41%), Melayu (3,45%), Madura (3,7%), Batak (3,02%), Minangkabau (2,72%), Betawi (2,51%), Bugis (2,49%), Banjar (1, 75%), dan masih banyak lagi kelompok-kelompok etnis lain yang jumlahnya lebih kecil.[111] Jika dikontekskan dalam dinamika masyarakat Kalimantan Timur dan Utara ditinjau dari ragam etnis yaitu Bugis (22,7%), Banjar (11,5%), Dayak (15,2%), Jawa (22,9%), Madura (4,8%), Kutai (8,3%), dan beberapa suku lainnya (14,9%). Sedangkan jika ditinjau berdasarkan ragam agama yakni Islam (78,1%), Kristen (11,7%), Katolik (6,7%), Buddha (1,1%), Hindu (1,9%), dan Konghucu (0,5%).[112] Di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, Konghucu menjadi agama keenam. Meski hanya enam, di dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari berbagai macam aliran sosial keagamaan. Begitu juga ratusan aliran kepercayaan hidup yang berkembang di Indonesia.[113]

Letak pentingnya secara sosiologis adalah jika penduduk mayoritas menjalankan aktivitasnya yang mendukung keberadaan negara yang tidak berdasarkan agama tetapi nilai-nilai agama sangat mempengaruhi kebijakan negara, maka gambar dari keseluruhan penduduk negeri akan positif. Tetapi sebaliknya, jika penduduk mayoritas dalam aktivitasnya menentang atau sekurang-kurangnya resistensinya kuat atas negara yang tidak berdasarkan agama maka potret keseluruhan negeri ini adalah negatif.

Maka dari itu, kemajemukan sejatinya merupakan modal sosial yang amat berharga bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika tidak dapat dikelola secara baik, maka kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial. Sepertinya Indonesia merupakan negara yang belum mampu mengelola kemajemukan dengan baik. Terutama pasca tumbangnya rezim Orde Baru, aksi terorisme dan radikalisme Islam merebak di Indonesia. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu dekade, bom silih berganti mengguncang republik pluralis ini. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya bom Bali I, bom Bali II, bom Kedutaan Besar Australia, bom Hotel JW Marriot I, bom Hotel JW Marriot II, bom Hotel Ritz Carlton, "bom buku" yang ditujukan ke sejumlan tokoh, bom

111 Leo Suryadinata, *et.al*, *Indonesian's Population*, (Singapore: Asia Institute, 2003), hlm. 7.

112 Siti Muri'ah, *Pendidikan Berbasis Multikultural: Belajar Integrasi Sosial dari Heterogenitas Masyarakat Kalimantan Timur*, (Yogyakarta: Interpena, 2016), hlm. 116-117.

113 Husni Mubarok, "Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan Institusional", *HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius*, IX (35), Juli –September, 2010, hlm. 33.

"Jum'at" di Masjid Mapolres Cirebon, dan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kapunton, Solo.[114]

Disepanjang tahun 2016, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi terorisme. Aksi terorisme ini dilakukan oleh orang-orang yang telah teradikalisasi dalam keyakinannya, yang kemudian mengedepankan permusuhan dan kebencian serta membenarkan tindak kekerasan dan kekejian terhadap orang lain di luar kelompoknya. Pada tahun 2016 lalu, tercatat banyak aksi teror di Indonesia, dimulai dengan aksi teror di dekat pusat perbelanjaan Sarinah di Jalan Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 yang menewaskan tujuh orang (empat diantarnya pelaku aksi teror) yang mana peristiwa ini dikenal dengan aksi Bom Sarinah. Sementara kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MTI) di Gunung Biru masih menunjukkan eksistensinya. Kelompok yang kini terdiri hanya sekitar 20-30 orang ini dikenal sangat licin dalam ber-*manuver* di hutan. Namun, di bulan Februari 2016, pimpinan MTI Santuso berhasil dilumpuhkan.[115]

Berita memprihatinkan kemudian terjadi di sekitar laut Sulu. Sejak Maret 2016 hingga Januari 2017, terjadi tujuh kali pembajakan kapal di sana dengan korban WNI sebanyak tujuh orang yang masih tersandera oleh Abu Sayyap Group (ASG). Pada tanggal 13 November 2016, juga terjadi pelemparan Bom Molotov di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Juhanda seorang napi teroris. Empat orang korban terbakar di sekujur tubuhnya, dan yang memilukan, kesemuanya adalah anak-anak. Satu diantaranya berumur 2,5 tahun mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia.[116]

Tidak hanya itu, baru-baru ini kembali terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja di Surabaya. Pelaku bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga pada tanggal 13 Mei 2018 lalu secara bersamaan. Mirisnya, aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh suami istri dan keempat orang anaknya yang masih kecil. Tidak jauh berselang dari kejadian itu, esok harinya kembali lagi terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang Mako Polrestabes Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018 yang menimbulkan empat orang personil kepolisian yang bertugas meninggal dunia. Hal ini sangat memilukan dan memprihatinkan,

114 Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam", Conference Procedings *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012.

115 Obsatar Sinaga dan Prayitno Ramelan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 1.

116 Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 23.

karena pelaku bom bunuh diri ini juga satu keluarga dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak dan istrinya.

Fenomena radikalisme dan terorisme di atas, semakin meneguhkan pentingnya memikirkan bagaimana pendekatan ideal yang seyogyanya diterapkan dalam deradikalisasi. Radikalisme atas nama agama yang merupakan "ibu kandung" yang melahirkan terorisme yang tersistematis dan massif ini tentu hanya bisa ditangkal dengan manajemen strategik deradikalisasi yang lebih efektif. Menurut hemat penulis, salah satu terobosan penting terkait upaya peremajaan program deradikalisasi ini dapat dimulai dari reorientasi visi pendidikan Islam Indonesia ke arah penguatan visi pendidikan Islam inklusif-multikultural. Artinya, sedari dini pembelajaran pendidikan Islam di berbagai jenjang dan tingkatannya di mulai dari Paud (PGMI), TK (RA), SD (MI), SMP (MTS), SMA (MA), hingga Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) hendaknya diarahkan untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*soft skill*) dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka jumpai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang sangat majemuk (*plural*), baik dalam hal agama dan keyakinan (*multi-religi*), bahasa (*multi-lingual*), ras etnis (*multi-etnis*), serta tradisi dan budaya (*multikultural*).

Kamaruddin Amin menyebutkan bahwa keberagaman Indonesia pasti berkualitas, apabila pendidikan Islam Indonesia baik dan berkualitas. Sebaliknya, bila keberagaman di Indonesia kurang baik, maka kontribusi menjadi minim, yang kemudian berimbas pada kehidupan keberagamaan menjadi tidak kondusif.[117]

Deradikalisasi berbasis pendidikan Islam dengan visi inklusif-multikultural dapat dijalankan dengan baik, apabila ditopang dengan konsepsi yang kokoh, terintegrasi dan sinergitas antar intitusi, dan perumusan kebijakan deradikalisasi yang "membumi" dalam arti lebih berbasis bukti-bukti rill di lapangan. Adapun komponen-komponen penting pendidikan Islam perlu direkonstruksi agar dapat selaras dengan visi deradikalisasi itu sendiri, utamanya adalah komponen kurikulum, pendidik (guru/dosen), dan strategi pembelajaran.

Pertama, perumusan kurikulum pendidikan Islam bermuatan nilai-nilai tolerasi (*tasamuh*) di tengah-tengah semakin meningkatnya eskalasi konflik kekerasan sosial keagamaan adalah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kurikulum ini nantinya akan menjadi pedoman (*guidance*) bagi para pendidik dalam menyampaikan materi-materi ajaran Islam yang menghargai keragaman

117 Kementerian Agama RI, "Lembaga Pendidikan Islam Tentukan Keberagamaan Indonesia", *Majalah Pendidikan Islam (Pendis),* Edisi Nomor 5, Desember /III/2015, hlm. 22.

dan perbedaan. Materi pelajaran (termasuk kuliah) yang lebih banyak bersifat normatif-doktrinal-deduktif harus dintegrasikan juga dengan materi yang bersifat historis-empiris-induktif. Dalam hal ini dibutuhkan "perimbangan" antara materi yang berdimensi "teks" dan realitas empiris-faktual yang berdimensi "konteks". Berbagai kasus-kasus konkrit dan kekinian dapat diekspose untuk mensosialisasikan pemahaman agama moderat (*Islam washatiyah*), inklusif dan toleran pada setiap jenjang pendidikan,[118] untuk kemudian dimasukkan dalam konten materi kurikulum pendidikan Islam, seperti materi Al-Qur'an, fiqh, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam (SKI) atau termuat dalam materi Pendidikan Islam yang ada di perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Kedua, hadirnya sosok pendidik yang berparadigma inklusif-multikultural perlu sekali ditekankan dalam proses pembelajaran agama di sekolah atau di kampus. Seorang guru ataupun dosen yang mempunyai paradigma keberagamaan inklusif dan moderat akan mampu mengajarkan sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai (*values*) kepada peserta didiknya. Terobosan penting untuk mendiseminasikan pemahaman itu kepada pendidik perlu mendapatkan prioritas, baik melalui serangkaian kegiatan training, workshop, seminar, dan kegiatan-kegitan lainnya yang relevan. Salah satunya yang patut diapresiasi, seperti *short course* yang digagas oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama, yang telah mengirim 42 guru agama ke Australia untuk memperdalam praktik multikulturalisme sekaligus pendidikan anti radikalisme pada akhir tahun 2015 lalu.[119] Dalam kesempatan itu, para pengajar PAI mempelajari metodologi pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah Australia, di mana sebagian besar para siswanya berasal dari latar belakang kultur dan etnis yang berbeda.

Ketiga, kreativitas pendidik untuk mendesain serta menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga hal itu kemudian memotivasi peserta didik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang sangat diperlukan adalah strategi pembelajaran yang lebih variatif, tidak parsial, dan mengedepankan pendekatan kualitatif. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran di ruang kelas, seorang pendidik dapat menjelaskan nilai-nilai keberagamaan sembari memutar beberapa tampilan video film atau yang lain, dengan konten khusus yang bermuatan pesan untuk

118 Azyumardi Azra, "Isu Kontemporer Pendidikan Islam: Multikulturalisme dan Radikalisme Agama", Seminar Nasional Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 18 Maret 2017, hlm. 14.

119 "Short Course Guru PAI ke Australia: Memperbaharui Metodologi Mengasah Prestasi", Majalah *Pendidikan Islam (Pendis),* Edisi Nomor 5/Desember/III/2015, hlm. 84.

menghargai keberagaman. Inovasi-inovasi pembelajaran pendidikan Islam akulturatif, studi etnopedagogik yang sudah mulai dirintis oleh Perguruan Tinggi Nahdhatul Ulama (UNU) dengan memandang kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai sumber inovasi untuk membangun harmoni dalam keberagaman hidup bermasyarakat,[120] adalah salah satu terobosan penting yang patut di-*follow up* semua kalangan.

120 Mukhibat, "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogi di PTNU dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, September 2015, hlm. 224.

BAB III

POTRET DERADIKALISASI DI PTKI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk lokasi penelitian yang berada di wilayah Kalimantan Timur adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda, Univeristas Nahdhatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang. Sedangkan untuk lokasi penelitian yang berada di wilayah Kalimantan Utara yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Anshar Bulungan.

Adapun gambaran umum obyek penelitian pertama yakni IAIN Samarinda diawali dengan sejarah berdirinya IAIN Samarinda. Gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi islam di Kalimantan Timur yang dipelopori oleh beberapa tokoh yang bergabung dalam organisasi Islam dengan mendirikan sekolah persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur pada tanggal 18 Agustus 1963 yang selanjutnya secara resmi penegeriannya dilakukan oleh Dr. Mukti Ali, MA atas nama menteri agama RI pada tanggal 17 September 1964. Sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN Keterampilan) Samarinda.

Upaya tersebut diikuti dengan mendirikan fakultas Islam swasta. Fakultas tersebut secara resmi didirikan dengan Surat Keputusan Panitia Pembukaan Fakultas Tarbiyah IAIN Kalimantan Timur Nomor: 25/PN/1964 dengan pimpinan fakultas ditunjuk Letkol Ngadio, BcHk selaku dekan. Kuliah perdana dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1964. Setelah berjalan selama setahun, upaya menjadikan fakultas tersebut menjadi negeri dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk yayasan badan wakaf Fakultas Tarbiyah pada bulan Nopember 1965 dengan ketua H. Muffs Hasan (Gubernur Kalimantan Timur).

Selanjutnya pada tahun 1968 dibentuk panitia penegerian Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur. Kerja panitia membuahkan hasil, dan akhirnya pada bulan november 1968 Fakultas Tarbiyah secara resmi dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN dibawah binaan IAIN Sunan Ampel di Surabaya dengan surat keputusan menteri agama RI No. 167/1968 dengan pimpinan fakultas dipercayakan kepada Drs. Tengku Rasyid Hamzah sebagai Pj. Dekan didampingi oleh Drs. H.M Yusuf Rasyid sebagai wakil dekan dan M. Ayub Oms, BA selaku sekretaris al-jami'ah.

Dalam perjalanannya, pada tahun 1998 pembinaan Fakultas Tarbiyah Samarinda dialihkan dari IAIN Sunan Ampel di Surabaya kepada IAIN Antasari di Banjarmasin. Dan selanjutnya pada tahun 1997 kebijakan secara nasional telah merubah status Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda sesuai dengan KEPPRES RI No. 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997, Keputusan Menteri Agama RI No. 113 Tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997 dan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI. No. E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997. Dan pada akhirnya secara resmi mengalami transformasi dan beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada tahun 2014.

Adapun visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:[121]

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam "Terdepan dalam pengembangan peradaban Keislaman"

Misi

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya keislaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar.

121 Dokumen Profil IAIN Samarinda tahun 2017.

3. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, skill dan sikap bermasyarakat yang profesional.
4. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis dan kreatif.
5. Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan keagunan moral.
6. Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat di kawasan Kalimantan Timur khususnya, melalui pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Tujuan

1. Organisasi yang berkembang dan melayani
2. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan
3. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan
4. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

Sedangkan uraian lebih lengkap tentang gambaran umum dari obyek penelitian kedua penelitian ini yakni IAIN Samarinda akan kami lampirkan ke dalam lampiran laporan penelitian ini.

Kemudian objek penelitian yang kedua adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda. Sejarah lahirnya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda semula bernama Fakultas Syari'ah yang dibentuk atas gagasan dan prakarsa pengurus Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel Samarinda, tepatnya tanggal 16 Juli 1984. Pendiriannya direstui oleh para Ulama dan Umaro di daerah Samarinda Kalimantan Timur. Pengelolaan Fakultas Syari'ah oleh Yayasan Wakaf hanya sampai dengan tanggal 30 Mei 1986, setelah itu diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2000.

Pada tanggal 3 Mei 2001 bertepatan pada tanggal 9 Shafar 1422 H. Pengelola STIS Samarinda diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Qur'an (YAPIA) Al-Azhar Samarinda Kalimantan Timur, yang pengelolaannya berlangsung hingga saat ini. Sekoah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Samarinda didirikan pada tanggal 6 Agustus 1984 oleh Yayasan Badan

Wakaf IAIN Sunan Ampel Samarindaatas restu Walikota Madya Samarinda, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur dengan nama Fakultas Syari'ah atau Hukum Islam. Pimpinan Fakultas Syariah yang pertama adalah Dekan Drs. H. M. Yusuf Rasyid , Drs. H. Nasri Usup, Drs. H. Nukthah Arfawie Kurdi, dan Drs. H. Alfian Noor, yang masing-masing sebagai Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III sampai dengan 30 Mei 1986, Fakultas Syariah berada di bawah bimbingan naungan Yayasan Badan Wakaf IAIN Sunan Ampel Samarinda yang merupakan cabang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Yayasan Pendidikan Islam Kalimantan Timur didirikan pada tanggal 6 Juni 1975 dengan Akte Notaris Nomor 14 oleh Notaris M. Soetojo Samarinda, tanggal 27 Maret 1985 kepengurusan yayasan diserahterimakan dari pengurus lama kepengurus baru, selanjutnya oleh pengurus baru Akte Yayasan diperbaharui atau dirubah dengan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 15 September 1987 oleh Hardjo Gunawan, SH, Notaris dan pejabat pembuat Akte Tanah wilayah daerah tingkat II Kota Madya Samarinda, Jl. Imam Bonjol Samarinda.

Setelah 30 Mei 1986, Fakultas Syariah ini diserahterimakan pembinaannya kepada Yayasan Pendidika Islam (YPI) Kalimantan Timur, Naskah Serah-Terima No. 07/BW-IAIN/V/1986 dan H. Salah Nafsi, SH (Ketua Umum Yayasan Badan Waqaf IAIN) kepada Drs. H. Hamri Has (Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kaltim) disaksikan oleh K.H. Dja'far Sabran selaku penasehat YPI Kaltim, dan Drs. H. Sabran Djailani Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN, yang diperkuat oleh Notaris Laden Mering, SH, Nomor 2712 tanggal 24 September 1986. Sejak diasuh oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Kalimanta Timur, pimpinan Fakultas Syariah mengalami pergantian yaitu: Dekan K.H. Mujtaba Ismail, MA dan pembantu Dekan I, II, dan III masing-masing adalah Drs. Ibrahim Kadri, Drs. H. Idham Yusuf dan Drs. Achmad Buchari, sedangkan sekretaris Fakultas adalah Drs. H. Alfian Noor.

Pada tanggal 23 Oktober 1987, STIS Samarinda mendapat izin operasional dan Kopertis Wilayah IV Surabaya, dengan nomor: 354/KIF-9/P/87 dan perubahan nama Fakultas Syari'ah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS). Kemudian pada tanggal 27 Februari 1989 mendapat status Terdaftar dengan SKMenangNomor 51 Tahun 1989. Karena perubahan tipe Sekolah Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah IV, maka YPI Kaltim juga mengadakan penyesuaian struktur Pimpinan STIS Samarinda, dengan SK YPI Kaltim Nomor 01 dan 02 Tahun 1989 tanggal 11 Oktober 1989, Ketua K.H. Mujtaba Ismail,

MA, Pembantu Ketua I, II, dan III masing-masing: Drs. H. Ibrahim Kadri, Drs. H. Idham Yusuf, Drs. Achmad Buchori, Ketua Jurusan H. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc, serta Kabag Tata Usaha M. Asri Thaher.

Tanggal 23 Juni 1994, Status Terdaftar ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 195 Tahun 1994 dan terakhirditetapkan pada 26 Maret 1999 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E115/1999.

Pada tahun 1997/1998, telah terjadi kevakuman pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Samarinda dikarenakan Yayasan yang mengelola STIS tidak bersedia lagi untuk melanjutkan pengelolaanya. Dengan adanya yayasan yang bersedia untuk melanjutkan dan mengelola STIS yaitu Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Qur'an (YIPIA) Al-Azhar Samarinda Kalimantan Timur, dengan berbekal izin perpanjangan Dirjen Bimbingan Islam Nomor: E/55/1999 yang masih berlaku, STIS berupaya menyelesaikan studi mahasiswa yang masih sedang menyusun skripsi, dan pada tahun akademik 2000/2001, STIS mengaktifkan kembali perkuliahan dengan menerima mahasiswa baru.

Sejak pengelolaan STIS dialihkan kepada Yayasan yang baru, Sekretaris STIS dialihkan ke alamat Yayasan Jalan K.H. Agus Salim Gang Tanjung II No. 86 A Samarinda Kalimantan Timur. Sedangkan perkuliahan dilaksanakan di gedung kontrakan yang beralamat di Jalan Lai No. 4 Forvo Samarinda Kalimantan Timur. Pada tahun 2003, Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Qur'an (YAPIA) Al-Azhar mulai melakukan penataan organisasi STIS Samarinda yang dimulai dengan melengkapi susunan struktur Pimpinan dan Staf yaitu Ketua H. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc, Pembantu Ketua I, Drs. Yahya, Pembantu Ketua II, Sihono, SE, Ketua Jurusan Dra. Hj. Siti Kalsum Basran, Sekretaris Jurusan, H. Norva Dewi, M.Ag, Ketua P3M, Drs. Rujiansyah, Sekretaris P3M, Norhayah, S.Ag, Kabag Administrasi, Endah Nartanty, S.Ag, Kasubbag. Akademik, Nurhayati, S.Ag, dan Kassubag. Umum, Budi Hartono, S.Sos.

Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Qur'an (YAPIA) Al-Azhar Samarinda Kaltim mulai tahun 2004 membangun Gedung Baru Permanen 2 (dua) lantai yang merupakan milik sendiri yang beralamat di Jalan M. Said RT 12 Kel. Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Gedung tersebut terdiri dari ruang kelas dan ruang kantor. Pembangunannya berlangsung bertahap selama 3 (tiga) tahun. Di tahun 2005 STIS Samarinda melakukan perubahan struktur staf yaitu Ketua Jurusan yaitu Dra. Hj. Siti Kalsum Basran, Sekretaris Jurusan Hj. Norva Dewi, M.Ag, Ketua P3M, Drs. Rujiansyah, Sekretaris P3M, Norhayah, S.Ag, Kabag. Administrasi yaitu Budi

Hartono, S.Sos, Kasubbag. Akademik, Fatimah, S.Ag, S.Si, dan Kasubbag. Umum yaitu Ekawati S. Indah, S.Sos.

Pada tahun 2008, STIS Samarinda mendapatkan izin perpanjangan penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/385/2008. Dan mulai pertengahan tahun 2009, STIS Samarinda kembali melakukan pembangunan ruang kelas baru yang direncanakan 10 ruang kelas yang telah rampung sekitar 60%. Bukan hanya pembangunan ruang kelas baru saja yang dalam proses penyelesaian, namun juga persiapan SDM bagi pimpinan dan staf dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana (S2), dan kini STIS sudah memiliki tiga orang pimpinan yang menyelesaikan program pascasarjana. Pada tahun 2011 STIS Samarinda mendapatkan akreditasi C.

Pada awal tahun 2010 ini, STIS Samarinda telah menjalin kerja sama dengan pihak lain yaitu:kerja sama dengan Pengadilan Agama, Perpustakaan Majid Raya, kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang tentang praktikum administrasi pernikahan dan perwakafan serta bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang praktikum Hisab dan Rukyat.

Susunan pimpinan STIS Samarinda tahun akademik 2010/2011 yaitu Ketua Drs. Rujiansyah, Pembantu Ketua I, Drs. Asfan Efendi, M.Pd, Pembantu Ketua II, Arif Nur Cahyo, Ak, M.Si, Pembantu Ketua III, Budi Hartono, S.Sos, Kabag. Administrasi, Endah Nartanty, S.Ag.

Adapun visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Samarinda yaitu:

Visi:

"Perguruan Tinggi Keislaman yang Cerdas, Berkarakter dan Berkualitas"

Misi

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional bagi lahirnya lulusan yang berpikir kreatif, dan kritis.
2. Membekali mahasiswa yang memiliki karakter Islami, religius, dan berwawasan enterpreneurship sehingga mampu berdaya saing pada masyarakat global.

3. Mengembangkan sistem tata kelola kelembaagaan berbasis jaminan mutu (*quality assurances*) yang berorientasi pada layanan akademik yang unggul.
4. Mengembangkan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Menyelenggarakan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
6. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.

Sedangkan uraian lebih lengkap tentang gambaran umum dari obyek penelitian kedua penelitian ini yakni STIS Samarindaakan kami lampirkan ke dalam lampiran laporan penelitian ini.

Kemudian objek penelitian yang ketiga adalah Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur. Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang diberikan izin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 4 Juli 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 196/E/O/2014 tentang izin Pendirian Universitas Nahdhatul Ulama Kalimantan Timur di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh perkumpulan Nahdhatul Ulama di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Kampus Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur yang terletak di kota Samarinda Kalimantan Timur, tepatnya di Jl. K.H. Harus Nafsi Kel. Rapak Dalam Samarinda Seberang. Kegiatan Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kaltim) merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak. Pada tanggal 21 September 2016, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd menandatangani suatu Nota kesepahaman dengan Professor Peter Dawkins (Vice Chan Cellor and President) Victoria University yang meliputi perkembangan program-program pendidikan, termasuk program gelar bersama (Joint Degree) dan gelar ganda (double degree), pelatihan penelitian, supervice dan kerjasama, pertukaran dosen dan

mahasiswa, penerbitan karya ilmiah bersama supervise program doktor (S3), penyelenggaraan bersama seminar, konferensi, dan loka karya.

Fakultas dan program studi UNU Kaltim terdiri dari: (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Akuntansi; (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan dengan program studi Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi; (3) Fakultas Farmasi dengan program studi Farmasi; (4) Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Industri, Teknik Informatika, Arsitektur, Desain Interior, dan Teknologi Industri Pertanian.

Fasilitas UNU Kaltim memiliki ruangan ber-AC, asrama mahasiswa, ruang laboratorium Farmasi, laboratorium komputer, perpustakaan, lapangan olah raga, auditorium, kantin dan unit layanan kesehatan. Adapun contributor UNU Kaltim terdiri dari: Prof. Dr. HC. K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Prof. Dr. Andri Patton, M.Si, Prof. Dr. Susilo, M.Pd, Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, Dr. Zein Heflin Frinces, B.Sc, M.Sc, MA.

Adapun visi dan misi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kaltim) yaitu:

Visi:

"Menjadi universitas terkemuka di bidang teknologi dan humaniora berdasarkan prinsip Islam Ahlus sunnah waljama'ah, nilai-nilai kebangsaan dan permbangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur sampai tahun 2030"

Misi:

1. Membina pendidikan tinggi yang mengintegrasikan etika keislaman, kebangsaan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat demi kesejahteraan umat manusia.
3. Mengembangkan tradisi kampus yang ilmiah dan kreatif dalam suasana demokratis. Menjadi universitas terkemuka di bidang teknologi dan humaniora berdasarkan prinsip Islam Ahlussunnah Waljama'ah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di Kalimantan Timur sampai 2030.

Sedangkan uraian lebih lengkap tentang gambaran umum dari obyek penelitian kedua penelitian ini yakni Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kaltim)akan kami lampirkan ke dalam lampiran laporan penelitian ini.

Kemudian objek penelitian yang keempat adalah STAIS Kutai Timur. Sejarah lahirnya STAIS Kutai Timur adalah berawal upaya mewujudkan Kutai Timur yang Cerdas, Merata, dengan Prestasi Gemilang (CEMERLANG) sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur setidaknya ditopang oleh 2 (dua) hal, yaitu: ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Juga seiring dengan gagasan Bupati Kutim mengenai kebijakan pokok pembangunan pendidikan yang meliputi: Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan, Good Governance dan Akuntabilitas, dan ide tersebut mendapatkan respon positif dari segenap elemen masyarakat Kutai Timur.

Peningkatan kualitas SDM yang dicanangkan tersebut diarahkan tidak hanya pada pendidikan tingkat dasar dan menengah yang dikenal dengan wajib belajar 12 tahun, tetapi juga pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) sebagai kelanjutan dari wajib belajar 12 tahun tersebut. Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi diarahkan kepada dua sektor. Sektor pertama membidangi hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sektor kedua disamping IPTEK juga membidangi hal-hal yang terkait dengan sosial-keagamaan dan mental-spiritual. Pada sektor kedua inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) ikut mengisi formasinya.

STAIS yang diharapkan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia, pendirian dan pengembangannya tentu harus direncanakan secara matang agar menjadi perguruan tinggi yang besar, maju, dan modern serta berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, selanjutnya, Team Persiapan sementara pada tanggal 8 s/d 13 Maret 2006 telah melakukan penelusuran dan penyerapan aspirasi masyarakat untuk digunakan sebagai dasar pijakan dalam merancang berdirinya STAIS yang benar-benar sesuai dengan program KUTIM CEMERLANG serta sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat pengguna. Dan hasilnya adalah adanya dukungan dan tanggapan yang positif dari segenap masyarakat Kutai Timur. Untuk memperkuat landasan kerja tersebut akhirnya dibentuklah Team Persiapan Pendirian STAIS dengan SK Bupati Kutai Timur No. 68/02.188.45/HK/III/2006 tertanggal 17 Maret 2006 tentang Team Persiapan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS).

Tim yang dibentuk tersebut bertugas untuk mengumpulkan informasi sebagai bentuk pemenuhan persyaratan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama yang terdiri dari: (1) Penentuan Jurusan, Program Studi, dan Kurikulum; (2) Tenaga Kependidikan; (3) Analisis Potensi Calon Mahasiswa; (4) Analisis Pendayagunaan Out-Put/ Pemakai Jasa Lulusan; (5) Sumber Pembiayaan; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama; (8) Rancangan Statuta (9) Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Bersama itu, team mendapatkan support dari Bupati Kutai Timur untuk segera melegalkan (mengakte notariskan) Yayasan yang akan menaungi STAIS tersebut. Dalam proses legalisasi ini terdapat kendala antara lain lamanya waktu dalam peyelesaian persyaratan pendirian Yayasan tersebut, misalnya pengumpulan KTP, Surat Rekomendasi, dan lainnya. Akhirnya yayasan terbentuk berdasarkan Akte Notaris yang dibuat dihadapan Wasi'ah, SH, SP. N. Notaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta dan telah mendapatkan pengesahan serta telah berstatus sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-1094.HT.01.02.TH. 2006, tanggal 29 Mei 2006, yang terdiri dari 3 orang Dewan Pendiri, 16 orang Dewan Pembina, 3 orang Dewan Pengawas, 5 orang Dewan Pengawas dan 12 orang Anggota Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan oleh penetapan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan (Menkumdang).

Setelah yayasan terbentuk dan persyaratan lainnya lengkap, Team mengajukan Proposal Pendirian STAIS ke Dirjen Pendis c.q. Direktur Dikti Depag RI. Langkah ini ditopang dengan mengadakan penelusuran ('pengawalan') Proposal tersebut yang telah diajukan ke Depag RI, serta konsultasi dengan pihak Dirjen Pendis tentang Pendirian STAIS.

Sesuai informasi yang diterima dari Sekretaris Ditjen Pendis dan Direktur Dikti Depag RI, yakni keluarnya Surat Edaran Dirjen Pendis (2006) yang pointnya adalah Pihak Departemen tidak akan membuka Jurusan/Prodi/ Sekolah Tinggi baru dan mengalihsatuskan STAIN ke IAIN, atau IAIN ke UIN. Sehingga Team disarankan untuk merubah strategi dengan mengadakan Lokakarya Pendidikan Islam bertemakan "Pendidikan Islam dan Kebijakan Pemerintah di Era Otonomi Daerah" dan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Mei 2006, sekaligus melanjutkan agenda kerja Team Persiapan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS). Kegiatan ini merupakan entery-point bagi rencana pendirian Perguruan Tinggi Agama ini kepada pihak Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi.

Adapun visi, misi dan tujuan STAIS Kutai Timur adalah sebagai berikut:[122]

Visi

1. Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, berdimensi intelektual, moral, dan amal berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantapan aqidah dan pembinaan akhlakul karimah.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu, dan mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan kehidupan masyarakat.
2. Mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keagungan moral, keluasan ilmu dan kematangan professional.
3. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bernafaskan Islam melalui pengkajian ilmiah dan penelitian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan

4. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab menuju terwujudnya masyarakat madani.
5. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya bernafaskan Islam.

Adapun uraian lengkap yang berisi profil sekolah tinggi Agama Islam Sangata Kutai Timur akan kami sajikan dalam lampiran laporan penelitian ini.

Sedangkan gambaran umum obyek penelitian kelima yakni SITBA Balikpapan, data yang kami peroleh dapat kami sajikan sebagai berikut. Sejarah lahirnya STITBA Balikpapan berdasarkan data dokumen profil STITBA Balikpapan bermula dari gagasan dari beberapa tokoh yang tergabung dalam

122 Dokumen Profil Singkat STAIS Kutai Timur tahun 2017

organisasi Islam yang ada di Kota Balikpapan yang selanjutnya diikuti dengan langkah pertama dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA) pada tanggal 18 Agustus 2002 yang secara resmi pendiriannya dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Drs. Yurnalis Ngayoh atas nama Pemerintah propinsi pada tanggal 17 September 2002, dan sekaligus pembukaan Kuliah Perdana oleh Ketua I (Drs. Said Husein, MA) dari STAIN Samarinda.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA) pada awal berdiri dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kalimaantan Timur, dan sekarang berubah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syaichona Cholil Balikpapan. yang berpusat di Balikpapan. Memperoleh idzin operasional dari Menteri Agama RI pertama kali pada tanggal, dan selanjutnya diperpanjang oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 5/E/90.

STITBA yang berdiri di Kota Besar dan maju Balikpapan dengan mottonya Balikpapan Kota Beriman, mempunyai semboyan Kubangun, Kujaga dan Kubela, Sampai dengan tahun 2016 STIT Balikpapan telah berhasil meluluskan sebanyak 6 angkutan dengan jumlah alumni sebanyak 250 alumni yang sudah bekerja dan tersebar di berbagai instansi, baik Pemerintah maupun swasta.

Pada awalnya STIT Balikpapan menyelenggarakan 1 (satu) program studi yakni Pendidikan Agama Islam, dengan perkembangan dan perubahan waktu STITBA sekarang sudah menyelenggarakan 3 (tiga) program studi yaitu: PAI, PGMI dan PGRA (PIAUD). Keberadaan STITBA di Kota Balikpapan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah setempat sebagai kota jasa, industry, pariwisata dan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan (vokasi), maka tidak menutup peluang banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri di Kota Balikpapan.

Adapun visi, misi dan tujuan STITBA Balikpapan adalah sebagai berikut:[123]

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam unggulan dan terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-Islaman

Misi

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya keislaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
2. Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar

123 Dokumen Profil Singkat STITBA tahun 2017

3. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, skill dan sikap bermasyarakat yang professional
4. Mendidik mahasiswa berfikir, bersikap kritis dan kreatif
5. Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan aqidah dan keanggunan moral
6. Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
7. Mendidik mahasiswa agar mampu menghasilkan manusia yang mampu menhasilkan pengetahuan, empiric, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan

1. Menyiapkan generasi muslim yang bertaqwa, berpengetahuan luas, bermoral dan terampil serta memiliki nilai kompetitif
2. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesi serta mampu menerapkan dan mengembangkannya atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional
4. Menyiapkan calon-calon masyarakat yang mandiri, peka dan peduli lingkungan

Sedangkan gambaran umum lebih lengkap tentang STITBA Balikpapan akan kami sajikan dalam lampiran laporan penelitian ini. Untuk diketahui bahwa teknis ini dilakukan guna mempermudah para pembaca dalam mengkaji lebih detail dari masing-masing objek penelitian.

Adapun gambaran umum objek penelitian yang keenam yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif (STIT Syamsul Ma'arif) Bontang merupakan satu dari sekian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam swasta di Nusantara yang berupa Sekolah Tinggi, yang dikelola oleh Kementerian Agama dan termasuk ke dalam Kopertis

wilayah Ditjen Pendidikan Islam. Perguruan Tinggi ini telah bangkit sedari 22 Juni 2006 dengan Nomor SK PT/Dj.I/167/2006 dan tanggal SK PT 22 Juni 2006. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif ini beralamat di Jl.Cut Nyak Dien RT 13 gang Kerikil 8 No. 108 Bontang, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang baru memiliki satu prodi yaitu Pendidikan Agama Islam.

Pada periode awal kepemimpinan STIT Syamsul Ma'arif, pemilihan dan pengangkatan pimpinan dilaksanakan berdasarkan Statuta STIT Syamsul Ma'arif. Menurut Statuta tersebut, pemilihan dan pengangkatan pimpinan [Ketua] sekaligus pemberhentiannya dilakukan oleh yayasan atas usul senat. Demikian juga pengangkatan dan pemberhentian pembantu Ketua berdasarkan usulan dari Ketua. Pemilihan Ketua STIT Syamsul Ma'arif pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 setelah lembaga ini resmi mendapatkan ijin operasional dari Departemen Agama RI pada tahun yang sama. Sedangkan pemilihan Ketua I, II dan III dilaksanakan setelah pemilihan Ketua STIT Syamsul Ma'arif resmi dikukuhkan. Pada periode pertama masa jabatan Ketua dan Ketua I, II dan III ditetapkan selama empat tahun dan berakhir pada tahun 2010. Ketua dan Ketua I, II dan III dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Bilamana Ketua berhalangan tetap. Ketua yayasan mengangkat pejabat Ketua, sebelum diangkat Ketua tetap baru.

Tata cara memberikan pertimbangan calon Ketua dan Ketua I, II dan III dilakukan sebagaimana yang diatur dalam statuta STIT Syamsul Ma'arif, sebagaimana penjelasan berikut. Tata cara memberikan pertimbangan terhadap calon Ketua STIT Syam adalah Ketua Yayasan mengajukan nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon Ketua melalui rapat Dewan Pembina dan pengurus yayasan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah pemilihan calon ketua terpilih ditetapkan pengangkatannya sebagai Ketua STIT Syam oleh Ketua Yayasan.

Tata cara memberikan pertimbangan terhadap calon Ketua I, II dan III oleh Senat STIT Syam adalah Ketua menyampaikan calon Ketua I, II dan III yang telah memenuhi syarat masing-masing 2 orang pada setiap jabatan Ketua I, II dan III kepada senat STIT Syam untuk dipertimbangkan dan dipilih sebagai calon Ketua I, II dan III. Ketua STIT Syam menetapkan pengangkatan Ketua I, II dan III terpilih.

Selanjutnya, untuk pemilihan dan pemberhentian ketua jurusan dilakukan oleh ketua STIT SYAM setelah mendapat pertimbangan Senat STIT melalui

rapat senat. Sedangkan pemilihan dan pemberhentian pimpinan kelembagaan dilingkungan STIT SYAM Bontang, seperti: Ketua P3M, UPMA, Perpustakaan, Lab. Bahasa, Lab. Komputer, Kabag, Kasubbag-kasubbag, dan lainnya dilakukan oeh ketua STIT SYAM melalui rapat pimpinan.

Pelantikan Ketua STIT SYAM dilakukan oleh ketua Yayasan. Sementara Ketua I, II dan III, kabag, Kasubbag-kasubbag, ketua dan sekretaris jurusan, dan ketua-ketua unit lain dilakukan oleh Ketua STIT SYAM dengan masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang saat ini dipimpin oleh H. Sabaruddin, MM (Ketua STIT Syam), Hasanuddin Hakam, MM (Ketua I), dan Jamaluddin,M.Pd.I (Ketua III).

Adapun visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang yaitu:

Visi:

"Menjadi program studi yang unggul dalam membentuk lulusan yang profesional pada bidang kependidikan islam, beraqidah kuat, dan berakhlak mulia"

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkarakter ke-islaman, bermutu tinggi, dan berbasis teknologi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kependidikan islam di masyarakat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pendidikan Islam.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan dan penerapan ilmu kependidikan Islam.
4. Menyelenggarakan dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan Islam.
5. Membentuk lingkungan akademik yang Islami dan berbudaya Islami.

Tujuan:

1. Menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki ilmu Islam dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memberi contoh pengamalan

pengetahuan dan teknologi Islami dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan aqidah yang kuat dengan pergaulan akhlak yang mulia.

2. Menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki ilmu islam dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memberi contoh pengamalan pengetahuan dan teknologi islami dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan aqidah yang kuat dengan pergaulan akhlak yang mulia.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan islam, iptek dan seni yang bernafaskan Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pengembangan berupa penambahan prodi baru yang belum ada, membentuk pesantren dan pembangunan masjid dilingkungan kampus.
4. Menghasilkan lulusan yang professional, kompetitif, berkarakter islami dan berbudi luhur.
5. Menghasilkan produk-produk inovatif dalam bidang pengetahuan islam yang dibutuhkan oleh masyarakat

Sedangkan gambaran umum lebih lengkap tentang STIT Syamsul Ma'arif Bontangakan kami sajikan dalam lampiran laporan penelitian ini. Untuk diketahui bahwa teknis ini dilakukan guna mempermudah para pembaca dalam mengkaji lebih detail dari masing-masing objek penelitian.

Sedangkan obejek penelitian ketujuh ini berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan. Gagasan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan berawal dari sebuah keprihatinan dan keinginan besar masyarakat akan adanya salah satu Sekolah Tinggi Islam di Kalimantan Timur bagian Utara (Kalimantan Utara Sekarang). Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di Kabupaten Nunukan yang telah berdiri sendiri dan menitikberatkan aktivitasnya pada Program Studi (Prodi) ilmu pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Nomor : Dj. II/465/2005 di bawah binaan/koordinasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan Selatan Banjarmasin.

STIT Ibnu Khaldun Nunukan lahir atas dasar mencermati dan menyoroti realitas Kabupaten Nunukan di bidang pendidikan masih jauh tertinggal dan belum memiliki lembaga pendidikan tinggi jenjang kesarjanaan (S1), serta

banyaknya lulusan SMU/Aliyah sederajat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di luar Nunukan dengan alasan geografis dan ekonomi.

Adapun dasar hukum pelaksanaan pendidikan STIT Ibnu Khaldun Nunukan sesuai dengan Surat Bupati Nunukan Tentang Rekomendasi Pendirian STIT Ibnu Khaldun Nunukan Nomor 451.41/277/Binsos/V/2002, Surat DPRD Kabupaten Nunukan Tentang Rekomendasi Persetujuan Pnedirian Nomor 170/34/DPRD/I/2003, Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nunukan Tentang Rekomendasi Permohonan Persetujuan Nomor Mq.9/PP.009/115/2002, Surat Persetujuan Tentang Penerimaan Mahasiswa dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah XI Nomor Kop. Wil.IX/PP.009/30/2002, SK Dirjen Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Nomor: Dj.II/465/2005 Tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Program Studi serta SK Perpanjangan izin Dirjen (Diktis) Nomor : 4651 Tahun 2016, dan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 042/BAN-PT/Ak-XIII/S1/1/2011.

Adapun visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan adalah sebagai berikut:[124]

Visi

"Menjadikan Perguruan Tinggi Unggulan dan Mandiri yang Melahirkan Sarjana Pendidikan Islam yang Professional, Intelektual, Nasionalis, dan Berakhlak Mulia."

Misi

1. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan intelektual yaitu memiliki kemampuan akademik, memahami Islam secara inklusif dan universal, berwawasan multikultural, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam dari berbagai aspeknya dengan menguasai berbagai macam metodologi, pendekatan studi Islam dan menolak segala bentuk faham ekslusif, radikal, dan ekstrem.
2. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan jiwa kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang professional, berorientasi pada pengembangan profesi keguruan, menguasai berbagai macam

124 Dokumen Profil singkat STIT Ibnu Khaldun Nunukan tahun 2017.

metodologi pengajaran, strategi belajar mengajar, serta materi pembelajaran.

4. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan jiwa dan kepribadian, nilai-nilai luhur serta akhlak yang mulia.

Adapun gambaran umum lebih lengkap tentang profil STIT Ibnu Khaldun Nunukan akan kami sajikan dalam lampiran laporan penelitian ini.

Kemudian objek penelitian yang kedelapan yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Anshar Bulungan. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan adalah sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang pertama berkedudukan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. STIT Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan berupaya melahirkan para sarjana dari generasi Muslim yang berkualitas serta menjadi Tenaga Pendidik melalui jenjang S1 (Strata Satu) yang diharapkan bermanfaat bagi umat dan masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Utara serta memiliki pengetahuan agama memadai, berakidah yang benar, berakhlak mulia, berwawasan luas dan berdedikasi tinggi sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.

STIT Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan berdiri pada tahun 2015 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Anshar Tanjung Selor dan Resmi Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 setelah mendapat Izin Pendirian dari Direktorat Jenderal Indonesia Nomor 2642 Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 6 Mei 2015 dengan konsentrasi Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dengan Status Terakreditasi.

Adapun visi, misi, dan tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan adalah sebagai berikut:[125]

Visi

"Menjadi Program Studi Islam yang Unggul, Memiliki Kedalaman Spiritual, Beriman dan Bertakwa Kepada Allah SWT, Berdaya Saing Global dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat."

125 Dokumen Profil singkat STIT Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan tahun 2017.

Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan calon guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang professional, berkualitas, kompetitif, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.
2. Memberikan pelayanan administrasi akademik dan kegiatan akademik yang bermutu kepada mahasiswa.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung terlaksananya kegiatan Tri Dharma pada program studi Pendidikan Agama Islam.
4. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan lain melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan cakrawala pemikiran dan memberi kontribusi terhadap konsep-konsep pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengabdian alumni yang lebih professional sesuai dengan tingkat perkembangan dan dinamika masyarakat.

Adapun gambaran umum lebih lengkap tentang profil STIT Al-Anshar Tanjung Selor Bulungan akan kami sajikan dalam lampiran laporan penelitian ini.

B. Manajemen Strategik dalam Menangkal Radikalisme di PTKI

Maraknya kasus radikalisme dan terorisme telah mencederai dan menodai nilai-nilai kemanusiaan, yang mana pada hakikatnya manusia memiliki fitrah yang cenderung untuk berbuat baik, saling mengasihi dan menyanyangi, memiliki kepedulian terhadap sesama tanpa memandang status, kasta, ras, dan agama, serta terlahir sebagai makhluk yang memiliki hati nurani yang bersih dan menjunjung tinggi toleransi antar umat berbudaya dan beragama. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pusat kiblat peradaban Islam, sehingga upaya untuk menerapkan sistem *syariah Islamiyyah* atau *khilafah Islamiyyah* merupakan tujuan utama kalangan Islam garis keras di Indonesia. Indonesia memang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, tapi perlu digarisbawahi bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia adalah negara plural dan

multikultural yang kaya akan budaya dan agama, yang dipersatukan dalam Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini berbagai elemen keagamaan khususnya Islam kembali mencuat kepermukaan karena adanya berbagai paham-paham agama yang berkembang yang kemudian menjelma menjadi doktrin-doktrin radikal dan fundamental yang pada akhirnya berubah menjadi sebuah gerakan radikalisme dan terorisme yang dapat memecahbelah persatuan umat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Munculnya aktor gerakan-gerakan Islam baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam yang lama, seperti NU (Nahdilyin), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Gerakan ini berada di luar kerangka *mainstream* proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut "Gerakan Islam Baru" (*new Islamic movement*). Kelompok-kelompok Tarbiyah—yang kemudian menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ) dan sebagainya merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia.

Pada sisi lain, radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam di-*judge* sebagai agama teror dan umat Islam menjadi pihak tertuduh yang dianggap menyukai jalan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta sosial bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang muslim garis keras, dan hal ini telah mencoreng nama baik Islam di mata dunia.

Seiring pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, semakin canggih pula masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Teknologi memiliki dua fungsi yang dapat diibarat sebagai sebuah mata pisau—tajam dan memiliki fungsi untuk mengupas buah yang manis dan juga dapat melukai tangan—perih dan menyayat hati bahkan dapat membunuh. Begitu pula teknologi dengan berbagai vitur aplikasi yang ditawarkan dewasa ini. Teknologi bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia tetapi juga dapat menciptakan kerusakan pada dunia. Aksi kejahatan kelompok radikal dan teroris kini selain melakukan propaganda dan doktrinasi melalui cara diskusi melalui halaqah-halaqah melalui konsep tarbiyahnya juga telah bermanuver menggunakan media teknologi untuk menyemaikan virus-virus

ideologinya kepada masyarakat sosial media. Hal ini sangat berbahaya, karena sasarannya tidak terbatas, bahkan melalui berbagai akun media sosial seperti *website, facebook, whatsap, instagram, youtube* dan berbagai vitur lainnya mereka dengan bebas dan dengan biaya yang sedikit mampu merekrut anggota baru dalam jumlah yang lebih besar ketimbang pola klasik yang dilakukan secara langsung.

Meskipun lembaga bentukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan program deradikalisasinya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan berbagai ormas yang memiliki visi dan misi yang sama untuk dapat bersama-sama melakukan perang melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme di Indonesia umumnya dan Kalimantan Timur dan Utara khususnya. Namun, program ini belum menunjukkan peningkatan daya tangkal yang signifikan.

Untuk itu, pola deradikalisasi yang efektif adalah melalui jalur pendidikan Islam inklusif-multikultural yang dikelola dengan baik dengan merumuskan strategi yang tepat, penerapan yang tepat, dan akhirnya dapat pula dievaluasi secara tepat sebagai bentuk deradikalisasi. Maka dari itu, manajemen strategi dalam menangkal radikalisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam inklusif multikultural merupakan solusi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, perlu kerjasama terpadu dari berbagai pihak untuk dapat menutup kran ideologi radikal yang terus mengalir membanjiri masyarakat Indonesia baik melalui media nyata maupun media maya. Massif dan sistematisnya gerakan Islam radikal ini tentu tidak dapat diselesikan dengan langkah represif dan kuratif saja tetapi perlu langkah preventif yang tepat pula. Untuk itu, basis yang paling fundamental untuk melakukan pencegahan terhadap merebaknya radikalisme khususnya di Kalimantan Timur dan Utara adalah dengan melakukan manajemen strategi dalam menangkal radikalisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam inklusif multikultural di perguruan tinggi Islam, mengingat perguruan tinggi Islam saat ini menjadi sarang bersemainya ideologi-ideologi radikal dari organisasi Islam seperti dakwah haraki tarbiyah, tahriri dan salafi.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian tentang manajemen strategik dalam menangkal radikalisme melalui deradikalisasi berbasis pendidikan Islam di Kalimantan Timur dan Utara sebagai berikut:\

1. **Melakukan formulasi strategi deradikalisasi pendidikan Islam dengan merumuskan kurikulum berwawasan keislaman inklusif-multikultural**

Perumusan strategi deradikalisasi berbasis pendidikan Islam yang memiliki wawasan keislaman inklusif-multikultural saat ini sangat penting untuk digalakkan dan dibumikan, mengingat rentannya mahasiswa akan terpapar paham radikalisme yang cenderung intoleran dan menganggap aliran di luar mereka salah bahkan ada yang sampai mengkafirkan ini jika dibiarkan akan semakin luas, massif, dan sistematis. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam dalam konteks riset ini perlu merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang berwawasan inklusif-multikultural, karena perguruan tinggi Islam kini menjadi target sasaran penyemaian ideologi radikalisme. Hal ini terlihat dari adanya radikalisme simbolik yang kini mulai bermunculan di berbagai perguruan tinggi Islam dengan adanya budaya hijrah yang ditunjukkan oleh maraknya hijaber dan cadarisme di kalangan akhwat dan kalangan ikhwan yang menggunakan celana cingkrang (*isbal*) serta berjanggut yang secara instan terjadi di berbagai kampus Islam—atau dapat dikatakan adanya upaya *purifikasi*(pemurnian) keagamaan dan *revivalisme* (kebangkitan) keislaman di dunia kampus dengan didukung adanya pengajian-pengajian yang dilakukan oleh organisasi Islam Haraki Tarbawi (Ikhwanul Muslimin), Tahriri (Hizbut Tahrir Indonesia, dan Salafi (Wahabi).Tidak hanya itu, modus operandi yang mereka lakukan kini semakin canggih dengan didukung kemajuan teknologi dan vitur aplikasi yang semakin mempermudah dan murah untuk mereka melakukan penyemaian ideologi atau adanya upaya *brain washing* (cuci otak) melalui jaringan internet di media sosial seperti website, facebook, twitter, instagram, dan youtube.Tentunya hal ini merupakan upaya untuk melakukan pengkaderan dan menghimpun masa untuk dapat melakukan perubahan ideologi radikal yang nantinya berujung pada pendirian negara Islam dengan sistem khilafah Islamiyah. Hal ini sebagaimana diungkapan oleh mahasiswi IAIN Samarinda dengan inisial AN sebagai berikut:

> "Memang pemandangan budaya hijaber dan cadarisme secara tersirat tidak terlalu asing karena memang secara logika kampus Islam harus menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Tapi, momen ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikalis untuk melakukan sebuah perubahan diri kepada mahasiswi

kampus yang mereka sebut dengan "*hijrah*" menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengenakan konsepsi berpakaian ala Islam—atau lebih ke cara berpakaian orang-orang Arab. Tentunya proses pemengaruhan ini dikemas secara apik dan menarik serta dibumbui dengan adanya siksaan di neraka bagi muslimah yang sering menampakkan auratnya. Padahal dalam Islam kita tahu bahwa aurat Islam yang bisa terlihat itu wajah dan telapak tangan. Namun, wajah menurut kalangan radikalis (haraki tarbawi, tahriri, dan salafi) adalah dengan menggunakan busana muslimah yang besar dan bercadar (*niqab*). Hal ini sebenarnya baik, namun, para mahasiswi yang teradikalisasi ini tidak menyadari adanya proses *brain washing* (cuci otak) melalui pembelajaran agama melalui kajian-kajian keislaman baik di masjid-masjid kampus atau melalui akun sosial media mereka untuk memperkuat pemahaman keagaaman Arabisasi yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila. Bahkan gerakan mereka ini sering mengganggap orang yang di luar kelompok mereka bukan orang baik, kotor, dan bahkan sampai pada tataran mengkafirkan, hal seperti ini sangat berbahaya bahkan mereka cenderung ekslusif, tertutup di luar kalangan mereka dan terkadang frontal dengan melakukan berbagai gerakan protes terhadap kebijakan pimpinan dan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka."

Senada dengan ungkapan di atas, mahasiswa STIS Samarinda berinisial RZ, juga mengutarakan hal yang sama bahwa:

"Perguruan Tinggi Keagamaan Islam seharusnya segera merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang lebih mengedepankan penanaman nilai-nilai toleransi selain penanaman nilai-nilai keislaman. Sehingga dengan adanya perumusan format kurikulum pendidikan Islam yang inklusif-multikultural diharapkan akan menjadi pedoman bagi para dosen untuk menyampaikan bahan ajar mengenai Islam yang ramah bukan marah, Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam bukan membawa laknat bagi seluruh alam semesta. Dengan begitu akan terjadi

keberimbangan antara wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan. Mengingat sekarang kampus Islam menjadi target sasaran kelompok radikalisme dengan strategi yang begitu *soft* dan berbaur dengan masyarakat kampus, sehingga tidak kentara gerakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung lebih pintar untuk mengikuti arus sambil mengamati kelengahan untuk menyampaikan ideologinya melalui berbagai kajian-kajian keislaman yang biasanya bermula dari kelas-kelas ketika perkuliahan telah berakhir hingga menggunakan masjid kampus sebagai pusat penyemaian ideologi mereka. Hal ini biasanya sering mereka lakukan kepada mahasiswa baru terutama yang masuk dari lulusan sekolah umum yang masih memiliki pemahaman agama yang dangkal, sehingga ini menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk melakukan doktrinasi dengan menyusun tema dialog yang terbuka dan terkesan mampu menjawab permasalahan para mahasiswa baru. Untuk itu, institusi dalam hal ini rektor sebagai penentu kebijakan mampu mengawali ini sebagai langkah strategis dalam menangkal radikalisasi agama berkembang di kampus terutama organisasi Islam yang masuk dalam kelompok haraki tarbawi, tahriri, dan salafi. Serta mengaktifkan masjid kampus dengan kajian-kajian Islam yang moderat secara terbuka sehingga kajian-kajian politik agama ini dengan sendirinya akan tenggelam dan keluar dari kampus Islam secara otomatis. Sebab gerakan dakwah radikal ini hanya bisa dilawan dengan menggelorakan gerakan dakwah moderat yang inklusif, multikultur dan humanis kemudian juga diperkuat dengan pola pembelajaran keagamaan Islam yang moderat, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Islam yang rahmatan lil 'alamin."

Ungakapan lain juga datang dari mahasiswiUniversitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, berinisial ZA, ia mengutarakan bahwa:

"Gerakan radikalisasi atas nama agama ini memang sulit dideteksi keberadaannya apalagi di kampus-kampus Islam. Namun, carayang bisa ditelusuri adalah dengan melihat dari simbol cara berpakaiannya yang begitu mencolok dan cenderung

agak tertutup dan kurang bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan ada seorang teman yang dulunya dalam berpakaian ia menggunakan pakaian muslimah yang kebanyakan digunakan mahasiswi, tetapi setelah itu secara instan dan begitu cepat, cara berpakaiannya berubah dan jauh berbeda dari biasanya. Ketika diselidiki ternyata ia sering mengikuti kajian-kajian lembaga dakwah kampus yang sering dilaksanakan di masjid-masjid kampus atau masjid luar dengan konsep keislaman yang secara tersirat mampu membangkitkan gelora keislaman setiap manusia. Tentu hal ini merupakan perkara kecakapan retorika berbicara yang hebat sehingga secara sempurna ia dapat menghipnotis setiap pendengarnya agar masuk dan bergabung dalam kajian-kajian keislaman yang sudah didesain sebagai media atau alat untuk mencapai geopolitik untuk menggulingkan sebuah negara demokrasi yang *thogut*. Yang mereka jadikan kiblat dalam beragama adalah Islam Arab dan Eropa termasuk kesultanan Turki Utsmani, padahal mereka tidak tahu betapa besar geopolitik keagamaan di negara Arab dan Eropa bahkan negara-negara Arab secara perlahan hancur dengan sendirinya karena propaganda dan isu radikalisme yang dibangun oleh kalangan aliran Islam yang berkembang dan didukung dengan provokasi media oleh kalangan Barat. Begitu juga dengan Islam yang ada di Indonesia, saat ini menjadi incaran untuk dibenturkan secara ideologi dengan mengatasnamakan Islam. Maka dari itu, kampus Islam perlu merumuskan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural dengan menyusun berbagai bahan ajar terutama pendidikan Islam dengan muatan nilai-nilai toleransi dan humanis."

Kemudian pendapat lain juga datang dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) berinisial AR, mengungkapkan bahwa:

"Di kampus Islam memang tidak bisa dihindari maraknya organisasi Islam dengan latar belakang visi misinya masing-masing. Kalau di STAIS sendiri organisasi Islam kemahasiswaan lebih dominan PMII, meskipun HMI, KAMMI juga turut mewarnai. Tapi saat ini organisasi-organisasi ini kini telah

disusupi oleh organisasi radikal yang cenderung bergerak dengan strategi tarbiyah yang tidak dijalankan oleh PMII dan HMI, misalnya KAMMI sebagai organisasi Islam yang ekslusif kini sering melakukan kajian-kajian keislaman dengan mencari tema yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi. Jika ditelusuri KAMMI ini tentu memiliki afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, Wahdaniyah, Salafi, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan dakwah ini tentu menginginkan perubahan secara total tentang iklim kampus agar tercipta suasana religius yang sesuai dengan apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat. Bahkan permasalahan sosial masyarakat yang tidak kunjung usai oleh pemerintah hanya bisa diselesikan dengan diberlakukannya *dawlah Islamiyah* dengan sistem *khilafah Islamiyah.* Tentu ideologi gerakan dakwah Islam ini mendapatkan perhatian khusus dari para mahasiswa terutama ketika berbicara permasalahan sosial yang menimpa dirinya, ketika permasalahan itu mampu diselesaikan oleh gerakan dakwah Islam radikal ini secara otomatis mereka mendapatkan "relawan baru" dalam menyemaikan ideologi mereka kepada teman sejawatnya hingga menyebar ke seluruh mahasiswa/mahasiswi dengan konsep "hijrah" yang kini menjadi viral di dunia nyata maupun dunia maya yang banyak digemari oleh masyarakat milenial dewasa ini. Untuk itu, mengembalikan fungsi pendidikan Islam inklusif multikuktural sebagai solusi permasalahan sosial masyarakat kampus haruslah diformulasikan dengan strategi yang baik dan tepat sasaran sehingga dapat menutup ruang gerak organisasi Islam radikal di dunia kampus bahkan dengan sendirinya pergi karena pondasi ideologi masyarakat kampus sudah mengakar kuat dan sulit untuk digoyahkan."

Ungkapan senada juga datang dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA) yang berinisial FZ, ia menuturkan bahwa:

"Radikalisme bernuansa agama kini menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, radikalisme atas nama agama Islam khususnya merupakan romantisme Arabisasi

yang mudah masuk dan diterima dengan mudah oleh banyak kalangan muda di Indonesia terutama mahasiswa. Arab dijadikan rujukan dan kiblat ideal tentang konsepsi Islam yang sesungguhnya. Padahal mereka tidak memahami bahwa gerakan geopolitik negara Arab saat ini tidak seperti yang ada di zaman kenabian. Banyak aliran keagamaan di sana yang justru tidak sejalan dengan konsep Islam—yang bisa dikatakan gagal paham tentang Islam, sehingga hal ini juga terjadi di masyarakat muslim Indonesia khususnya dalam memahami makna jihad. Kalau di STITBA sendiri mengenai pengaruh radikalisme ini memang sedikit banyak sudah mulai masuk terutama aliran dakwah haraki tarbawi seperti pengajian ala PKS yang disebut tarbiyah, gerakan tahriri kelompok HTI, dan beberapa gerakan dakwah Islam Salafi. Hal ini nampak tidak hanya dari tataran ideologi saja tapi sering terlihat oleh nuansa simbolik yang sering mereka gunakan misalnya seperti penggunaan hijaber dan cadar bagi muslimah dan celana cingkrang dan berjanggut bagi muslim. Radikalisme simbolik ini mulai muncul di berbagai kampus Islam termasuk di sini. Oleh karena itu, saya sebagai seorang muslimah yang berparadigma moderat setuju dengan adanya pemberlakuan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural mengingat Islam Indonesia bukan lah Islam seperti negara Arab tapi Islam Indonesia merupakan sebuah negara multi agama dan multi kultur yang kaya akan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islam yang tentunya masih sejalan dengan konsepsi Islam itu sendiri terutama masalah budaya toleransi, tenggang rasa, tolong menolong, yang justru menjadi contoh dunia saat ini. Sehingga dengan diberlakukannya kurikulum pendidikan Islam yang inklusif-multikultural dapat menjadi basis bagi upaya deradikalisasi di dunia kampus yang kini banyak terpapar paham radikal."

Ungkapan yang sama juga datang dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif (STIT Syam) Bontang yang berinisial BA, ia mengutarakan bahwa:

"Radikalisme bernuansa romantisme agama kini tidak hanya muncul secara massif dan sitematis menggunakan media dakwah oral atau dari mulut ke mulut, tetapi sudah bertransformasi menggunakan media sosial seperti facebook, whatsApp, twitter, instagram, dan youtube. Mengingat mudahnya kalangan muda mahasiswa mengakses media sosial sering kali mereka belajar agama melalui akun media-media sosial tersebut tanpa dibarengi dengan berdiskusi secara langsung dengan seorang dosen agama atau ustadz yang tentu memiliki pemahaman agama Islam yang komprehesif. Mereka biasanya langsung taklid buta terhadap apa yang disampaikan oleh ustad media sosial itu tanpa menelusuri kebenarannya melalui kitab-kitab para ulama Islam. Hal ini tentunya akan menjadi masalah jika mereka yang terpapar paham radikalisme media sosial ini terus menshare berbagai kata atau video yang belum jelas dasarnya ini sehingga akan mudah meluas khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Sehingga terkadang bagi muslim yang memiliki pemahaman agama yang minim dan dangkal akan mudah terprovokasi dan kemudian secara instan mulai merubah paradigmanya disusul dengan cara berpakaian yang mendadak syari, bukan atas dasar nurani tapi atas dasar trendi yang justru kini menjadi sebuah budaya di dunia kampus. Maka dari itu, saya sepakat dengan adanya formulasi strategi deradikalisasi pendidikan Islam dengan merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang berwawasan inklusif-multikultural guna menjadi *counter attack* derasnya arus radikalisasi yang kian marak mewarnai dunia milenial saat ini."

Kemudian, pernyataan senada juga hadir dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun Nunukan, yang berinisial ZF, ia menuturkan bahwa:

"Radikalisme atas nama agama Islam di kampus-kampus Islam tentu ada dan tidak bisa dipungkiri ataupun dihindari, terutama di daerah perbatasan seperti kampus kami. Kampus Islam yang ada di perbatasan kini menjadi target operasi Islam radikal mengingat mereka kelompok radikal itu pasti berasumsi

bahwa mereka akan mudah diterima karena memiliki visi dan misi yang sama yaitu sama-sama beragama Islam. Dengan kelebihan sedikit kemampuan retorika dan dari banyaknya bacaan para kelompok radikalis ini mendadak menjadi ustadz, padahal menempuh sekolah agama formal hingga kuliah di universitas agama saja tidak, nah, hanya pemahaman dari bacaan-bacaan buku dan hasil diskusi yang mereka lakukan di dalam setiap kajian-kajian lembaga dakwah tarbiyah. Dan buku-buku bacaan mereka banyak merujuk dari para pendiri gerakan haraki tarbiyah seperti Hasan Al-Banna dan Sayid Qutb, dan lain sebagainya. Begitu juga gerakan tahriri, mereka mendadak menjadi ustadz dengan bermodalkan bahan bacaan kitab-kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani seorang pendiri Hizbut Tahrir Transnasional. Selain itu, ada juga aliran Salafi (wahabi) yang kini mulai masuk, bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah terpengaruh dengan hipnotis gerakan dakwah yang mereka ajarkan baik melalui kajian-kajian keislaman yang bersifat dakwah di masjid-masjid juga melalui kajian-kajian online melalui youtube. Kelompok radikalis ini cenderung menghindari perdebatan dan diskusi agama kepada orang yang mereka anggap memiliki pemahaman agama yang kuat. Mereka pintar melihat kondisi dan situasi, sehingga mereka akan menyampaikan dakwahnya di tempat-tempat tertentu dan pada kalangan-kalangan tertentu yang mereka anggap memiliki dasar agama yang tidak kuat. Sehingga dengan begitu mereka akan lebih mudah melakukan *brain washing* (cuci otak) atau doktrinasi kepada sasaran mereka. Hal ini tentunya menggunakan strategi yang sembunyi-sembunyi sebagaimana dakwah awal yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Model gaya dakwah seperti ini yang mereka lakukan dalam proses doktrinasi untuk menghimpun dan mengkader massa militan untuk dapat mendukung kebijakan politik yang akan mereka usung untuk mendirikan sebuah negara Islam (*dawlah Islamiyah*) dengan sistem *khilafah Islamiyah*. Oleh karena itu, kampus Islam harus segera merapatkan barisan dan memperkuat pertahanan dari berbagai aspek agar tidak mudah terpengaruh oleh doktrinasi ideologi kelompok radikalisme

yang kini sudah banyak bercokol di kampus-kampus Islam. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberlakukan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif-multikultural dalam menciptakan mahasiswa, dosen serta sivitas akademika yang berparadigma moderat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya yang baik seperti toleransi (*tasamuh*) antar umat beragama dan berbudaya."

Senada dengan ungkapan di atas, dosen pemikiran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun Nunukan berinisial EK juga menambahkan bahwa:

"Gerakan radikalisme Islam di dunia kampus bukanlah hal baru. Gerakan ini sudah terjadi sejak Orde Baru, di mana para aktivis Islam radikal yang notabenenya adalah alumnus perguruan tinggi Islam dari Timur Tengah ketika kembali ke Indonesia melakukan berbagai gerakan dakwah Islam di luar gerakan dakwah Islam *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gerakan dakwah Islam baru ini cenderung lebih ekslusif dan dan terkadang destruktif. Gerakan radikalisme Islam seperti gerakan dakwah tarbawi, tahriri, dan salafi ini menjadi model gerakan dakwah baru yang kini mewarnai Indonesia. Bahkan gerakan mereka kini banyak mengisi ruang-ruang jabatan tertentu di berbagai perguruan tinggi seperti dosen, staf dan unsur pimpinan. Jika dosennya berpemahaman salafi atau tahriri sedikit banyaknya akan terbawa kepada proses pembelajaran yang ujung-ujungnya akan ada upaya doktrinasi dari dosen kepada mahasiswanya. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan. Maka dari itu perlu adanya reorientasi pendidikan Islam yang kemudian disusun melalui sebuah kurikulum pembelajaran yang inklusif-multikultural mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila yang disusun tidak hanya ada unsur-unsur agama tetapi juga penuh dengan muatan kebijakan budaya masyarakat Indonesia yang ramah dan rahmat. Untuk itu, perguruan tinggi Islam perlu memberlakukan kurikulum pendidikan Islam bermuatan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) dengan mem-*brackdown*ke

dalam sebuah pedoman baku berupa buku ajar yang dapat digunakan oleh seluruh dosen sebagai acuan pembelajaran dalam menciptakan iklim kampus yang berparadigma moderat dan humanis."

Selanjutnya ungkapan dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Anshar Bulungan yang berinisial CK, ia menuturkan bahwa:

"Kampus Islam tidak pernah lepas dari adanya doktrinasi keagamaan, karena di kampus memang tempatnya doktrinasi. Namun, doktrinasi keagamaan yang dimaksud adalah doktrinasi keagamaan yang moderat bukan adanya unsur paksaan. Karena dalam Islam sendiri tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi, dewasa ini banyak bermunculan arus doktrinasi keagamaan baru yang cenderung kepada upaya pemurnian agama (*purifikasi*) dan nuansa membangkitkan semangat keislaman (*revivalisme*) dengan mengusung konsep pendirian negara Islam yang dipimpin oleh satu pemimpin dalam memimpin negara-negara Islam yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara yang dipercaya sebagai sebuah negara yang menjadi titik awal kebangkitan Islam. Sehingga gaung *khilafah Islamiyah* sampai saat ini masih berdengung meskipun HTI telah dibubarkan namun ideologi mereka tetap hidup dan bergerak mencari mangsa baru. Untuk itu perlu adanya deideologisasi dan deradikalisasi khususnya di kampus-kampus Islam dengan membumikan konsep Islam moderat yang inklusif multikultural. Di kampus saya meskipun pergerakan mereka tidak begitu massif namun benih-benih itu kini mulai muncul dengan maraknya budaya hijaber dan cadarisme yang kini menjadi warna dan panorama baru di kampus yang terjadi secara instan. Untuk itu, saya sangat setuju dengan adanya pemberlakukan kurikulum pendidikan Islam berbasis inklusif multikultural atau etnopedagogi sebagai manifestasi Islam yang rahmatal lil 'alamin sesuai dengan karakter bangsa dan negara."

Berpijak dari pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus segera memformulasikan

kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural agar menjadi*blueprint* atau pedoman bagi kampus Islam terutama pedoman bagi para dosen untuk dapat mengajarkan pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai keislaman saja tetapi juga memberi penanaman akan nilai-nilai toleran dan kemanusiaan agar tercipta iklim kampus yang moderat dan humanis. Dengan adanya formulasi strategi deradikalisasi pendidikan Islam dengan pembentukan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural dapat menjadi basis pendidikan budaya (etnopedagogi) yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran masyarakat Indonesia seperti pembentukan sikap toleran, sopan santun, dan memiliki moralitas yang tentunya sejalan dengan Islam sebagai agama yang rahmat bukan laknat, dan agama yang mengajarkan keselamatan, cinta kasih, dan keramahan bukan kemarahan.

2. Melakukan implementasi strategi dengan menghadirkan pendidik yang berparadigma inklusif-multikultural dalam pembelajaran agama Islam

Setelah merumuskan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural, maka stratetegi selanjutnya adalah mengimplementasikan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural yang tentunya melalui instruksi Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sentral pimpinan pusat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sehingga semua kampus Islam dapat menerapkan kurikulum pendidikan Islam inklusif multikultural agar dapat beroperasi secara menyeluruh. Reorientasi pendidikan Islam inklusif multikultural sangat penting untuk segera diterapkan mengingat derasnya arus radikalisme atas nama agama Islam yang kini mulai bersarang di kampus Islam.Diektorat Pendidikan Islam pernah melakukan *short course* dengan mengirim 42 orang guru agama ke Australia untuk memahami praktik multikultural sekaligus pendidikan anti radikalisme pada tahun 2015 lalu. Hal ini patut diapresiasi, namun sebenarnya, Indonesia sedari dulu punya nilai-nilai multikulturalisme yang memang perlu dihidupkan kembali, karena budaya ketimuran masyarakat Indonesia sudah lama ada dalam salah satu pilar bangsa ini yaitu Bhineka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Direktorat Pendidikan Islam perlu menghidupkan kembali pendidikan inklusif multikultural itu dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan Islam inklusif multikultural kepada dosen-dosen agama

Islam dalam bentuk pelatihan, workshop, seminar, bahkan melakukan proses hipnotherapi bhineka tunggal ika dalam aspek kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan *live in* dengan mengenal budaya dan nilai-nilai kearifan lokal budaya lain sehingga memiliki pemahaman akan pentingnya perbedaan dalam keberagamaan serta menghormati dan menghargai agama dan budaya orang lain dalam bingkai keindonesiaan.

Senada dengan hal di atas, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda berinisial BT, menuturkan bahwa:

> "Yang namanya ideologi radikalisme tentunya tidak nampak secara kasat mata, tetapi dampak yang disebabkan oleh radikalisme ini sungguh amat nyata dan meresahkan. Apalagi kampus Islam memang tepat tumbuh suburnya radikalisme agama, mengingat setiap dosen dan mahasiswa yang masuk ke kampus-kampus Islam memiliki corak keagamaan yang beragam. Untuk itu, upaya memberikan pemahaman akan persepsi keislaman yang moderat tentunya harus memiliki pedoman yang bisa dijadikan rujukan dalam setiap proses pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultrual memang sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada para dosen agama Islam terutama dosen yang background pendidikannya berasal dari Mesir, Arab Saudi, Yaman, dan lainnya sehingga dengan adanya implementasi pedoman kurikulum yang berbentuk bahan ajar itu menjadi pegangan dalam menyampaikan materi keislaman tanpa adanya unsur tendensi membenturkan dengan konsepsi negara. Tentunya untuk memberikan dan mengembalikan pemahaman dosen alumnus Timur Tengah ini tidak mudah, namun upaya-upaya itu perlu dilakukan seperti melaksanakan kegiatan workshop, pelatihan, dan ikrar wawasan keislaman dan kebangsaan merupakan ikhtiar untuk memberikan pemahaman kepada para dosen pendidikan Islam agar memiliki paradigma yang moderat, sehingga dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang tidak hanya cerdas secara agama tetapi bijak dalam menghargai perbedaan demi tegaknya *ukhuwah Islamiyah*, *basyariah*, dan *wasathiyah*.

Senada dengan ungkapan di atas, mahasiswa IAIN Samarinda berinisial MR, menuturkan bahwa:

> "Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harusnya menetapkan dan mensegerakan terbitnya buku pedoman pendidikan Islam inklusif-multikultural, sehingga dengan adanya buku pedoman baik pegangan dosen dan mahasiswa sehingga pembelajaran dapat terukur dengan baik. Tentunya perumusan buku pedoman ini tidak hanya mengajarkan bagaimana caraberislam yang baik tetapi juga perlu memasukkan nilai-nilai atau contoh kasus toleransi antar umat beragama. Meskipun di kampus Islam sudah dibentuk Pusat Studi Pancasila tetapi perlu juga adanya buku-buku ajar yang tidak hanya berwawasan keislaman tetapi juga berwawasan kebangsaan, sehingga pemahaman mahasiswa dalam mereduksi pembelajaran agama tidak timpang dan "gagal paham" terhadap agamanya sendiri. Karena saat ini banyak buku-buku bernuansa Islam yang marak beredar di dunia kampus yang pada dasarnya merupakan buku para penulis tarbawi, tahriri dan salafi. Saya sendiri sering mendapatkan adanya buku-buku di perpustakaan yang mengandung unsur radikalisme seperti ingin khilafah Islamiyah di zaman kenabian dan sahabat dikembalikan lagi demi tegaknya Islam di muka bumi, yang terkadang cenderung bernuansa menyudutkan para pemimpin bangsa sebagai "kambing hitam" untuk memancing emosi pembaca agar mendukung misi mulia yang mereka tawarkan itu. Jadi, solusinya menurut saya adalah, setiap dosen harus dibekali dengan pemahaman inklusif multikultural dan juga didukung dengan ketersediaan bahan ajar yang berwawasan keislaman dan kebangsaan agar tercipta keshalihan individual dan keshalihan sosial dalam diri mahasiswa/mahasiswi."

Ungkapan lain juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syar'ah (STIS) Samarinda, yang berinisial MM, ia mengungkapkan bahwa:

> "Radikalisasi agama banyak ditemukan karena banyaknya beredar buku bacaan yang berbau ideologi Islamis yang secara tidak langsung mampu menjawab problematika kaula muda

masa kini. Apalagi mengenai konsep "hijrah" yang sekarang menjadi ternding topic masyarakat Indonesia. Upaya berbenah diri menjadi pribadi yang baik yang kemudian ditampakkan dari cara berpakaian yang lebih syar'i. Tentunya penulis Islamis populer ini tidak mempunyai hubungan intelektual yang kuat dengan tradisi intelektual ulama. Keberhasilan mereka dalam pasar wacana keislaman banyak dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mentransformasikan ajaran agama ke dalam bahasa populer masa kini, keluar dari gaya bahasa teks keagamaan klasik. Mereka mengemas konten keagamaan dengan cara mengkomunikasikan kelebihan personal mereka dengan psikologi audiens (pembaca). Mereka mem-*branding* dengan berbagai cara seperti aktivis masjid (seperti Salim A. Fillah), Alumnus Timur Tengah (seperti Habiburrahman El Shirazy), pegiat filantropi (seperti Yusuf Mansur), ataupun berlatar belakang muallaf (seperti Felix Y. Siauw). Sebagai strategi melawan radikalisme atas nama Islam ini maka perlu bagi para dosen sebagai peneliti menelurkan karya-karya mereka dalam bentuk buku bernuansa Islam rahmatan lil alamin yang juga dikemas secara populer agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami Islam sebagai agama yang ramah bukan marah, juga bukan agama yang menyukai jalur kekerasan dan intoleransi terhadap agama lain atau bahkan agamanya sendiri yang mereka anggap sesat. Buku-buku tersebut dapat dirumuskan dengan memasukkan nilai-nilai toleransi ke dalam setiap mata pelajaran keislaman seperti Al-Qur'an, Fiqh, Akidah, Akhlak, SKI dan berbagai mata kuliah agama Islam sehingga mahasiswa memiliki paradigma Islam moderat yang bisa menghargai perbedaan di tengah keberagamaan. Salah satu contoh, mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) bisa disusun dengan menintegrasikan nilai-nilai budaya ketimuran seperti toleransi, tolong menolong, sopan santun, dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi, jangan salahkan ketika mahasiswa banyak terpapar paham radikal karena bahan bacaan mereka merupakan tulisan-tulisan hasil karya para penulis Islamis populer bernuansa Timur Tengah bukan Islam

nusantara yang selalu mengajarkan kedamaian dalam perbedaan dan persaudaraan."

Kemudian, dosen Universitas Nahdlatul Ulama berinisal JK, juga menuturkan bahwa:

"Dosen memiliki peranan yang besar dan strategis terhadap terciptanya pemahaman agama yang setengah atau komprehensif. Bahkan corak keagamaan dosen sedikit banyaknya akan masuk dalam pembelajaran agama yang disampaikannya. Ketika si dosen memiliki pemahaman dakwah tarbawi, tahriri, dan salafi maka paham-paham keagamaan ini akan cenderung terselipkan dalam pembelajaran. Untuk itu, rektor sebagai pusat pimpinan tertinggi di kampus perlu mendelegasikan kepada para wakilnya untuk melakukan tes akademik baik tertulis maupun lisan dalam setiap seleksi penerimaan dosen mengenai wawasan keislaman dan kebangsaan. Dengan begitu, akan nampak corak keagamaan para dosen yang diujikan secara selektif dan seefektif mungkin demi terciptanya para dosen yang memiliki paradigma moderat. Ketika semua dosen telah dinyatakan lulus, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan ikrar Pancasila sebagai ideologi negara. Serta dalam setiap perjanjian kontrak ada kesepakatan untuk tidak melakukan upaya-upaya menggulingkan ideologi Pancasila dengan muatan-muatan pembelajaran di kelas, apalagi sampai adanya statmen ingin mendirikan *khilafah Islamiyah*. Jika hal itu sampai terjadi maka dosen bersangkutan bersedia menerima konsekuensinya. Mengapa hal itu perlu diberlakukan karena dosen merupakan sumber belajar yang strategis dalam menyemaikan ideologi Islamis populer kepada mahasiswa. Untuk itu, kampus Islam perlu melaunchingkan kurikulum dan perangkat belajar yang berwawasan keislaman dan kebangsaan agat tercipta keharmonisan dan kerukunan demi terciptanya iklim kampus yang damai dalam bingkai kebihinekaan.

Ungkapan senada juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) yang berinisial AW, ia menuturkan bahwa:

"Untuk dapat membebaskan iklim kampus dari berbagai paham radikal, maka perlu menghadirkan pendidik (dosen) yang memiliki paradigma inklusif multikultural dalam pembelajaran agama Islam. Agar mendapat pendidik yang memiliki paradigma moderat maka dibutuhkan pengelolaan sistem seleksi yang smart sehingga dapat menemukan para dosen yang memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan, melakukan sistem pelatihan, seminar dan workshop mengenai wawasan keislaman dan kebangsaan, serta mengoptimalkan pusat studi pancasila di kampus guna sebagai media rehabilitasi atau klinik ideologi bagi para dosen yang terpapar paham radikal. Tentunya hal ini membutuhkan keterlibatan segenap pihak dalam mensukseskan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang moderat dan humanis. Di STAIS sendiri kita juga melakukan penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan serta melakukan berbagai pelatihan dan seminar guna memberikan pemahaman kepada para dosen agar dapat mengajarkan materi keislaman tanpa melupakan bumi yang kita pijak dengan ideologi Pancasila yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang besar dan beranekaragam ini"

Senada dengan ungkapan di atas, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA) berinisial YM, juga menuturkan bahwa:

"Membangun argumen keislaman atas prinsip kewargaan adalah pentingnya menghormati prinsip kebebasan beragama. Di STITBA sendiri banyak pemandangan unik di mana ketika mahasiswa melakukan KKN di tempat yang mayoritas beragama lain, mereka sebagai mahasiswa Islam tetap saling menjaga sikap untuk saling menghormati dan bertoleransi terutama dalam urusan ibadahnya masing-masing. Bahkan dalam hubungan sosial, ketika masyarakat Dayak membangun gereja tempat mereka beribadah, mahasiswa kami turut serta membantu, begitu mahasiswa kami mengalami kesusahan dalam urusan ibadah, dengan ringan tangan masyarakat tempatan yang hampir mayoritas non muslim itu membantu menyediakan tempat mereka beribadah. Ini tentunya sebuah pemandangan yang unik yang pernah dialami mahasiswa kami. Terus terang,

kami dosen-dosen di sini senantiasa mengajarkan kepada mahasiswa tentang tiga akhlak yang harus tertanam dalam jiwa yaitu akhlak kepada Allah, kepada manusia dan kepada alam semesta. Karena urgensi penciptaan manusia selain untuk beribadah dan menjadi pemimpin juga dapat bermanfaat bagi manusia yang lainnya tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya.Dosen yang baik dan bijak seharusnya memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk dapat memiliki toleransi terutama dalam urusan sosial kemasyarakatan dan menghargai keyakinan agama lain. Begitu juga ketika di kampus, mahasiswa harus diajarkan untuk dapat berpikir kritis (*critical thinking*) juga memiliki wawasan yang luas—bukan sempit, sehingga tidak gampang menghina dan menuduh agama lain sesat dan bahkan mengkafirkan orang di luar kalangan mereka. Ini tentunya bisa merusak persatuan dan kerukunan antar umat Islam itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya pengelolaan dan penguatan kepada para dosen dan mahasiswa dengan sering melakukan diskusi-diskusi agama yang efektif dan dengan bahasa yang ringan agar mudah dimengerti oleh mahasiswa dalam menerapkan Islam*rahmatan lil 'alamin*.

Senada dengan ungkapan di atas, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang yang berinisial AJ, menuturkan:

"Radikalisme atas nama agama (Islam) menjadikan kampus Islam sebagai tempat bersembunyi, karena selama ini pusat perkembangan mereka sering terjadi di kampus-kampus umum yang biasanya berpusat di masjid kampus, seperti pemandangan yang terjadi di IPB, UGM, UM, UB, dan Unmul serta berbagai kampus umum lainnya. Mengapa di kampus umum? karena mereka memang mengincar mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kurang dan bahkan minim terhadap agama Islam. Sehingga, perkembangan mereka begitu massif. Namun, sekarang keberadaan mereka mulai terusik sehingga kampus Islam merupakan tempat pelarian yang strategis mengingat kampus Islam adalah tempat yang mereka anggap sebagai "rumah mereka" atau "keluarga mereka", yang tidak

mungkin mereka mendapatkan perlawanan yang terjadi di kampus umum. Namun, mereka tidak sadar bahwa kampus Islam saat ini sudah mengetahui pergerakan mereka, sehingga Direktorat Pendidikan Agama Islam saat ini memberlakukan suatu upaya untuk memberantas paham radikalisme yang kini sudah bercokol di kampus Islam dengan berbagai strategi dan metodologi seperti pendidikan anti radikalisme, etnopedagogik, pendidikan Islam inklusif-multikultural, pendidikan Islam berwawasan Pancasila, dan deradikalisasi berbasis pendidikan Islam moderat. Untuk itu, saya selaku dosen menghimbau bahwa STIT Syam Bontang sudah melakukan berbagai tahapan dalam meangkal radikalisasi agama dengan mengoptimalkan pembelajaran agama yang moderat sehingga dengan sendirinya akan mampu menangkal gerakan radikalisme di kampus ini. Tentunya dengan berbagai macam pendekatan tertentu dan strategi tertentu pula yang dalam hal ini memberikan pelatihan kepada para dosen agama Islam khususnya tentang wawasan kebangsaan sehingga tercipta paradigma yang moderat dan juga mampu melahirkan mahasiswa yang moderat pula." Memang sangat sulit mengusir ideologi radikalisme dalam "tubuh" kampus Islam, mengingat yang namanya ideologi itu tidak nampak sehingga butuh yang namanya berbagai ruang diskusi dan tentunya mengaktifkan pusat studi Pancasila, dan dosen agama menggunakan masjid sebagai pusat pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Dengan begitu, gerakan radikal yang berbasis di masjid kampus tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam menyemaikan ideologinya."

Senada dengan ungkapan di atas, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun Nunukan yang berinisial ME, juga menuturkan bahwa:

"Radikalisme memang sulit untuk diketahui pergerakannya, apalagi ideologinya. Mereka pintar berbaur dengan masyarakat sehingga sulit melacak keberadaan mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka sering melakukan media gerakan dakwah di masjid atau mushola kampus melalui lembaga dakwah kampus

(LDK) atau Pusat Studi Mahasiswa (PUSDIMA) yang kini menjadi label atas eksistensi mereka. Terus terang di STIT Ibnu Khaldun Nunukan sendiri memang dulu ada saya temui dosen ataupun mahasiswa yang terpapar radikalisme, akan tetapi dengan adanya penguatan organisasi mahasiswa melalui PMII dan HMI di kampus ini, sehingga sangat sulit dimasuki oleh paham radikalisme. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa aliran radikalisme ini bisa bermain secara soft tanpa sepengetahuan kita. Untuk itu, kami selaku dosen sudah melakukan berbagai bentuk kegiatan yang dapat menjadi tameng penghalang yang kuat terhadap gerakan radikalisme yaitu dengan melakukan gerakan bela negara dan pendiidkan anti radikalisme, mengingat kami berada di wilayah perbatasan yang sangat rawan akan gerakan radikalisme kiriman dari negeri tetangga maupun dari dalam negeri sendiri. Memang saya juga berharap Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, segera menerapkan kurikulum pendidikan Islam berwawasan inklusif multikultural serta membagikan buku pedoman bahan ajar untuk dapat disebarkan ke seluruh kampus Islam sehingga memiliki corak pendidikan keagamaan yang moderat. Saat ini, kami sudah berupaya menyusun berbagai modul pendidikan Islam seperti mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Akidah, Akhlak, Fiqh, SKI dan mata kuliah lainnya dengan memasukkan muatan-muatan nilai toleransi, pluralisme, dan humanism, sehingga dosen selain melakukan penanaman nilai-nilai agama juga mengajarkan untuk bisa menghormati dan menghargai orang lain dan juga cinta terhadap negaranya.

Kemudian ungkapan lain juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Anshar Bulungan berinisial AS, ia mengungkapkan bahwa:

"Radikalisme atas nama agama (Islam) kini menjadi wacana baru di luar kerangkan organisasi Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Gerakan dakwah Islam baru ini seperti Ikhwanul Muslimin (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Salafi (Wahabi) kini banyak mencari "mangsa" di kampus-kampus Islam, tak terkecuali

di STIT Al-Anshar Bulungan. Yang namanya ideolig itu pasti berkembang dan akan dengan mudah menemukan massanya. Apalagi jika pondasi keagamaan di kampus tidak begitu kuat maka hal ini menjadi peluang mereka untuk menyemaikan ideologi radikal mereka. Untuk itu, saya bersama rekan dosen melakukan berbagai diskusi untuk menyusun sebuah format baru pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an secara tekstual tetapi juga mengkaji Al-Qur'an secara kontekstual dalam setiap pembelajaran. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahun terbesar yang dimiliki oleh umat Islam untuk dikaji dan diteliti dalam menyelesaikan seluruh problematika umat termasuk permasalahan radikalisme ini. Islam tidak menganjurkan dan mengajarkan kekerasan, bahkan sebaliknya Islam mengajarkan keramahan dan kedamaian. Untuk itu, kami selalu menghidupkan forum-forum diskusi keagamaan dan kebangsaan di kampus, agar mahasiswa bisa selalu mendapatkan wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, sehingga hal ini mampu membatasi mereka dalam mereduksi pembelajaran agama yang bersumber dari "ulama" Islamis ataupun ulama digital sosial media yang kini banyak menyesatkan pemikiran umat, tanpa adanya pengayaan kitab hanya berasumsi pada kelebihan mereka beretorika secara personal untuk menghipnotis kalangan mahasiswa yang memiliki kedangkalan terhadap pemahaman agamanya. Yang jelas kami sudah melakukan upaya-upaya dan strategi dalam menangkal gerakan radikalisme agama di kampus ini. Tidak hanya itu, kami para dosen juga menghidupkan kreativitas pembelajaran dengan mendesain pembelajaran menggunakan media video menarik dengan menampilkan berbagai macam contoh gerakan radikalisme, serta mengajarkan indahnya berislam dalam kebhinekaan serta menerapkan strategi pembelajaran pendidikan Islam yang inklusif-multikuktural."

Berpijak dari berbagai pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kampus Islam sudah banyak yang melakukan upaya-upaya dalam menangkal gerakan radikalisme yang dilancarkan oleh berbagai organisasi Islam seperti gerakan dakwah haraki tarbawi

(seperti PKS), gerakan dakwah tahriri (seperti HTI), dan gerakan dakwah Salafi (seperti Wahabi). Implementasi strategi yang dilakukan kampus-kampus Islam yang ada di Kalimantan Timur dan Utara ini yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan seminar yang berwawasan keislaman dan kebangsaan, menghidupkan kembali Pusat Studi Pancasila sebagai wadah klinik rehabilitasi bagi yang terpapar radikalisme, menyusun modul bahan ajar pendidikan Islam yang bermuatan nilai-nilai toleransi, pluralitas, humanis, dan nasionalisme, melakukan penguatan bela negara sebagai wujud menolak berbagai bentuk upaya gerakan radikalisme, pendidikan anti radikalisme, melaksanakan pendidikan etnopedagogik, dan aktif melakukan diskusi-diskusi keagamaan dan kebangsaan sebagai bentuk menangkal berbagai media dakwah gerakan radikal berkembang di kampus Islam.

3. Melakukan evaluasi strategi deradikalisasi pendidikan Islam dengan mengontrol keefektifan pembelajaran agama Islam inklusif-multikultural

Tidak hanya pada tataran aplikasi dan implementasi deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural saja, tetapi juga perlu evaluasi strategi dalam mengontrol sejauh mana pengelolaan keefektifan pembelajaran agama Islam yang inklusif multikultural di kampus-kampus Islam. Tentunya dalam setiap penerapan tidak semuanya akan berjalan sesuai harapan, pasti ada kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti sebagai bentuk deradikalisi berkelanjutan. Program deradikalisasi yang kini mulai ditempuh oleh kampus-kampus Islam adalah dengan menerapkan kurikulum berbawasan keislaman dan kebangsaan yang berparadigma inklusif-multikultural. Penerapan kurikulum ini mendapatkan dukungan dari semua pihak kampus Islam. Karena mengingat maraknya gerakan radikalisme yang saat ini bersarang di kampus Islam, salah satu strategi penguatan dari dalam yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural. Dari berbagai kampus yang menerapkan itu, ada beberapa kendala yang harus segera ditindaklanjuti agar lubang-lubang kosong ini dapat segera ditutup sehingga tidak menjadi peluang bagi gerakan radikalisme yang kini tidak menemukan ruang gerak yang bebas lagi dalam menyemaikan ideologinya. Hal ini sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh dosen IAIN Samarinda yang berinisial ZR, ia menuturkan bahwa:

"Penerapan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural ini memang sudah berjalan secara baik dan efektif. Namun, ada beberapa kekurangan dan kendala yang timbul karena adanya benturan perebutan identitas yang terjadi di dalam kampus sendiri. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi gerakan dakwah radikal untuk masuk melewati lubang-lubang terselubung ini untuk menyusup masuk menyemaikan ideologinya. Bahkan ada beberapa dosen yang memang kelompok gerakan dakwah tarbawi, tahriri, dan salafi masuk dan mampu menyesuaikan diri sehingga tidak nampak bahwa ia adalah gerakan dakwah yang kini luput dari perhatian, sehingga bisa menjadi boomerang dalam merusak sistem tatanan perilindungan yang telah dibangun. Tentunya hal ini butuh strategi baru—dalam artian strategi A gagal, kemudian beralih ke strategi B yang telah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala dan hambatan yang timbul. Terus terang, IAIN Samarinda ini masih belum berani secara tegas melarang penggunaan cadar, mengingat tragedi pelarangan cadar yang dilakukan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga yang kontroversi yang kini sudah melakukan pencabutan surat pelarangan. Seharusnya institusi harus tegas dalam hal ini, karena kampus merupakan institusi resmi yang didalamnya tidak diperkenankan menggunakan ornamen atau kostum yang tidak diresmikan seperti penggunaan sarung ketika proses pembelajaran, sama halnya dengan penggunaan cadar, dengan analogi itu saya rasa pelarangan cadar yang menjadi gerakan simbolik yang kini turut mewarnai kampus ini perlu dipertimbangkan dalam bentuk aturan kampus. Dalam riset yang pernah saya lakukan, kebanyak mahasiswi kami yang menggunakan cadar ketika ditanya memiliki jawaban yang beranekaragam terhadap cadar yang dikenakannya, ada yang mengatakan karena mereka sering mengikuti kajian-kajian keislaman yang mengajak mereka untuk "hijrah", ada juga yang karena anjuran dari kalangan keluarga, bahkan yang lebih lucu ada yang mengatakan karena modis dan trendi busana muslimah masa kini. Tentunya hal ini harus dipikirkan bersama mengenai tata tertib aturan perpakaian di dalam

kampus harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika tidak mengindahkan akan mendapatkan konsekuensi yang tentunya telah menjadi kesepakatan bersama para orangtua ketika anaknya mendaftarkan diri."

Senada dengan penuturan di atas, mahasiswi IAIN Samarinda yang berinisial DR, juga menuturkan bahwa:

"Tidak semua bentuk gerakan radikalisme Islam itu dapat dinilai dari bentuk dan cara berpakaian seseorang. Saya tidak setuju dengan adanya pelarangan cadar di kampus Islam. Pihak kampus seyogyanya melakukan klarifikasi kepada kami yang bercadar, saya bercadar bukan berarti saya radikalisme dan terorisme, bisa saja mereka bercadar memang hidup dalam keluarga pesantren yang bercadar. Namun, saya juga tidak sepaham dengan adanya budaya cadar dijadikan sebagai modis, hal ini secara tidak langsung membuat citra cadar ini semakin dicap buruk. Namun, jika pihak kampus memberlakukan sistem peraturan pelarangan cadar mestinya harus didukung dengan landasan yang jelas dan logis. Sehingga aturan ini bisa kami terima dengan besar hati. Saya berasal dari keluarga nahdliyin, alasan saya bercadar, karena ada cacat di wajah saya yang harus saya tutupi sehingga tidak menjadi bahan olokan teman-teman saya. Mungkin ada sedikit kebijakan tentang pelarangan cadar dengan melihat modus penggunaan cadarnya dahulu sebelum menetapkan pelarangan dalam bentuk aturan kampus."

Ungkapan lain juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda, yang berinisial KL, ia mengungkapkan bahwa:

"Salah satu bentuk program deradikalisasi pendidikan Islam inklusif-multikultural adalah tidaklah hanya dilihat dari penggunaan busana saja, meskipun terkadang busana ini menjadi simbol gerakan mereka. Oleh karena itu, harus kita evaluasi mengenai adanya pelarangan busana syar'i dan budaya cadarisme (niqob) di dalam kampus. Hal ini terkadang menjadi boomerang untuk kampus Islam sendiri, dengan dalih kok kampus Islam melarang mahasiswinya menggunakan busana syar'i dan cadar. Seharusnya kampus Islam tidak melarang

penggunaan busana syar'i itu karena Islam menganjurkan muslimahnya untuk menutup aurat. Jika institusi kampus Islam ini tidak bisa bersikap bijak dalam menyikapi keputusan dalam bentuk aturan kampus, maka hal ini bisa menjadi alat untuk melakukan berbagai benturan atas kepentingan politik agama kelompok radikalisme. Untuk itu, pihak terkait yang memiliki fungsi dalam mengambil kebijakan tertentu perlu melakukan pertimbangan dengan argumentasi yang berdasar dan jelas. Titik pangkalnya sebenarnya bukanlah di penggunaan busana syar'i, akan tetapi lebih kepada bagaimana deradikalisasi pendidikan Islam inklusif-multikultural ini bisa "membumi" di kampus Islam dengan merubah cara pandang mereka untuk bisa menjalankan syariat Islam tanpa meninggalkan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa yang berbudaya ketimuran yang kental akan sikap saling menghormati dan menghargai, serta memiliki rasa kepedulian dan toleransi yang tinggi kepada sesama."

Selanjutnya, ungkapan lain juga datang dari dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur yang berinisial NK, ia menuturkan bahwa:

"Program deradikalisasi dengan diterapkannya kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural, tentu tidak lepas dari kekurangan yang timbul semenjak diterapkan di kampus Islam. Biasanya permasalahan yang timbul adalah kekurangsadaran para dosen terhadap strategi lain akan ideologi yang mereka semaikan, tidak hanya menggunakan media dakwah di dunia nyata saja melalui dakwah bil lisan dan dakwah bil qalam dengan beredarnya buku-buku berideologi radikalisme tetapi juga mereka merubah bentuk strategi sasaran mereka melalui media sosial dengan memanfaatkan internet sebagai basis penyemaian ideologi mereka baik berbentuk ujaran kebecian dengan menggunakan teks tulisan, quotes, maupun video-video tausiyah yang mereka sebarkan ke seluruh fitur media sosial. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi pendidikan Islam inklusif-multikultural sudah seharusnya menggunakan media

sosial agar penyebaran paham radikalisme yang kini banyak meracuni pola pikir generasi muda bisa dinetralkan kembali dengan banyaknya konten tulisan dan video Islam moderat bersebaran di media sosial. Dengan begitu, generasi muda tidak mudah terpapar ideologi radikal, sehingga ketika ada dua unsur konten tulisan deradikalisasi akan membuat generasi muda berpikir kritis dan tidak mudah terperdaya oleh bujuk rayuan gerakan radikalisme."

Ungkapan senada datang dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) berinisial AN, ia menuturkan bahwa:

"Program deradikalisasi pendidikan Islam inklusif-multikultural memang sudah efektif diterapakan di berbagai kampus Islam. Namun, perlu dievalusi kembali bahwa saat ini gerakan radikalisme ini tidak membatasi pergerakannya di dunia nyata tetapi mereka saat ini lebih aktif melakukan radikalisasi-doktrinasi menggunakan akses internet dengan berbagai fitur aplikasinya seperti facebook, instagram, twitter, dan youtube yang saat ini menjadi mainan anak muda dalam mengakses informasi teknologi dan juga menjadi media belajar apa saja termasuk masalah keislaman. Sehingga, ketika program deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural juga harus digalakkan secara menyeluruh baik melalui media nyata maupun media maya sebagai bentuk kotra radikalisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang diseleksi dalam program duta anti radikalisme media sosial yang tentunya bertugas untuk mem-viral-kan berbagai macam konten pendidikan Islam inklusif multikultural melalui media sosial baik melalui facebook, twitter, instagram, wahtsApp, maupun youtube. Dengan begitu, ruang-ruang mereka dalam menyemaikan ideologi radikalisme ini dapat tertutup dengan semakin banyaknya agen duta anti radikalisme media sosial ini."

Kemudian, ungkapan senada juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA), yang berinisial DF, ia menuturkan bahwa:

"Deradikalisasi pendidikan Islam inklusif-multikultural ini ketika kita evaluasi mengalami kendala pada ranah media sosial. Kita benahi jaringan yang rusak di dalam kampus, ternyata mereka kini bertransformasi menggunakan internet untuk menyemaikan ideologi mereka. Pasalnya menggunakan internet mampu merekrut massa dalam jumlah yang besar dan tentunya murah dan tepat sasaran yaitu anak muda generasi bangsa. Sebagai langkah antisipasi dan tindaklanjut maka kampus-kampus Islam dapat membentuk duta anti radikalisme media sosial untuk dapat melawan gempuran ideologi radikal yang kini mulai menyasar kalangan milenial penyuka media sosial. Sehingga, mereka lebih cenderung belajar agama melalui media sosial tanpa adanya upaya penyaringan terhadap ideologi dan doktrinasi yang masuk ke pusat saraf mereka. Maka dari itu, duta anti radikalisme media sosial harus segera dibentuk untuk menjadi sarana kontra radikalisasi yang kini sudah banyak mempengaruhi kalangan milenial pengguna terbesar sosial media sehingga dengan adanya duta anti radikalisme media sosial ini dapat melawan berbagai ideologi radikal yang bersemayam dan berselancar bebas di dunia maya."

Kemudian, ungkapan senada juga datang dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang yang berinisial EG, ia menuturkan bahwa:

"Kekurangan dari program deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural ini cenderung masih berkutat pada tataran dunia nyata. Gerakan Islam tarbawi, tahirir, dan salafi kini sudah menyasar media sosial untuk menyamaikan ideologinya, mengingat hampir mayoritas penggunakan media sosial adalah generasi milenials yang masih labil dan mudah untuk didoktrinasi dengan berbagai konsep strategi yang gerakan radikalisme kemas dengan disesuaikan dengan bahasa dan gaya anak muda agar lebih populer dan mudah diserap oleh generasi milenials. Untuk itu, dosen-dosen dan mahasiswa Islam moderat harus juga menggunakan media sosial untuk dapat membekukan berbagai doktrinasi yang

mereka sebarkan dan tawarkan kepada generasi milenials dengan menawarkan konsep Islam moderat yang rahmatan lil alamin, yang tentunya dibutuhkan kerjasama dari dosen dan mahasiswa agar melek teknologi dan menggunakan media sosial sebagai media amal dalam melawan gerakan radikalisme yang ingin menghancurkan ideologi negara dengan konsep khilafah Islamiyah yang mereka tawarkan setiap saat dengan membuat skenario dan membangkitkan suasana semangat kelabilan Islam dengan membenturkannya dengan rezim pemerintahan yang thogut dan sesat sehingga hal ini memunculkan keprihatianan dan kepedulian generasi milenial media sosial dewasa ini. Maka dari itu, mahasiswa Islam harus mampu menjadi agen duta anti radikalisme media sosial untuk melakukan berbagai upaya dan strategi kontra radikalisme sehingga memberikan perspektif yang berbeda untuk dapat menggali nalar keritis generasi milenial media sosial untuk dapat membedakan bahwa Islam itu agama ramah bukan marah dan menyukai ujaran kebencian dan kekerasan."

Senda dengan ungkapan di atas, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun Nunukan berinisial HL, menuturkan bahwa:

"Ketika kami menjalankan berbagai proses deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural, banyak mengalami peningkatan deradikalisasi khususnya di kalangan mahasiswa yang terpapar radikalisme. Namun, setelah kami lakukan pemantauan lebih lanjut, radikalisasi yang dilakukan oleh gerakan dakwah Islam ini menempuh jalur lain untuk menyemaikan doktrinasi ideologinya dengan menggunakan media internet. Media internet dengan kemudahan generasi milenial dalam memiliki android sehingga penggunaan media sosial menjadi lahan subur untuk menyemaikan ideologi radikal mereka guna menghimpun jumlah massa yang besar, mengingat pengguna media sosial terbesar adalah generasi milenials. Untuk itu, para dosen bersama dengan mahasiswa dapat melakukan kontra radikalisme dengan membentuk duta anti radikalisme media sosial, sehingga dengan begitu dapat

memperlambat arus radikalisme ini bahkan kalau perlu dapat menangkal radikalisme internet ini beredar di media sosial. Tentunya, hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan sebayak mungkin konten tulisan dan video mengenai Islam radikal berbahaya dan membeberkan ciri-cirinya, serta menyemaikan paradigma Islam rahmatan lil alamin. Dengan begitu, gerakan Islam radikal ini tidak hanya terputuskan dari dunia nyata juga dari dunia maya. Bisa juga melakukan pelaporan kepada pihak berwenang ketika ada akun radikal yang beredar untuk segera di blokir.

Senada dengan ungkapan di atas, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Anshar Bulungan yang berinisial CK, ia mengungkapkan bahwa:

"Saat ini deradikalisasi tidak hanya dilakukan di dunia nyata tetapi juga melalui dunia maya. Permasalahan aliran keagamaan memang paling sensitif. Namun, perlu adanya pemahaman keagamaan yang komprehensif kepada generasi muda bahwa Islam itu agama yang menghargai perbedaan dan menyukai perdamaian bukan agama yang menyukai kekerasan. Dewasa ini gerakan radikalisme atas nama agama Islam kini sudah menyasar berbagai aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, twitter, whatsApp, dan youtube untuk menyemaikan wacana ideologi radikal yang mereka tawarkan dengan konsep Islam populer dan menyentuh kalangan milenials. Berbagai tema diskusi pun disuarakan seperti tema "hijrah ekstrem" dan adanya propaganda penggiringan opini bahwa negara ini penuh dengan masalah dan solusinya hanya dengan ditegakkannya khilafah Islamiyah. Padahal tidak ada dasar yang kuat mengenai khilafah yang mereka tawarkan yang justru akan menimbulkan perpecahan sebagaimana yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Untuk itu, perlu adanya kontra radikalisasi dengan membentuk duta anti radikalisme yang bertugas menyebarkan tulisan tentang keburukan dan sejarah kelompok radikal, sehingga dengan begitu generasi milenial bisa lebih bijak dan kritis menelusuri rekam jejak kelompok radikal ini. Dengan begitu, program deradikalisasi berbasis media sosial dapat

berjalan dengan efektif sehingga akan tercipta generasi milenial yang tetap ramah dan bijak dalam merespon perkembangan teknologi yang kian berkembang semakin pesat."

Berpijak pada ungkapan di atas, maka peneliti dapat menarik benang merahnya bahwa deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural tidak hanya dilakukan dalam bentuk tindakan nyata di dunia nyata tetapi juga harus mampu melakukan pola deradikalisasi di dunia maya dengan membentuk agen duta anti radikalisme yang terdiri dari dosen dan mahasiswa sebagai motor penggerakknya dalam menyebarkan kontra radikalisasi dengan konten tulisan maupun video mengenai berbagai keburukan akan kedok kelompok radikalisme, dan juga menyebarkan bahwa Islam adalah agama yang rahamatan lil alamin bukan agama yang laknat yang menyukai jalur kekerasan. Sehingga dengan begitu, para pengguna media sosial dapat mengetahui dan menelusuri rekam jejak kelompok radikalisme ini yang memang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam Indonesia.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIK DERADIKALISASI

Maraknya aksi radikalisme atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad dalam Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam. lembaga pendidikan Islam di Indonesia semisal madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam tidak lepas dari tuduhan yang memojokkan tersebut. Lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah Islam ini sering kali diasosiasikan sebagai 'markas sentral pemahaman Islam yang sangat fundamental' yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal mengatasnamakan Islam.[126]

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu. Sejalan dengan menjamurnya ormas-ormas Islam pasca reformasi, pendidikan (tarbiyah) dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam. Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK, hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam dari berbagai jenjang pendidikan. Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan yang mereka anut adalah: (1) Khas Timur Tengah; (2) Leterlek dan harfiah dalam memahami Islam; (3) Mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab

126 Republika Newsroom, "Perlu Deradikalisasi Pemahaman Islam di Ponpes", Jumat, 6 Februari 2009' Lihat juga Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volum 1, No. 2 Desember 2012, hlm. 133.

seperti halaqah, dawrah, mabit, dan seterusnya.[127] Bahkan kegiatan Islamisme ini sering dilakukan di masjid-masjid sekolah berupa kegiatan kerohanian Islam (Rohis), hingga menjalar sampai kepada berbagai kampus-kampus Islam dengan maraknya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai lanjutan kajian-kajian mereka di perguruan tinggi, mengingat banyaknya anggota mereka di sekolah yang kini juga telah memasuki duni kampus. Strategi ini terus dilaksanakan akan doktrinasi keagamaan yang mereka tanam dapat tumbuh subur selamanya hingga menjadi kader-kader terbaik untuk menjadi ustadz yang siap untuk diterjunkan ke dalam skenario permainan mereka untuk mengajak sebanyak mungkin generasi muda agar masuk ke dalam organisasi mereka. Kegiatan-kegiatan di atas seperti halaqah, daurah dan mabit di satu posisi sangat efektif dan membantu kerja guru agama untuk menanamkan akidah dan syariat Islam. Namun, di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong siswa/mahasiswa untuk tidak toleran terhadap pihak lain.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa anak-anak sekolah dan mahasiswa menjadi target khusus rekriutmen kelompok radikalisme. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengumukakan bahwa beberapa penelitian membuktikan adanya upaya rekrutmen ke sekolah-sekolah hingga ke kampus-kampus dengan melakukan *brain washing* (cuci otak) terhadap pelajar, yang selanjutnya diisi dengan ideologi radikal tertentu. [128]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.[129] Di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam peneitian tentang kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan amar makhruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar

127 Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal" *Walisongo*, 20 (1) Mei 2012, hlm. 81.

128 Azyumardi Azra, "Rekrutmen Anak Sekolah", UIN Syarif Hidayatullah Jakaerta, Kamis, 28 April 2011, dalamhttp://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak-sekolah-.html.

129 Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam…,hlm. 81.

11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung sweeping, dan sisanya 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung sweeping beralasan bahwa kegiata sweeping sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung sweeping karena berpendapat aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%).[130]

Meskipun faktor kemunculan gerakan radikalisme begitu kompleks, namun merbaknya fenomena tersebut dapat menjadi cerminan PAI di negeri ini. harus diakui bahwa praktik pendidikan Agama Islam selama ini lebih bercorak ekslusivistik ketimbang inklusivistik. Artinya, pengajaran pendidikan agama Islam lebih menonjolkan pada klaim kebenaran agama sendiri dan menganggap agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan (*salvation and truth claim*) serta menganggap agama orang lain keliru dan tidak akan selamat.[131]

Oleh karena itu, menurut peneliti deradikalisasi Islam merupakan suatu keniscayaan. Upaya deradikalisasi pendidikan Islam dalam rangka membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalisir radikalisme Islam perlu menjadi kajian yang mendalam bagi para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia. Peneliti sependapat dengan dengan ungkapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nur Syam, bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun deradikalisasi agama melalui pendidikan. Dan untuk itu sangat diperlukan gerakan penerapan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural dan anti radikalisme di berbagai tingkatan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan anti radikalisasi agama ini.[132]

Adapun langkah-langkah manajemen strategik yang dapat ditempuh untuk dapat melakukan deradikalisasi pendidikan Islam berwawasan inklusif-multikultural di dunia kampus (khususnya kampus Islam) sebagaimana hasil riset yang ditemukan di 8 (delapan) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang ada di Kalimantan Timur dan Utara yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Samarinda, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sangatta (STAIS), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan

130 Abdullah Fadjar, dkk, *Laporan Penelitian Islam Kampus*, (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007), hlm. 35.

131 Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.31.

132 Nur Syam, "Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan", IAIN Sunan Ampel , dalam http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566 (26 April 2013).

(STITBA), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif (STITSYAM) Bontang, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Anshar Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

A. Kurikulum Berwawasan Keislaman Inklusif-Multikultural

Sebagaimana diketahui bahwa praktik dan proses pendidikan terutama yang berlangsung di lembaga pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai peran dalam membentuk watak dan perilaku setiap mahasiswa/mahasiswi. Karena itu, setiap proses pembelajaran, terlebih pendidikan agama Islam seharusnya kampus Islam dalam hal ini perlu memformulasikan strategi deradikalisasi dengan merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif-multikultural dengan meng-*insertcivic values* dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu mencetak output yang mempunyai kesadaran inklusif-multikultural dan menerapkannya dalam kehidupan sehar-hari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai komponen yang terlibat dalam proses pendidikan perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga mendukung terwujudnya gagasan tersebut. Dalam hal ini, yang perlu mendapatkan perhatian adalah faktor kurikulum, pendidik (dosen), dan strategi pembelajaran yang digunakan pendidik. Ini bukan berarti bahwa faktor lain kurang penting, namun ketiga hal ini merupakan unsur yang prioritas.[133]

Perumusan kurikulum pendidikan Islam yang bermuatan toleransi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Sebab, dewasa ini eskalasi kekerasan berbasis agama kian meningkat. Keberadaan kurikulum pendidikan Islam bermuatan nilai-nilai toleransi menjadi komponen yang penting lantaran menjadi pedoman bagi para pendidik dalam menyampaikan materi-materi tentang ajaran Islam yang menghargai keragaman dan perbedaan.[134]

Bertolak dari perspektif tersebut, maka dari segi kurikulum, sejak dini peserta didik harus diajarkan dan dibiasakan tidak hanya dengan materi pelajaran yang bersifat normatif-doktrinal-deduktif yang tidak ada hubungannya dengan konteks budaya, namun juga materi yang bersifat historis-empiris-induktif.[135]

133 Muqowim, "Mencari Pola Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural", *MDC Jatim*, I (3), Tahun II, Oktober 2004, hlm. 8.

134 Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan…, hlm. 229

135 Perlunya mempertimbangkan aspek budaya dalam membuat kurikulum ini ditegaskan oleh Peshkin. Lebih jauh lihat Alan Peshkin, "The Relationship Between Culture and Curriculum: A Many Fitting

Hal ini mengindikasikan perlunya perimbangan antara materi yang berupa teks dan konteks. Bahwa teks berisi ajaran normatif yang masih bersifat umum, sementara konteks berupa realitas empirik-faktual yang bersifat partikular. Persoalan seringkali muncul justru ketika teks berhadapan dengan realitas partikular yang heterogen tersebut. Karena itu, materi pelajaran justru harus berisi realitas yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, meskipun materi yang diberikan memuat teks-teks normatif, namun ia juga harus berisikan kasus-kasus konkrit di masyarakat sehingga anak sadar bahwa ia hidup dalam situasi nyata yang penuh perbedaan.

Dalam rangka membangun keberagamaan inklusif di sekolah ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang bisa dikembangkan dengan nuansa multikultural, antara lain: *Pertama*, materi al-Qur'an, dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu 1) Materi yang berhubungan dengan pengakuan al-Qur'an akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 48). 2) Materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9). 3) Materi yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan (Q.S. An-Nisa' [4]: 35).

Kedua, materi fikih, bisa diperluas dengan kajian fikih siyasah (pemerintahan). Dari fikih siyasah inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman Nabi, sahabat ataupun khalifah-khalifah sesudahnya. Pada zaman Nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multietnis, multikultur, dan multiagama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multietnis, multikultur, dan multiagama.

Ketiga, materi akhlak yang memfokuskan kajiannya pada perilaku baik-buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa tergantung pada akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak, punahlah bangsa itu. Dalam al-Qur'an telah diceritakan tentang kehancuran kaum Luth, disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Agar pendidikan agama bernuansa multikultural ini bisa efektif, peran guru agama Islam memang

Thing", dalam Philip W. Jackson, ed., Handbook of Research on Curriculum (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), hlm. 248-267

sangat menentukan. Selain selalu mengembangkan metode mengajar yang variatif, tidak monoton, dan yang lebih penting, guru agama Islam juga perlu memberi keteladanan.

Keempat, materi SKI (Studi Peradaban Islam), materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi.[136]

Dalam konteks inilah, di kampus misalnya, mahasiswa diusahakan secara gradual untuk dibebaskan dari sekat-sekat primordial dengan menekankan pendidikan agama yang berbasis pada pluralitas dan kebersamaan, sehingga metode pembelajaran yang dikembangkan bukan lagi indoktrinasi melainkan suasana dialogis. Siswa diajak "berekreasi" terhadap realitas pluralitas sekaligus sekaligus menggali nilai humanitas serta ditradisikan membangun kebersamaan dengan sesama. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan agama Islam mesti digagas dengan frame inklusivisme, yakni–meminjam bahasa Amin Abdullah– memperteguh dimensi kontrak sosial keagamaan dalam pendidikan agama.[137] Pendidikan agama berbasis inklusivistik- multikultural mesti hijrah dari moralitas individual ke moralitas publik; berusaha memutasikan Tuhan dari konsep utopis-metafisis menuju *landing to the earth* dan berusaha melakukan lokalisasi akidah dan desentralisasi fikih.[138]

Dengan demikian, penonjolan segi-segi persamaan dalam setiap agama, pengubahan orientasi pendidikan agama dari yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah ke arah orientasi pengembangan aspek universal-rabbaniyah, penekanan atensi pada nilai-nilai kemanusiaan dengan tanpa memandang atribut-atribut sosio- religius serta ikhtiar menghindari sikap egoisme dalam beragama sehingga tidak terjadi klaim diri sebagai yang paling benar[139] merupakan karakteristik substantif pendidikan Islam berbasis inklusif-multikultural.

136 Erlan Muliadi, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah", Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1) Juni 2012, hlm.65

137 Edi Susanto, "Pendidikan Agama", hlm. 788 Bahasan lebih elaboratif tentang ini periksa Muhammad Azhar, "Otonomi Keberagamaan di Era Multikultural", dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi, ed., *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: Pusat Studi Bahasa dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 109-114.

138 M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama*..., hlm. 138

139 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 151-152

B. Pendidik Yang Berparadigma Inklusif-Multikultural

Setelah aspek kurikulum, sosok pendidik yang berparadigma inklusif- multikultural juga perlu ditekankan dalam proses pembelajaran agama di sekolah. Sebab, sebaik apa pun materi yang telah diprogramkan dalam kurikulum, jika tidak dipahami dan disampaikan oleh pendidik yang kompeten, maka tidak akan fungsional. Untuk itu, penyiapan tenaga kependidikan, dalam hal ini guru (dosen) pendidikan agama, yang mempunyai paradigma pendidikan inklusif-multikultural harus dilakukan.

Dalam perspektif Ahmad Asroni, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan pendidik yang inklusif-multikulturalis. *Pertama*, menyelenggarakan berbagai training, workshop, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berwawasan multikultural kepada para pendidik (dosen). *Kedua*, menyelenggarakan dialog keagamaan dengan pendidik agama, pemuka, atau umat beragama lainnya. Dengan demikian, para pendidik agama Islam dan pendidik agama lainnya dapat berbaur dan mengenal satu sama lain, sehingga pada gilirannya akan melahirkan sikap apresiatif dan toleransi terhadap agama lain. *Ketiga*, memperkenalkan bacaan- bacaan atau berbagai referensi yang bernuansa pendidikan multikultural sejak dini kepada para pendidik (dosen).[140]

Guru atau dosen di sekolah atau kampus memegang peranan penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif dan moderat di sekolah. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat, maka dia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan tersebut pada siswa di sekolah.[141] Peran guru/dosen dalam hal ini meliputi; *pertama*, seorang guru/dosen harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. *Kedua*, guru/dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Misalnya, ketika terjadi bom Bali (2003), maka seorang guru/dosen yang berwawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. *Ketiga*, guru/dosen seharusnya menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, maka

140 Ahmad Asroni, "Membendung Radikalisme, Merajut Kerukunan Umat Beragama: Sebuah Upaya Rekonstruktif terhadap Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *Penamas*, XXIV (1) 2011, hlm.126

141 Husniyatus Salamah Zainiyati, "Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagamaan Inklusif di Sekolah", *ISLAMICA*, I (2) Maret 2007, hlm.141

pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. *Keempat*, guru/dosen mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama (aliran), misalnya, kasus penyerbuan dan pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Lombok-NTB dan kekerasan pada jamaah Syiah di Sampang Madura baru-baru ini tidak perlu terjadi, jika wacana inklusivisme beragama ditanamkan pada semua elemen masyarakat termasuk peserta didik (mahasiswa).[142]

Selain guru atau dosen, sekolah dan kampus juga memegang peranan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain; *pertama*, sekolah/kampus sebaiknya membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-undang sekolah yang diterapkan secara khususdi satu sekolah tertentu. Dalam undang-undang sekolah tersebut, tentunya, salah satu poin penting yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut; *kedua*, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara siswa/mahsiswa yang mempunyai keyakinan berbeda, maka sekolah/kampus harus berperan aktif menggalakkan dialog antariman dengan bimbingan guru-guru atau dosen-dosen dalam sekolah/kampus tersebut. Dialog antariman semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar siswa/mahasiswa terbiasa melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda; *ketiga,* hal yang paling penting dalam penerapan pendidikan multikultural yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai, dan diterapkan di sekolah/kampus. Pada intinya, kurikulum pendidikan multikultural adalah kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula buku-buku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah/kampus, sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik (mahasiswa) tentang pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat.[143]

Akhirnya, strategi pembelajaran yang digunakan guru/dosen mempunyai peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam konteks inklusif- multikultural. Tanpa adanya metode dan media yang bagus, materi pembelajaran sebagus apapun akan sulit dicerna dengan baik oleh peserta didik. Pendidik (guru/dosen) dapat membuat metode dan media pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan kebutuhan serta kondisi objektif peserta didiknya (siswa/mahasiswa). Dalam konteks ini, pendidik (guru/dosen) dituntut sekreatif mungkin untuk mendesain serta menggunakan

142 Husniyatus Salamah Zainiyati, "Pendidikan Multikultural…, hlm.141-142.

143 M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*…, hlm. 61-63

metode dan media pembelajaran yang tepat, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi ke dalam kehidupan konkrit sehari-hari.[144]

Pendidik agama Islam tidak boleh terpaku pada satu metode saja, namun harus dapat mengelaborasi berbagai metode seperti ceramah, diskusi, field trip atau studi banding, dan lain-lain. Peserta didik misalnya dapat diajak mengunjungi rumah ibadah dan berdialog dengan pengurus rumah ibadah atau jemaat. Pendidik (dan lembaga pendidikan) juga dapat mengagendakan untuk mengundang seorang atau kelompok minoritas agama untuk memberikan ceramah dan berdiskusi dengan peserta didik. Dengan begitu, peserta didik mendengar, berdiskusi, dan sharing pengalaman tentang apa saja yang mereka rasakan selama ini sebagai kaum minoritas. Pasca mendengar testimoni kaum minoritas, dalam diri peserta didik diharapkan tumbuh sikap apresiatif dan empatik terhadap kaum minoritas, sehingga mereka dapat menerima serta menempatkan kaum minoritas secara terhormat dan sederajat seperti halnya kelompok masyarakat yang lain. [145]

Sementara terkait media pembelajaran, pendidik agama Islam misalnya dapat memutar film dan membuat gambar, poster, komik, dan sebagainya yang memuat nilai-nilai toleransi beragama. Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat belakangan ini, kiranya tidak sulit bagi pendidik agama Islam untuk mencari dan membuat media bermuatan nilai-nilai toleransi yang bagus dan menarik. Film-film berkonten toleransi saat ini banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah film "Mata Tertutup" karya Garin Nugroho yang diproduksi oleh Maarif Institute dan dirilis pada tahun 2011. Film ini dimaksud sebagai propaganda antikekerasan dan antifundamentalisme. Saat ini Maarif Institute tengah gencar melakukan road show dan diskusi film "Mata Tertutup" di sejumlah kota di Indonesia. Sasaran program ini ditujukan kepada siswa dan mahasiswa. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan Maarif Institute untuk mengadakan program road show dan diskusi "Mata Tertutup". Dengan menonton film-film berkonten toleransi, peserta didik ke depannya diharapkan memiliki sikap toleransi dan menghargai kebhinnekaan.

Selain upaya strategi deradikalisasi di atas, menurut Ahmad Rokhmat, strategi deradikalisasi dapat ditempuh dengan cara lebih memastikan "obat" apa yang sesuai dengan indikasi penyakit radikalisme. Selain itu juga perlu dirumuskan apa tujuannya, yakni mengembangkan Islam moderat. Bagaimana

144 Ahmad Asroni, "Membendung Radikalisme…, hlm. 129

145 Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan…, hlm. 236

pola hubungan antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, digambarkan Abu Rohmad dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalizaton*) berikut ini:

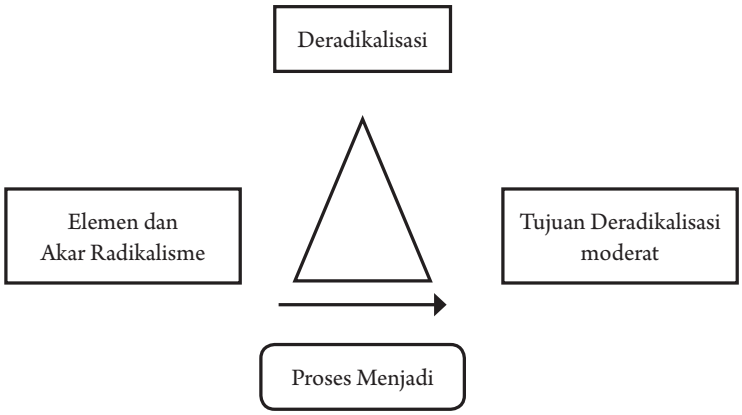

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa deradikalisasi dapat dimulai langsung dari elemen maupun akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat, serta di samping itu, deradikalisasi juga dapat dilakukan setelah seseorang menjadi radikal (*curative deradicalization*). Model ini bersifat menyembuhkan bagi pelaku radikalisme, baik sebelum maupun setelah terjadi aksi radikal (teror). Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model yang pertama juga dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model yang pertama ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks dunia pendidikan, pihak yayasan, perguruan tinggi, sekolah, guru, dosen dan orang tua menjadi aktor utama.Sedangkan isi atau program deradikalisasinya, meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) re-edukasi (memahami Islam lebih utuh); (2) kampanye ukhuwwah islāmiyyah dan anti radikalisme di berbagai sekolah/ madrasah dan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

C. Evaluasi Strategi Deradikalisasi Pendidikan Islam

Setelah strategi deradikalisasi berhasil diterapkan di setiap lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (dalm konteks ini pendidikan tinggi Islam), maka tidak langsung mengklaim bahwa program strategi deradikalisasi sudah berjalan

sukses. Tentunya dalam setiap strategi deradikalisasi yang dilaksanakan, ada hambatan dan kendala yang tentu membutuhkan tindaklanjut. Untuk itu, evaluasi strategi amat dibutuhkan untuk dapat mengetahui sejuhmana program deradikalisasi pendidikan Islam sudah mampu menjadi solusi terhadap deradikalisasi dan kontra radikalisasi terhadap pemahaman mahasiswa yang cenderung dibayangi dengan doktrinasi keagamaan oleh berbagai ormas keagamaan yang radikalis.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation*, yang memiliki arti nilai atau harga. Secara bahasa evaluasi adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.[146] Evaluasi juga dikatan sebagai proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan.[147] Dalam konteks ini adalah penilai dan pertumbuhan serta perkembangan pola pembelajaran agama Islam di kampus yang berwawasan inklusif-multikultural sudah berlangsung sesuai harapan dan tahapan atau kah mengalami hambatan dan kendala yang harus dicarikan solusi lain sebagai perbaikan ke depan. Terkait kendala yang ditemukan dari penerapan pendidikan Islam inklusif-multikultural di kampus adalah maraknya radikalisasi agama terhadap mahasiswa yang kini banyak menyerang generasi milenial melalui media sosial.

Oleh karena itu, berbagai upaya penerapan deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi Islam seharusnya tidak hanya menyentuh tataran dunia nyata saja, tetapi juga melakukan kontra deradikalisasi melalui media sosial. Ekses pergerakan dakwah kampus kelompok Islamisme ini tidak hanya terjadi di masjid kampus tetapi sudah menggunakan media sosial. Kelemahan strategi deradikalisasi ini belum menyentuh program deradikalisasi pendidikan Islam melaui media sosial dalam berbagai fitur aplikasinya seperti facebook, instagram, twitter, whatsApp, dan youtube. Mengingat media sosial dewasa ini menjadi lahan subur penyemaian ideologi radikal.

Media sosial pada era milenial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak muda muslim dalam belajar agama. Tokoh agama yang digital friendly lebih mudah untuk diterima, karena mereka dapat mengakses secara mudah di mana pun dan kapan pun mereka inginkan. Menurut riset, menemukan bahwa kehadiran media sosial telah mereduksi peran pendidikan agama dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi.

Begitu banyak ustadz-ustadz media sosial saat ini menjadi model bsgi generasi milenial seperti ustadz Yusuf Mansur, AA Gym, Alm. Jefry Al-Bukhari.

146 Ramayulius, *Ilmu Pendidikan Islam*…,hlm. 221.

147 Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hlm. 139.

Kekuatan media sosial juga melahirkan tokoh-tokoh baru yang sangat populer atau bisa disebut sebagai ustadz "viral" seperti Hanan Attaki, Adi Hidayat, Abdul Shomad (UAS)—Da'i sejuta viewers, Khalid Basalamah, Salim A Fillah, dan Felix Siaw.[148] Padahal, dari berbagai ustadz media sosial ini ada beberapa ustadz yang berafiliasi dengan aliran radikalisme Islam di Timur Tengah yang sampai saat ini dalam dakwahnya tidak pernah surut mengusung ideologi radikal dan menginginkan tegaknya khilafah Islamiyah.

Dengan banyaknya anak muda (mahasiswa) yang belajar agama melalui media sosial dengan ustadz media sosial tersebut tentu akan berdampak pada perubahan paradigma mereka dalam memahami Islam, terlebih mereka tidak begitu mengetahui latar belakang ulama itu, sehingga dengan kepiawaian ulama kontemporer tersebut secara langsung terjadi proses indoktrinasi. Pendidikan agama Islam yang biasanya merupakan sumber belajar agama dalam sistem pendidikan formal kini beralih fungsi di media sosial.

Faktor lain generasi muda kini beralih belajar agama melalui media sosial juga disebabkan karena minimnya SKS pembelajaran agama di kampus sehingga mahasiswa masih kurang puas dengan pembelajaran agama yang dosen agama Islam sampaikan. Sehingga, alternatif pelarian belajar agama mereka dengan membuka channel youtube dan belajara agama secara ototdidak tanpa pengawasan dan diskusi. Sehingga, pemahaman yang mereka dapatkan bisa disalahpahami atau "gagal paham" yang tentunya akan berujung pada kesalahpahaman dalam beragama. Hal ini dapat dilihat, ketika adanya tausiah seorang ustadz media sosial terkait persoalan bid'ah. Bida'ah merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tentunya hal ini akan bertolak belakang dengan perkembangan kemajuan teknologi.

Situasi ini sudah diterangkan oleh Lim dalam Hosen, bahwa dengan kekuatan jaringan internet, para pemuda dapat menyebarkan pemahaman tentang konspirasi global serta menyebarkan kepercayaan dan identitas perlawanan mereka kepada para pengguna internet lainnya.[149] Untuk audiens dunia maya, penyebaran oleh kelompok ini memiliki kekuatan dunia maya yang lebih kuat dibandingkan dengan CNN dan BBC. Begitu pula online fatwa yang menjadi rujukan para anak muda (mahasiswa) di atas. Pasar pengguna media online inilah yang menentukan nasib fatwa di dunia maya. Penjelasan di atas

148 Chaider S. Bamualim, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial*...,hlm.26.

149 Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling A Kiai", in Greg Fealy, Sally White, *Eskpressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapura: ISEAS, 2008), hlm. 45.

menunjukkan trend anak muda merujuk pemahaman keagamaannya melalui sumber dunia maya.

Tidak hanya pasif, aktivis muda muslim milenials juga mendorong reproduksi pengajian dan belajar keagamaan melalui dunia maya. Deliana dan Taufiqul Aziz, keduanya dari Ta'lim Alif—Lembaga Dakwah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana menyampaikan bahwa mereka aktif mencari ustadz-ustadz yang terkenal di media sosial. Lebih dari itu, mereka juga memproduksi sosial media sebagai media belajar agama. Dalam video yang dibuat oleh Tim Alif, misalnya episode Komedi Edukatif Alif Part 2 memiliki viewer lebih dari 11 K atau 110. 000 penonton.[150] Sementara LDK UIN Jakarta , menurut Chandra dan Musab Izzuddin, juga menyiarkan kajian live melalui instagram. Live kajian melalui facebook dan instagram ini juga dilakukan oleh Ahmad Goniawan dan teman-temannya di LDK Universitas Negeri Jakarta. Bagi aktivis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta, menyiarkan secara live bermakna mendokumentasikan kegiatan sekaligus membantu teman mereka yang tidak bisa hadir secara langsung untuk menyimak. Ada beberapa group media sosial yang cukup viral dan memiliki masa yang cukup besar seperti whatsapp Gerakan Ukhti Syar'i, group Muslimah di line, dan akun Pemuda Hijrah.

Berbagai group media sosial kini sudah mereduksi pembelajaran agam di keluarga, sekolah, bahkan perguruan tinggi Islam. Generasi muda lebih percaya dengan paparan pengetahuan agama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz media sosial yang jika mereka mengetahui bahwa ustadz-ustadz media sosial tersebut tidak memiliki pemahaman komprehensif terhadap Islam yang sesungguhnya.

Untuk itu, salah satu point evaluasi strategi yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan membentuk agen duta pendidikan anti radikalisme di media sosial sebagai bentuk deradikalisasi dan kontra radikalisasi terhadap maraknya pembelajaran agama melalui media sosial yang justru membuat generasi muslim mudah terpapar bahaya doktrinasi paham radikalisme. Kontra radikalisasi yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan group-group media online Islam yang lebih moderat untuk menghalau bahaya gerakan radikalisme media sosial yang kini semakin massif dan mengkhawatirkan.

150 https://www.youtube.com/watch?v=tcYDeXIWrew (diakses 28 Juni 2019).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah serta data hasil penelitian, maka ditemukan bahwa kampus Islam yang ada di Kalimantan Timur dan Utara rawan terpapar radikalisme atas nama agama (Islam) yang kini begitu mengkhawatirkan dan butuh strategi yang tepat dalam mengatasinya. Gerakan radikalisme Islam seperti Haraki Tarbawi (PKS), Tahriri (HTI), dan Salafi (Wahabi) kini tidak hanya menyemaikan ideologinya melalui lembaga dakwah kampus, gerakan pembebasan mahasiswa, dan khilafah Islamiyah dalam bentuk kajian-kajian keislaman di masjid-masjid kampus atau kelas-kelas baik berbentuk halaqah, daurah, usrah, dan mabit, tetapi gerakan organisasi Islam radikal yang merupakan afiliasi organisasi ekstrem dari Timur Tengah ini sudah bertransformasi dalam kajian dakwahnya melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, whatsaap, dan youtube.

Untuk itu, dalam menangkal radikalisme atas nama agama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang ada di Kalimantan Timur dan Utara yaitu IAIN Samarinda, STIS Samarinda, UNU Kaltim, STAIS, STITBA, STITSYAM, STIT Ibnu Khaldun Nunukan, dan STIT Al-Anshar Bulungan melakukan manajemen strategik melalui: (1) deradikalisasi pendidikan Islam dengan merumuskan kurikulum pendidikan Islam inklusif-multikultural; (2) membentuk tenaga pendidik (dosen) yang berparadigma inklusif-multikultural dengan penuh kreativitas dalam mengelola pembelajaran yang unik dan menarik dengan berbagai sentuhan dan muatan nilai-nilai toleransi, plural, dan humanis serta membentuk duta pendidikan anti radikalisme media sosial; (3)

melakukan evaluasi deradikalisasi pendidikan Islam inklusif multikultural yang berorientasi pada target sasaran yang tepat.

Penulis merekomendasikan, pertama; kepada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) agar segera membentuk satgas atau duta pendidikan anti radikalisme media sosial guna meredam berbagai doktrinasi ideologi Islam radikal di media sosial.

Kedua; Bagi para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk dapat memberikan pelatihan, seminar, workshop, dan short course kepada dosen agar bisa memiliki paradigma inklusif-multikultural dalam menyampaikan pembelajaran keagamaan di kampus.

Ketiga; Bagi mahasiswa agar jangan mudah terpengaruh dengan romantisme Islam radikal. Mahasiswa harus diajarkan berpikir kritis (critical thinking) untuk dapat berpikir dan menyaring berbagai pola pembelajaran agama yang menyesatkan dan suka mengklaim kebenaran atas golongannya.

Keempat; bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kemenristek Dikti untuk dapat melakukan sistem strategi deradikalisasi dengan mengintegrasikan seluruh pola lembaga pendidikan baik sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan wawasan keislaman dan kebangsaan agar sedari dini memahami bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang ramah, toleran, dan humanis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, Nasir, "Berdayakan Potensi Masyarakat dalam Pemberantasan Terorisme", *Komunika*, 12 (VII) Juli 2011.

Abdullah, M. Amin, *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka* Yogyakarta: Suka Press, 2010.

Akdon, *Strategic Management for Educational Management*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Arif, Mahmud, "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Asroni, Ahmad, "Membendung Radikalisme, Merajut Kerukunan Umat Beragama: Sebuah Upaya Rekonstruktif terhadap Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *Penamas*, XXIV (1) 2011.

Azra, Azyumardi, "Revisitasi Islam Politik dan Islam Kuntural di Indonesia" dalam *Indo-Islamica*, Vol. 1, No. 2, 2012.

_____, "Rekrutmen Anak Sekolah" UIN Jakarta, Kamis, 28 April 2011, http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak- sekolah.html [14 September 2013].

_____, "Isu Kontemporer Pendidikan Islam: Multikulturalisme dan Radikalisme Agama", Seminar Nasional Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 18 Maret 2017.

Bamualim, Chaider S, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial,* Jakarta: CSRC, 2018.

Baidhawy, Zakiyuddin dan Thoyibi, M, ed., *Reinvensi Islam Multikultural* Surakarta: Pusat Studi Bahasa dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

_____, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* Jakarta: Erlangga, 2005.

Bruinessen, Van, "Geneologies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia", *Southeast Area Research*, 10 (2), 2002.

Chulsum, Umi dan Novia, Windy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.

Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,* Jakarta: Teraju, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Efendi, Bahtiar dan Prasetyo, Hendro, *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 1998.

Eubank, William Lee dan Weinberg, Leonard, *The Roots of Terrorism: What Is Terrorism?*, New York: Infobase Publishing, 2006.

Epafras, Leonard Chrysostomos, Religious e-Xpression among the Youths in the Indonesian Cyberspace, *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Volume 13, Nomor 1, Juni 2016.

Fadjar, Abdullah, dkk.,*Laporan Penelitian Islam Kampus* Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007.

Fi, Leysa Khadza, *Cara Mudah Mengenal dan Membaca Karakter dan Kepribadian Orang Lewat Internet,* Yogyakarta: Mantra Book, 2013.

Ghifari, Imam Fauzi, Radikalisme di Internet, *Jurnal Religious*, Vol. 1, No. 2, Maret 2017.

Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.

Hornby, AS, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: O.U.P, 1993.

_____, *Oxford Advance Leaner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1987.

_____, AS, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Walton: Oxford University Press, 1989.

Hosen, Nadirsyah, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling A Kiai", in Greg Fealy, Sally White, *Eskpressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapura: ISEAS, 2008.

Hasan, Noorhaidi, *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.

_____, "Ideologi, Identitas, dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mengatasi Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia", *Prisma*, Vol. 29, 2010.

Hamdi, Saipul, et.al, The Recovery of an Non-Violent Identity for an Islamist Pesantren in an Age of Teror, *Australian Journal of International Affair*, Published Online, 19 Agustus 2015.

Harto, Kasinyo, *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

Hilmy, Masdar, "Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia", dalam Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2

Inbar, Efraim dan Weitzman, Bruce Maddy, *Religious Radicalism in the Greater Middle East*, Oxon: Routledge, 2013.

Idris, Irfan, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, 2017.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *At-Tahrir*: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2014.

Kurniadin, Didin dan Machali, Imam, *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Kementerian Agama RI, "Lembaga Pendidikan Islam Tentukan Keberagamaan Indonesia", *Majalah Pendidikan Islam (Pendis)*, Edisi Nomor 5, Desember /III/2015.

Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004.

Muliadi, Erlan, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah", Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1) Juni 2012.

Muqowim, "Mencari Pola Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural", *MDC Jatim*, I (3), Tahun II, Oktober 2004.

Mukhibat, "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme Berbasis Studi Etnopedagogi di PTNU dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, September 2015.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muri'ah, Siti, *Pendidikan Berbasis Multikultural: Belajar Integrasi Sosial dari Heterogenitas Masyarakat Kalimantan Timur*, Yogyakarta: Interpena, 2016.

Mubarok, Husni, "Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan Institusional", *HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius*, IX (35), Juli –September, 2010.

Muhammad, AS. Hikam, *Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT. Kompas, Media Nusantara, 2016.

Muhtadi, Burhanuddin, "The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia", *The Asian Journal of Social Science*, (NUS & Brill) 37 (2009)

Muthohirin, Nafi', *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*, Jakarta: IndoStrategi, 2014.

_____', Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial, *Jurnal Afkaruna*, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2015.

Murjani, Saiful, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Gramedia, 2007.

Mubah, A. Safril, *Teroris Versus Globalisasi : Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah Terhadap Hegemoni Amerika*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012.

Mufid, Ahmad Syafi'I, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama), *Prosiding Seminar Nasional*, Palu, Mei 2012.

Mulyasana, Dedi, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

_____, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Muqoyyidin, Andik Wahyun, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif", dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.

_____, "Signifikansi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural dalam Mengakomodir Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi III, 2013.

Ma'rifah, Indriyani, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam", Conference Procedings *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012.

Machali, Imam, Peace Education dan Deradikalisasi Agama, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Juni 2013

Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam, Tanpa Penulis, HTI, 2009.

Nashir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2013.

Nursisto, *Membumikan Pembelajaran Agama Islam*, Yogyakarta: Adicita, 2000.

Nikols,F, *Communities of Practice: A Start Up Kit*, The Distance Consulting Company, 2000.

Peshkin, Alan, "The Relationship Between Culture and Curriculum: A Many Fitting Thing", dalam Philip W. Jackson, ed., Handbook of Research on Curriculum (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996.

Penguatan Indonesia-Prancis", Kompas, 31 Maret 2017.

Popper, Karl, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Rabin et.al, *Handbook Of Stretegic Management*, New York: Marcell Dekker, 2000.

Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Rohiat, *Manajemen Sekolah*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rabin et.al, *Handbook of Strategic Management*, New York: Marcell Dekker, 2000.

Rubaidi, A, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.

Rahmad, *Meraih Berkah dan Pahala Melalui Internet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Roy, Oliver, *The Failur of Political Islam*, London: I.B. Tauris & Co, Ltd, 1994.

Rokhmad, Abu, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo*, 20 (1) Mei 2012.

SB, Agus, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta: Daulat Press, 2016.

Sinaga, Obsatar dan Montratama, Prayitno Ramelan Ian, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.

"Short Course Guru PAI ke Australia: Memperbaharui Metodologi Mengasah Prestasi", Majalah *Pendidikan Islam (Pendis),* Edisi Nomor 5/Desember/ III/2015.

Sirry, Mun'im A, *Membendung Militansi Agama Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Suryadinata, Leo, *et.al*, *Indonesian's Population*, Singapore: Asia Institute, 2003.

Suriasumantri, S. Jujun, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam,* t.pt: Pusjarlit dengan penerbit Nuansa, t.th.

Sudjana, Nana, *Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Nusantara Press, 2004.

Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Rasindo, 2003.

Scruton, Roger, *Kamus Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sulfikar, Achmad, "Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia", *Jurnalisa* Vol.4, No. 1, Mei 2018.

Susanto, Edi, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)", *KARSA*, IX (1) April 2006.

Udin, Nur Hidayat Wakhid, "Truth Clime dan Implikasinya dalam Peniptaan Kohesi Damai Antar Umat Beragama" dalam *ISLAMICA*: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No. 2, Maret 2016.

Ukas, Maman, *Manajemen, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Bandung: Agnini, 2004.

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, "Melacak Akar Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2) November 2010.

Wahid, Abdurrahman (Ed*), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: LibForAll Foundation, 2009.

Wijaya, Endra, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel", Yudisial, III (2) Agustus 2010.

Wildan, Muhammad, "Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia" dalam *Jurnal Ma'arif*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.

Wilson, Ian, "Teman dijadikan Musuh" dalam Dede Mulanto dan Coen Husain Pontoh (Ed), Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia, Jatinagor: Pustaka IndoPROGRESS & Islam Bergerak, 2017.

Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Zada, Khamani, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zainiyati, Husniyatus Salamah, "Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagamaan Inklusif di Sekolah", *ISLAMICA*, I (2) Maret 2007.

TENTANG PENULIS

Khairul Saleh lahir di Probolinggo Jawa Timur, 16 Juli 1965. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Triwung Kidul lulus tahun 1977, Madrasah Tsanawiyah Sunan Giri Probolinggo lulus tahun 1981, Madrasah Aliyah Negeri Probolinggo lulus tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 di IAIN Antasari Samarinda lulus tahun 1989, dan melanjutkan ke program pascasarjana di STAIN Malang lulus tahun 2001.

Adapun riwayat pekerjaan; disamping menjadi dosen dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Filsafat Umum, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, juga mendapatkan tugas tambahan menjadi staf di bagian akademik STAIN Samarinda, tahun 1992–1999, kepala P3M STAIN Samarinda, tahun 2004–2008, staf jurusan syari'ah STAIN Samarinda, tahun 2012–2014, Kapus Audit & Pengendalian Mutu LPM, tahun 2014–2016, Sekretaris LPM, Tahun 2016–2019, Sekretaris LP2M IAIN Samarinda, Tahun 2019 - Sekarang

Karya Penelitian;

1. Penciptaan Suasana Religius Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda, Tahun 2013
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan *(Studi Tentang Interaksi Sosial Kepala Mts N Model Samarinda Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru),* Tahun 2014
3. Inovasi Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Min I Dan Min 2 Samarinda), Tahun 2015
4. Rekonstruksi Sistem Pendidikan Madrasah Di Min 2 Model Samarinda (Studi Tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam), Tahun 2017

5. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (Sdit) Di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018
6. Manajemen Strategik Dalam Menangkal Radikalisme Melalui Deradikalisasi Berbasis Pendidikan Islam Di Kalimantan Timur Dan Utara, Tahun 2019

Buku :

Manajemen Pendidikan Pesantren Mahasiswa, Tahun 2010

Jurnal:

1. Pendidikan Humanis Antara Barat dan Islam; Telaah Kritis Pemikiran Pendidikan John Dewey; Dinamika Ilmu, 12 (2), tahun 2012
1. Penciptaan Suasana Religius Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda; Fenomena, 5 (1), tahun 2013
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan *(Studi Tentang Interaksi Sosial Kepala Mts N Model Samarinda Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru)* Fenomena, 6 (1), tahun 2014

Muhammad Arbain., adalah Dosen Universitas Borneo Kota Tarakan Kalimantan Utara. Selain dosen, ia juga pernah menjadi tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah 2, SMA DUTA, SMA Mamburungan, MA Al-Khairat, SMPN 4 Tarakan, dan SMKN 1 Tarakan. Ketika menempuh Program Pascasarjana (S2) tahun 2018 di IAIN Samarinda prodi Manajemen Pendidikan Islam, Ia pernah nyambi bekerja di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda, Humas IAIN Samarinda, dan Asisten Dosen di IAIN Samarinda. Ia lahir pada tanggal 05 September 1988 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Putra dari pasangan Bapak H. Mustafa Husen dan Ibu Halijah ini, telah menyelesaikan studi formalnya antara lain: SDN 007 Mamburungan (lulus tahun 2000), kemudian melanjutkan sekolah di MTSN (lulus tahun 2004), kemudian meneruskan di SMAN 2 Tarakan (lulus tahun 2007). Setelah itu melanjutkan S1 di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Samarinda yaitu STAIN Samarinda, mengambil jurusan Kependidikan Islam (KI) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan lulus pada tahun 2011, memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dengan meraih predikat *Summa Cum Laude.*

Buku-buku yang telah ia tuliskan di antaranya: *Shalat for Success* (2012), Dahsyatnya Gerakan, Bacaan, dan Waktu Shalat (2012), Sang Juara Muda: Rahasia Meraih Sukses di Usia Muda (2014), Jago Musabaqah Makalah Al-Qur'an (M2Q) (2014), Buku Pintar Beragama Islam (2014), Pendidikan Anti Korupsi (2014), Kado Pernikahan Terindah Untuk Istriku Bidadari Surgaku (2014), Ingatlah Allah, Allah Akan Mengingatmu (2015), Cintailah Allah, Maka Penduduk Bumi Akan Mencintaimu: *Success in Life with Love* (2015), 24 Jam: Detik-detik Berharga Sang Penghuni Surga (2015), Man Yazro' Yahsud: *The Power of Kindness* (2015), *Shalat for Therapy* (2015), Ternyata Mencetak Anak Hebat Itu Mudah: *The Miracle of Hypnoparent* (2015), Sukses Tidak Hanya Menjadi PNS: Menjungkir Balik Logika Primitif Menjadi Super Kreatif (2015), 27 Pemuka Agama Kalimantan Utara (2016), Runtuhnya Dinasti Tengara (2016), 3 Mantra Kehidupan (2016), Cara Cepat Menjadi Penulis Hebat (2016), Manajemen Pendidikan Islam (2016), Surga yang Hilang: Sebuah Novel Penggugah Jiwa (2016), Semoga Ayah Bunda Disayang Allah (2016), Aku, Kau, dan Kenangan (2016), Mengapa Aku Berbeda (2016), Suara dari Surga (2016), Dwilogi Novel Budaya Tidung: Kudung (2017), Lanun: A History of Pirates From North Borneo (2017). Buku Pintar Kebudayaan Tidung (2018), dan Perisai, Parang, dan Tombak Bersilang (2018).

Ia pernah meraih juara I Musabaqah Makalah Al-Quran (M2Q) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan mewakili Kalimantan Timur untuk dapat tampil pada perhelatan MTQ Tingkat Nasional di Kota Ambon, Provinsi Maluku Tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 ia kembali meraih juara II Musabaqah Makalah Al-Qur'an (M2Q) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis juga merupakan peneliti Puslitbang Lecture Kementerian Agama RI kawasan Kalimantan Utara dalam pembuatan Ensiklopedi Pemuka Agama Kalimantan Utara dan Ensiklopedi Budaya Keagamaan Kalimantan Utara. Selain itu, penulis juga merupakan Dewan Hakim Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an Provinsi Kalimantan Utara dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan pada bidang penelitian dan pengkajian.

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 03 Maret 2014, ia menikahi seorang gadis yang shalehah. Gadis ini adalah pasangan lombanya dalam ajang Musabaqah Makalah Al-Qur'an (M2Q). Semoga Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aamiin. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat menghubunginya melalui WA (0853-4800-5659), Email: fatih16elarsy@gmail.com, facebook: Muhammad Arbain atau di via telepon 0813-4731-6114.

UNIVERSITAS BORNEO
UBT
TARAKAN

ASOSIASI DOSEN PERGURUAN
A D P
UNIVERSITAS BORNEO
UBT
TARAKAN